

**GAGASAN STRATEGIS
PRABOWO SUBIANTO**

STRATEGI TRANSFORMASI BANGSA

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

**INDONESIA
MENJADI NEGARA
MAJU DAN MAKMUR**





Dan Saudara-saudara mengetahui bahwa Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sekadar hanyalah, saya katakan berulang-ulang, satu jembatan untuk menuju dan akhirnya mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang pokok, yaitu:

Suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Suatu masyarakat yang tiap-tiap warga negara dapat hidup sejahtera di dalamnya.

Suatu masyarakat tanpa penindasan, tanpa *exploitation*.

Suatu masyarakat yang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke

Suatu masyarakat yang berulang-ulang menjadi inspirasi penegak semangat daripada segenap pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang telah memberikan pengorbanannya.



**AMANAT PRESIDEN SOEKARNO
PADA SIDANG PERTAMA DEWAN PERANTJANG NASIONAL**

28 Agustus 1959

**GAGASAN STRATEGIS
PRABOWO SUBIANTO**

**STRATEGI
TRANSFORMASI
BANGSA**

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

**INDONESIA MENJADI NEGARA
MAJU DAN MAKMUR**

Cetakan ke 4 (Soft Cover)

November 2023

Saudara-saudara sekalian,

Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa.

Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Sukarno dan Dr. Mohammad Hatta, mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencederaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Cita-cita bernegara ini dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.

Saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai taraf kesejahteraan dan gambar-gambar pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa.

Ketimpangan ekonomi masih tinggi. Masih terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terancam jatuh miskin.

Saya percaya, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki seharusnya negara kita tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Inilah tantangan sejarah bagi generasi kita.

Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan.

Pembangunan yang dibangun atas dasar fondasi yang telah dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%.

Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Ini semua harus kita lakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita.

Dengan buku ini, saya mengajak saudara untuk turut memahami kondisi negara kita, memahami **Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045**, dan bagaimana mewujudkan strategi tersebut sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dan makmur.

Jakarta, Oktober 2023

Prabowo Subianto

Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045: Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur

Penulis : Prabowo Subianto
Editor : Dirgayuza Setiawan
& Kelompok Kerja Transformasi Bangsa
Fotografer : Bachren Lukskardinul dan tim K5
Desain : Ainz Design
Penerbit : PT. Media Pandu Bangsa
Redaksi : PT. Media Pandu Bangsa
Jalan Kemang V, Jakarta Selatan
contact@mediapandubangsa.com

Cetakan ke 4, Oktober 2023 (Soft Cover)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Subianto, Prabowo

Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045; editor, Dirgayuza Setiawan

Jakarta: PT. Media Pandu Bangsa, 2023

242 hlm.; 21x29,7 cm

ISBN 9-786239-928162

1. Sosial politik
2. Ekonomi

Kecuali dikatakan lain, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang digunakan dalam buku ini adalah Rp. 15.000 per USD 1. Sebagian besar hitungan dibulatkan ke titik desimal terdekat, atau dibulatkan ke penyebutan genap terdekat.

Apabila Anda menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada buku ini, harap menghubungi e-mail contact@mediapandubangsa.com.



The infographic is shaped like a classical building. At the top is a red triangular pediment containing the vision statement. Below it are three golden columns. Each column has a large red number and text. The columns are supported by three stacked red rectangular blocks at the base. The background is a light blue and white marbled pattern.

Visi
Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

8
MISI
ASTA
CITA

17
PROGRAM
PRIORITAS

8
PROGRAM
HASIL
TERBAIK
CEPAT

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis
Bangsa Indonesia

Prinsip Prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945



Tujuan Nasional

- 1 Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia
- 2 Memajukan Kesejahteraan Umum
- 3 Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- 4 Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial

Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah paham ekonomi yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.

Paham ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk masyarakat yang paling lemah.

Paham Ekonomi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:



1

Ekonomi yang religius dan wujudkan persatuan nasional

2

Ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan

3

Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional

4

Ekonomi yang egaliter (sederaajat) dan kerakyatan

5

Ekonomi yang berkeadilan sosial

Daftar Isi

Cita-Cita Indonesia Emas 2045

Cita-cita Abadi Bernegara	15
Bernegara untuk Kemajuan dan Kemakmuran	15
Capaian Kita Sampai Hari Ini	20
Cita-cita Indonesia Maju dan Makmur 2045	29
Menuju Negara Maju dan Makmur	29
Indikator Negara Maju dan Makmur	32
Syarat Mencapai Maju dan Makmur	33

Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Tantangan Strategis Global	41
Perubahan Iklim	42
Konflik Bersenjata di Ukraina dan di Palestina	45
Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara	47
Ancaman Pandemi Baru	48
Perlambatan Ekonomi Global	48
Meningkatnya Populasi	49
Disrupsi Kecerdasan Buatan (AI)	51
Tantangan Strategis Nasional	53
Terbatasnya Waktu Bonus Demografi	54
<i>Net Outflow of National Wealth</i>	56
Ketidakadilan Ekonomi	77
Ekonomi Jakarta Sentris	89
Demokrasi Kita Bisa dikuasai Pemodal	93
Elit Indonesia Rawan <i>Divide Et Impera</i>	103

Fondasi Indonesia Maju

Ekonomi Pancasila	109
Relevansi Ekonomi Pancasila	110
Naskah UUD 1945 Asli	120
Jokowinomics adalah Ekonomi Pancasila	125
Fondasi Ekonomi dari Presiden Joko Widodo	131
Capaian Ekonomi	132
Pembangunan Infrastruktur	134
Jaring Pengaman Sosial	138
Potensi Negara Kita	139
Cadangan Sumber Daya Alam	140
Sumber Daya Manusia	143
Lokasi Strategis Indonesia	145
Produksi Unggulan Bangsa Indonesia	147
Pasar Domestik Yang Besar	151

Strategi Percepatan Pembangunan

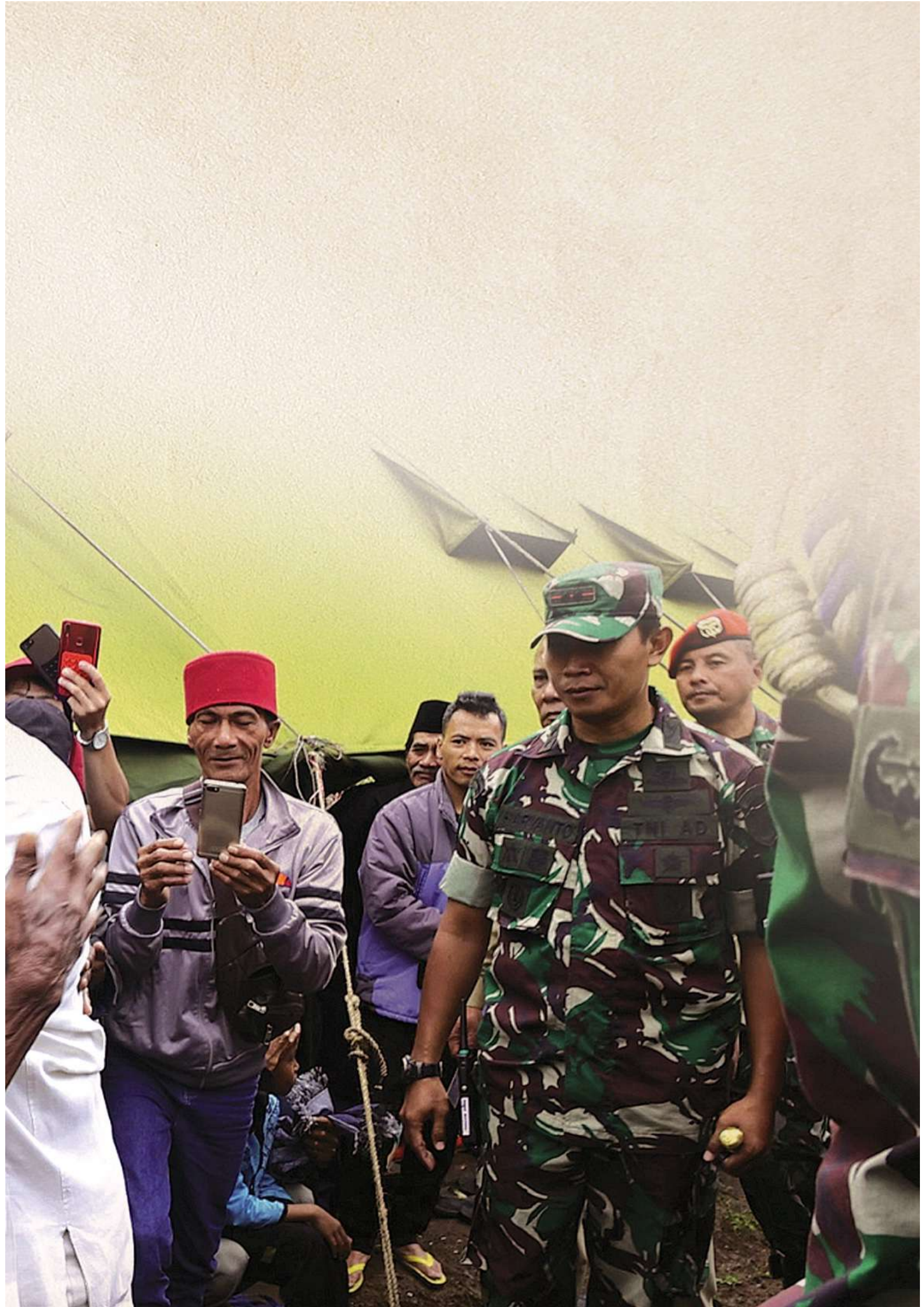
Program Hasil Terbaik Cepat	155
Makan Siang di Sekolah dan Bantuan Gizi	157
Pemberantasan TBC, Bangun RS & Cek Kesehatan	159
Lumbung Pangan Desa, Daerah & Nasional	161
Sekolah Unggul dan Renovasi Sekolah	164
Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kredit Usaha	166
Kesejahteraan Guru, Dosen, ASN, TNI & POLRI	169
Pembangunan Desa, BLT, Rumah dan Sanitasi	170
Badan Penerimaan Negara	172
Program Prioritas Pemerintah	175
Asta Cita	217

Kebersamaan dan Kerukunan:

Syarat Utama Tercapainya Indonesia Emas	221
--	------------

Cita-Cita Indonesia Emas







“Impian kami semua
rakyat Indonesia
mempunyai pekerjaan
yang layak,

... semua anak-anak
bangsa kita bisa sekolah
dan menuntut ilmu
terbaik dengan lancar,



... semua kebutuhan
pokok terpenuhi
dengan harga-harga
yang terjangkau,

... semua petani bisa
tersenyum karena harga
jual produk mereka bagus,



... semua buruh bisa
tidur tenang karena
menerima penghasilan
yang cukup,



... semua guru tekun
mencerdaskan bangsa
dan hidupnya dijamin
pemerintah,

... polisi, jaksa, prajurit
berjuang dengan gaji
yang layak dan keadaan
hidup yang baik,



... semua pasien
mendapatkan pelayanan
yang terbaik di rumah
sakit.”

Cita-cita Abadi Bernegara

Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera. Rakyatnya adil dan makmur. Rakyatnya hidup tanpa penindasan. Rakyatnya bahagia dari Sabang sampai Merauke.

Bernegara untuk Kemajuan dan Kemakmuran

Keputusan saya untuk masuk ke dunia politik berangkat dari sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang saya dapatkan dari mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Dari diskusi saya dengan ratusan pakar ekonomi, pelaku usaha, dan negarawan dari Indonesia dan mancanegara. Juga dari pengalaman saya puluhan tahun mengabdikan sebagai prajurit dan sebagai pengusaha.

Kesadaran yang saya maksud, pertama, adalah kesadaran bahwa sistem ekonomi dan politik yang dipilih oleh para Pendiri Bangsa kita, yaitu sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila, atau sistem ekonomi Pancasila, sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun Indonesia dan mencapai cita-cita kemerdekaan kita.

Kedua, bahwa sistem ekonomi yang sekarang dijalankan oleh negara kita tidak sesuai dari apa yang digariskan dalam UUD 1945 yang asli. UUD 1945 versi 18 Agustus 1945.

Ketiga, bahwa tidak mungkin saya bisa berhasil mengembalikan haluan ekonomi negara tanpa perjuangan politik. Oleh karena itu, pada tahun 2008 saya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai GERINDRA.

Pada tahun 2012, saya mendapatkan mandat dari Partai GERINDRA untuk maju jadi Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Walaupun tidak dinyatakan sebagai pemenang, saya mendapatkan dukungan dari setidaknya 62 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih.

Pada tahun 2018, saya kembali mendapatkan mandat dari Partai GERINDRA untuk maju jadi Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2019. Walaupun tidak dinyatakan sebagai pemenang, saya mendapatkan dukungan dari setidaknya 68 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih.

Partai GERINDRA, walaupun baru berdiri tahun 2008, juga mendapatkan suara terbanyak kedua di Pemilu Legislatif 2019.

Karena itu saya menulis buku ini. Saya ingin ada lebih banyak warga negara Indonesia yang mengetahui, di mana Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa saat ini berada – dan bagaimana sepatutnya Indonesia kedepannya.

Saya percaya, dukungan yang pernah saya dan Partai GERINDRA terima dalam Pemilihan Umum yang saya ikuti adalah karena visi, misi dan program kerja yang saya tawarkan kepada segenap bangsa Indonesia. Karena gagasan yang saya sampaikan. Sebagai seorang pejuang politik, adalah

sebuah kehormatan bagi saya untuk memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang seperti dicita-citakan oleh Para Pendiri Bangsa kita. Cita-cita yang mendorong Para Pendiri Bangsa untuk berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 adalah jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, seperti saudara dapat lihat dan rasakan sendiri, setelah 78 tahun merdeka, keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia belum tercapai.

Saya mengatakan demikian karena saya selalu memperhatikan angka-angka yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan politik kita. Saat ini, anggaran negara kita jauh dari ideal. Pendapatan pajak kita relatif terhadap kegiatan ekonomi atau rasio pajak kita sangat rendah, di bawah 10%.

Selain anggaran yang terlalu sedikit untuk menjalankan semua yang perlu kita lakukan, secara ekonomi kita sudah sulit berdiri di atas kaki kita sendiri.

Terbatasnya APBN kita mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat. Padahal, pembangunan manusia haruslah menjadi prioritas utama bagi sebuah negara.

Negara harus menjamin setiap warga negara bisa memiliki pendidikan yang baik, bisa hidup di lingkungan yang baik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, juga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, negara juga harus hadir untuk

memastikan tersedianya kesempatan bagi setiap warga untuk berwirausaha, baik secara kolektif atau berkoperasi ataupun secara sendiri-sendiri.

Adalah benar, kita perlu mengejar kemajuan infrastruktur negara lain. Kita juga perlu mengejar keberhasilan negara lain dalam menyejahterakan rakyat, dan dalam memperbaiki ketimpangan pendapatan. Kita harus bisa seperti Tiongkok yang menyelesaikan masalah kemiskinan akut sehingga tercapai *milestone* angka 0% kemiskinan di 100 tahun Partai Komunis Tiongkok, pada tahun 2021 lalu.

Kalau negara harus menentukan prioritas pembangunan, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki ketimpangan haruslah menjadi program kerja utama, yang diikuti dengan mengejar kemajuan infrastruktur.

Sebaik apapun niatnya, sebuah perjuangan politik tidak akan berhasil jika tidak dilakukan secara kolektif. Perjuangan kolektif yang dilakukan secara bersama dengan orang-orang yang sama-sama sadar dan memiliki tujuan yang sama jauh lebih baik dari berjuang sendiri-sendiri.

Karena itu saya memutuskan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju bersama mantan pesaing saya di Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Setelah kami berproses sekian lama, Presiden Jokowi kini memiliki kesamaan pandangan dengan saya, dan atas dasar kesamaan itu kita sama-sama bertekad untuk berjuang secara kolektif mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Apakah kita saat ini berada di jalan yang benar? Menurut saya kita sekarang sudah mengarah ke jalan yang benar, namun perjalanan kita masih panjang. Perjuangan ini juga tidak akan selesai hanya di masa pemerintahan ini, dan juga di masa pemerintahan berikutnya.

Karena perjuangan yang harus kita tempuh masih panjang, saya berusaha untuk menyadarkan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia akan tantangan bangsa dan negara kita. Itulah sebabnya diperlukan pendidikan politik. Hanya dengan pendidikan politik dapat terwujud suatu kesadaran bersama. Dengan kesadaran bersama, kita dapat turut serta dalam perjuangan besar dan perjuangan panjang mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia: Rakyat yang adil dan makmur.

Saudara-saudara sekalian. Perjuangan kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bukanlah suatu perjuangan yang mudah. Dalam perjalanan, kita harus melawan neo-kolonialisme, melawan sistem kapitalisme global dan para bonekanya.

Kita harus melawan mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu lemah, Indonesia yang selalu tergantung barang dan jasa yang mereka hasilkan. Kita harus melawan mereka-mereka yang melemahkan pertanian kita, dan juga industri pengolahan dan industri dasar kita.

Capaian Kita Sampai Hari Ini

Kalau kita mau tahu apakah pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir sudah baik atau belum, kita harus bandingkan dengan pencapaian ekonomi negara lain. Misalkan, kita bisa bandingkan pencapaian kita dengan Tiongkok, dan negara tetangga kita Singapura.

Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2019, adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah USD 309 miliar – angka ini naik ke USD 14,3 triliun di tahun 2019. Sebagai perbandingan, dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura tumbuh 19,5 kali lipat. Besar aktivitas ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat.

Bagaimanakah caranya, ekonomi Tiongkok yang pada tahun 1985 hanya 3,6 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia, tumbuh begitu pesat sehingga 30 tahun kemudian ekonomi Tiongkok bisa 12,8 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia?

Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip *state capitalism*, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara.

Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiongkok menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Saat ini ada lebih

dari 150.000 BUMN di Tiongkok, yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tiongkok.

82 BUMN Tiongkok ada di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar dunia – dari total 143 perusahaan Tiongkok di daftar Fortune Global 500. Sebagai contoh, pada tahun 1984 Tiongkok mendirikan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Sekarang ICBC adalah bank terbesar di dunia dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, kita, walaupun bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 hampir sama dengan prinsip kapitalisme negara ala Tiongkok, dalam mengelola cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam di Indonesia, kita malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi kita ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya.

Inilah sebabnya saya mengatakan, haluan ekonomi kita saat ini belum tepat. Pengelolaan ekonomi Indonesia belum sesuai dengan amanat sistem ekonomi negara di Pasal 33. Malah, saat ini kita terperangkap dalam sistem ekonomi oligarki – baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah.

Dalam sistem oligarki, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Mereka sering juga disebut sebagai 'para oligark'. Dengan uang, mereka memiliki kekuasaan yang berlebih. Kekuasaan mereka banyak menentukan kehidupan ekonomi dan politik dari bangsa kita.

Mereka bisa pesan kebijakan dan menentukan siapa-siapa saja yang boleh impor gula, daging, beras, jagung dan komoditas lainnya. Mereka juga bisa menentukan siapa-siapa saja yang jadi pemimpin karena mereka punya kemampuan untuk jadi penyandang dana utama dalam kampanye politik. Ekonomi diatur oleh beberapa orang super kaya, bukan oleh negara.

Hal ini mungkin karena 1% orang terkaya Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia. 10% orang terkaya Indonesia menguasai 66% kekayaan Indonesia. Menurut riset Credit Suisse, total kekayaan orang Indonesia ditaksir USD 3,2 triliun – sekitar Rp. 44.800 triliun.

Artinya 1% populasi terkaya Indonesia sekitar 2,7 juta orang saja menguasai USD 1,2 triliun¹ - sekitar Rp. 16.800 triliun. Ini kekuatan uang yang besar.

Negara kita kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Sesungguhnya, inilah tujuan kita merdeka. Inilah tujuan kita bernegara. Untuk menjadi negara sejahtera.

Namun untuk mencapai tujuan itu, kita perlu mengelola kekayaan negara kita dengan baik.

Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik itu di tingkat daerah atau di tingkat nasional. Keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat kita

¹ Credit Suisse Global Wealth Databook, 2021 – Tabel 4.5 dan Tabel 4.6

semakin miskin. Sebaliknya, keputusan-keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita semakin sejahtera.

Karena inilah saya berpolitik. Kalau saya anggap negara kita sudah tidak ada potensi lagi, sudah tidak ada harapan untuk menjadi sejahtera, mungkin saya tidak berpolitik.

Sejak pensiun dari Tentara Nasional Indonesia, saya semacam geregetan. Saya melihat Indonesia begitu kaya, Indonesia begitu banyak potensi. Indonesia hanya perlu punya dan melaksanakan dengan konsekuen strategi yang benar, manajemen yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Dengan tiga hal ini negara kita bisa cepat bangkit dan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Ranking Negara:

Aktivitas Ekonomi (Produk Domestik Bruto)

Peringkat	Negara	PDB
1	Amerika Serikat	USD 20,9 triliun
2	Tiongkok	USD 14,7 triliun
3	Jepang	USD 4,9 triliun
4	Jerman	USD 3,8 triliun
5	Inggris Raya	USD 2,7 triliun
6	Perancis	USD 2,6 triliun
7	India	USD 2,6 triliun
8	Italia	USD 1,9 triliun
9	Kanada	USD 1,6 triliun
10	Korea Selatan	USD 1,6 triliun
11	Russia	USD 1,5 triliun
12	Brazil	USD 1,4 triliun
13	Australia	USD 1,3 triliun
14	Spanyol	USD 1,3 triliun
15	Meksiko	USD 1 triliun
16	Indonesia	USD 1 triliun

Sumber: Bank Dunia,
World Development Indicators
2020 (Current US\$)

Ranking Negara:

Berdasarkan Kompleksitas Ekonomi

Dihitung berdasarkan keragaman dan nilai produk yang diekspor oleh sebuah negara ke negara lain. Angka ini mencerminkan ilmu pengetahuan kolektif yang dimiliki negara untuk menjadi negara yang berdaya saing secara ekonomi, dan kemampuan badan usaha di negara tersebut untuk menyediakan lapangan kerja berkualitas untuk warganya.

Peringkat	Negara	Indeks Kompleksitas Ekonomi
1	Jepang	2,49
2	Swiss	2,13
3	Jerman	2,07
4	Korea Selatan	2,05
5	Singapura	2,00
6	Ceko	1,80
7	Austria	1,77
8	Swedia	1,75
9	Slovenia	1,64
10	Hungaria	1,63
11	Amerika Serikat	1,57
12	Inggris Raya	1,55
13	Finlandia	1,48
14	Slovakia	1,45
15	Italia	1,37
16	Tiongkok	1,35
61	Indonesia	0,02
133	Nigeria	-1,77

Sumber: Harvard University, Atlas of Economic Complexity 2021, Angka 2019

Ranking Negara:

Kekayaan Sumber Daya Alam

Dihitung dengan menjumlahkan seluruh keuntungan (harga pasar dikurangi biaya ekstraksi) sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara, termasuk minyak, gas, batu bara, kayu, mineral jarang, perikanan dan pertanian jika keseluruhan diambil pada waktu yang sama.

Peringkat	Negara	Kekayaan SDA
1	Tiongkok	USD 9,6 triliun
2	Amerika Serikat	USD 5,6 triliun
3	Saudi Arabia	USD 5 triliun
4	Russia	USD 4,7 triliun
5	India	USD 3,9 triliun
6	Brazil	USD 3,1 triliun
7	Iran	USD 2,5 triliun
8	Iraq	USD 2 triliun
9	Australia	USD 2 triliun
10	Uni Emirat Arab	USD 1,6 triliun
11	Indonesia	USD 1,5 triliun
12	Kuwait	USD 1,4 triliun
13	Kanada	USD 1,4 triliun
14	Meksiko	USD 0,9 triliun
15	Qatar	USD 0,8 triliun
16	Nigeria	USD 0,8 triliun

Sumber: Bank Dunia, Wealth of Nations Report 2021, Natural Capital (Constant 2018 US\$)

Ranking Negara:

Berdasarkan Besaran Dana Abadi

Negara-negara yang memiliki surplus atau kelebihan anggaran dapat menempatkan lebihnya dalam sebuah dana abadi untuk dikelola dan menjadi cadangan anggaran negara tersebut jika dibutuhkan.

Indonesia baru memiliki lembaga dana abadi di tahun 2021 dengan nama Indonesia Investment Authority (INA).

Peringkat	Negara	Total Dana Abadi	Jumlah Pengelola Dana Abadi
1	Tiongkok	USD 3 triliun	6
2	Norwegia	USD 1,4 triliun	2
3	Uni Emirat Arab: Abu Dhabi	USD 1,3 triliun	4
4	Singapura	USD 1 triliun	2
5	Kuwait	USD 700 milyar	2
6	Saudi Arabia	USD 520 milyar	2
7	Australia	USD 380 milyar	5
8	Qatar	USD 370 milyar	1
9	Uni Emirat Arab: Dubai	USD 350 milyar	3
10	Amerika Serikat	USD 260 milyar	23
11	Korea Selatan	USD 200 milyar	1
12	Russia	USD 190 milyar	2
13	Kazakhstan	USD 140 milyar	4
14	Malaysia	USD 110 milyar	3
15	Perancis	USD 50 milyar	1
16	Oman	USD 30 milyar	1
...	Indonesia	USD 1 milyar	1

Sumber: Global SWF Data Platform, 2021

Ranking Negara: Berdasarkan Besaran Utang

Negara pada umumnya berutang dengan cara mencetak surat utang atau secara bilateral/multilateral untuk dapat segera membiayai melakukan investasi yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan negara. Investasi tersebut bisa dalam bentuk infrastruktur (fisik) atau sumber daya manusia (non-fisik). Selain itu, negara juga dapat berutang untuk membiayai perang.

Peringkat	Negara	Besar Utang	Besar Pendapatan Negara dari Pajak per Tahun
1	Amerika Serikat	USD 28 triliun	USD 5,2 triliun
2	Jepang	USD 12 triliun	USD 1,6 triliun
3	Tiongkok	USD 8 triliun	USD 3 triliun
4	Perancis	USD 3 triliun	USD 1,2 triliun
5	Italia	USD 2,9 triliun	USD 850 milyar
6	Inggris Raya	USD 2,8 triliun	USD 930 milyar
7	Jerman	USD 2,6 triliun	USD 1,5 triliun
8	India	USD 2,3 triliun	USD 580 milyar
9	Kanada	USD 1,9 triliun	USD 580 milyar
10	Spanyol	USD 1,5 triliun	USD 480 milyar
11	Brazil	USD 1,4 triliun	USD 730 milyar
12	Korea Selatan	USD 700 milyar	USD 450 milyar
13	Meksiko	USD 650 milyar	USD 450 milyar
14	Australia	USD 650 milyar	USD 420 milyar
15	Belgia	USD 590 milyar	USD 230 milyar
16	Singapura	USD 530 milyar	USD 50 milyar
17	Belanda	USD 490 milyar	USD 350 milyar
18	Argentina	USD 400 milyar	USD 120 milyar
19	Yunani	USD 390 milyar	USD 80 milyar
20	Indonesia	USD 390 milyar	USD 90 milyar

Sumber: OECD Stat 2021, angka 2020; Kemenkeu masing-masing untuk negara non-OECD

Cita-cita Indonesia Maju dan Makmur 2045

Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mencita-citakan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045.

Menuju Negara Maju dan Makmur

Bagi saya paradox yang dialami negara kita saat ini adalah masalah kepemimpinan, masalah kearifan, masalah kehendak untuk mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat.

Saya sangat optimistis, jika elit Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin melalui proses demokrasi punya jiwa kepemimpinan, kearifan, dan kehendak, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menjadikan Paradoks Indonesia bagian sejarah bangsa kita.

Kita tidak boleh diam dan menerima dicap sebagai bangsa pengalah. Kita harus jadi bangsa pemenang. Kita tidak boleh hanya puas dikenal sebagai bangsa pembeli. Kita harus jadi bangsa pembuat. Bukan takdir bangsa Indonesia jadi bangsa yang lemah, tetapi bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat.

Namun, dalam perjuangan memperkuat ekonomi negara dan rakyat Indonesia, kita harus hati-hati. Kita harus bijak, dan harus arif. Saya, dan saudara semua yang seperjuangan dengan saya, tidak boleh umbar janji ke rakyat dengan rumus-rumus yang terlalu sederhana.

Saya punya sikap dasar. Setiap masalah harus saya kaji dengan lengkap, saya teliti dengan baik, dan saya nilai dari segi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Lalu, saya punya prinsip, saya tidak mau mencari kesalahan orang lain.

Penting saya utarakan sekarang, sebelum saudara mulai membaca apa-apa saja yang menjadi pokok buku ini. Biarkanlah yang lalu, berlalu.

Buku ini utamanya adalah tentang masa depan kita. Masa depan bangsa Indonesia. Buku ini bukan tentang masa lalu. Tugas kita bukanlah untuk menyalahkan mereka yang sudah purnatugas.

Inilah yang saudara akan temukan di buku ini. Biarlah yang sudah lalu menjadi pelajaran untuk kita menentukan gagasan haluan negara kita ke depan. Banyak negara-negara lain yang sekarang menjadi negara maju juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Yang membedakan negara maju dengan negara yang tidak maju adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan, dan belajar dari kesalahan.

Hal ini juga bisa kita lihat dalam sejarah Tiongkok. Mereka pernah punya kebijakan ekonomi yang keliru, kebijakan *Great Leap Forward* atau Lompatan Besar ke Depan oleh Mao Zedong yang justru menghasilkan kelaparan dan menyengsarakan banyak rakyatnya.

Kita bisa belajar dari kisah Deng Xiaoping. Dia merupakan seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1990-an.

Deng Xiaoping merevisi kebijakan-kebijakan ekonomi Mao Zedong dan memimpin kebangkitan Tiongkok. Strateginya membuat Tiongkok menjadi *super power* dunia. Yang saya kagum dari beliau adalah semangat pantang menyerahnya. Terlepas dengan ideologi yang berbeda dari Indonesia, tetapi harus diakui bahwa pribadi Deng Xiaoping harus kita hormati. Dirinya berkali-kali difitnah dan dipenjara, namun tetap bersemangat memajukan negaranya dan tidak menyalahkan pendahulunya.

Indikator Negara Maju dan Makmur

Lantas apa saja indikator kemajuan dan kemakmuran yang harus dicapai untuk kita bisa berhasil jadi negara maju dan makmur?

Presiden Jokowi dan Menteri Bappenas bulan Juni 2023 lalu menjabarkannya dengan detail dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam RPJPN Indonesia Emas ada 5 indikator yang harus kita capai pada tahun, atau sebelum tahun 2045:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emissions (nol emisi GRK)

Saya sepakat sepenuhnya dengan 5 target yang telah disusun ini. Menurut saya inilah sasaran yang harus kita tuju. Seluruh energi, pemikiran, dan sumber daya bangsa Indonesia harus kita arahkan untuk mencapai 5 target ini.

Syarat Mencapai Maju dan Makmur

Saudara, kalau saudara hanya bisa mengambil satu hal dari buku ini, berikut adalah hal tersebut.

Kita sebagai bangsa harus segera capai pertumbuhan ekonomi agresif, atau pertumbuhan di atas angka 6-7% bahkan setelahnya pertumbuhan 10% secara berkelanjutan.

Kenapa? Karena hanya dengan pertumbuhan dua digit selama 10 tahun berturut-turut, yang diawali dengan pertumbuhan rata-rata 6-7% selama 5 tahun, Indonesia bisa keluar dari suatu kondisi yang dinamakan *middle income trap*.

Middle income trap, atau perangkap negara menengah adalah kondisi dimana suatu negara menengah akan terus menjadi negara menengah. Ini dilihat dari angka produk domestik bruto dibagi dengan jumlah populasi, atau PDB per kapita. Di tahun 2020, angka PDB per kapita kita adalah USD 3.869².

PDB per kapita di angka USD 3.869 artinya pendapatan per bulan hanya USD 322, sekitar Rp. 4,5 juta.

Untuk 'naik kelas' jadi negara berpenghasilan atas, PDB per kapita kita harus mencapai angka USD 13.000. Artinya, pendapatan per bulan rata-rata rakyat Indonesia harus naik ke USD 1.083 per bulan, sekitar Rp. 14 juta.

² Bank Dunia, 2021 (Data 2020)

Jika pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 4% atau 5%, sulit bagi kita untuk berhasil naik kelas. Ibarat badan, jika pertumbuhan kita tidak di atas angka 10% artinya kita tidak berhasil tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara-negara maju.

Ini adalah persoalan pokok yang harus kita sadari sebagai bangsa. Kita tidak boleh puas dengan pertumbuhan ekonomi 5% karena sama saja kita berjalan di tempat. Tidak bisa kita berbangga jika negara kita tidak keluar dari perangkap negara menengah, dari *middle income trap*.

Negara lain yang sudah maju boleh saja tumbuh di bawah 5%. Indonesia tidak bisa. Kita masih punya pekerjaan besar: Kita harus segera lepas landas mengejar kemajuan. Kita tidak boleh berpuas diri berjalan di tempat.

Sebagai perbandingan PDB per kapita Malaysia sudah USD 10.401 – rakyat Malaysia rata-rata punya pendapatan USD 866 per bulan, sekitar Rp. 12 juta per bulan.

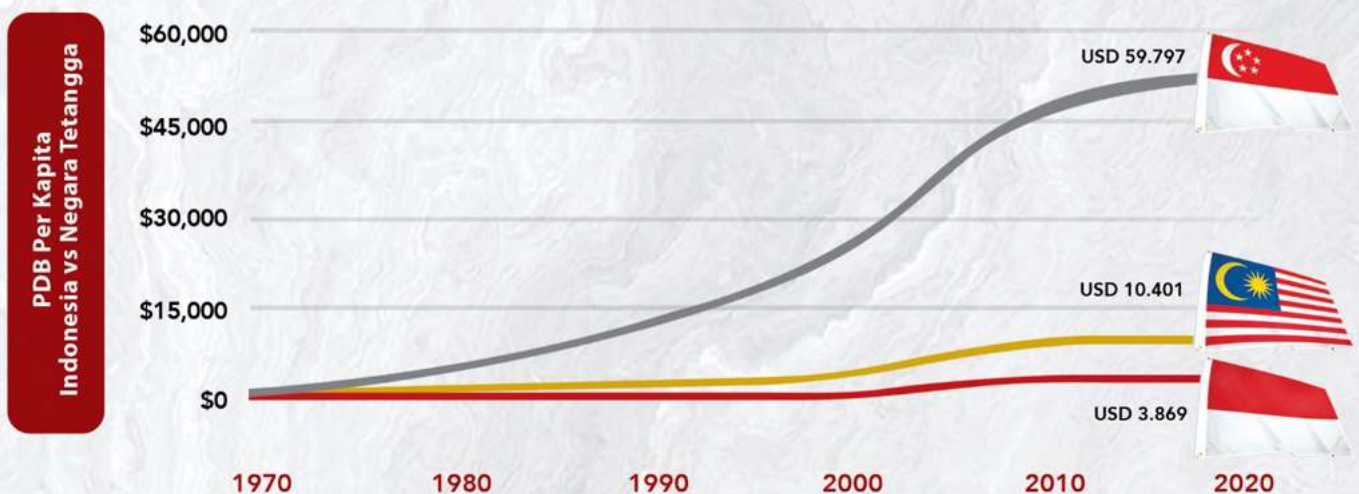
PDB per kapita Singapura sudah USD 59.797 – rakyat Singapura rata-rata punya pendapatan USD 4.983 per bulan, sekitar Rp. 69 juta per bulan.

Harus Tumbuh 2X Lipat

Untuk Jadi Negara Berpenghasilan Atas

PDB per Kapita Kita 37% Malaysia

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita kita saat ini ada di angka USD 3.869. Malaysia ada di angka USD 10.401, dan Singapura ada di angka USD 59.797. Artinya aktivitas ekonomi setiap warga Malaysia rata-rata 2,6x di atas kita, dan orang Singapura 15,4x di atas kita.



**kita harus segera tumbuh rata-rata 7%
dalam 5 tahun 'pertama'**

PDB per Kapita Kita Harus Mencapai \$13.000 Per Tahun

Untuk naik kelas jadi “negara berpendapatan atas”, PDB per kapita kita harus lebih tinggi dari \$13.000.

Untuk mencapai ini, ekonomi kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun, dan setelahnya tumbuh dua digit (minimal 10%) per tahun selama 10 tahun.*

* Hitungan Badan Kajian Kebijakan Strategis Partai Gerindra, 2017



**setelahnya minimal ekonomi kita
harus tumbuh 10%**

Indonesia Emas 2045

Bappenas mendefinisikan kemajuan dan kemakmuran di tahun 2045 dari tercapainya indikator berikut:

01

Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
GNI Per Capita (USD)	5.500	7.400-7.670	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	9,1	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	21,9	28,0

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

02

Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	4,5 - 5,0	0,5 - 0,8
Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,372 - 0,372	0,377 - 0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	23,3	28,5

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)



03

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	29	15 Besar

Sumber: Pareto Economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

04

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Indeks Modal Manusia (indeks)	0.54 (2022)	0,61	0,73

Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

05

Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,37	93,5

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)



Tantangan Strategis Bangsa





J. E. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Tantangan Strategis Global

Menurut prediksi banyak ahli termasuk prediksi dari Bappenas, Indonesia hanya punya waktu 13 tahun sejak 2023 untuk keluar dari jebakan perangkap negara menengah atau *middle income trap*.

Dalam 13 tahun ke depan, ekonomi Indonesia harus tumbuh dengan cepat di atas 6% - sebuah tantangan yang sangat berat karena jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 2%. Selain itu kita tidak tinggal sendirian di dunia ini, dan dunia tidak sedang baik-baik saja.

Di bulan Oktober 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan "Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang, perubahan iklim, krisis pangan."

Perubahan Iklim

September 2023 adalah September terpanas dalam catatan sejarah bumi. Peningkatan suhu bumi ini terjadi akibat meningkatnya aktivitas manusia sejak era industrialisasi di tahun 1760an dengan membakar energi fosil dan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca (GRK) lainnya di udara.

Di tahun 2015, 195 negara termasuk Indonesia menandatangani kesepakatan Paris atau *Paris Agreement* untuk menahan laju peningkatan suhu bumi ke maksimal 2 derajat di atas rata-rata suhu sebelum era industrialisasi. Hal ini bisa dicapai dengan mengubah sumber energi dunia dari energi fosil ke sumber energi baru dan energi terbarukan.

Oleh karena itu, di era Presiden Joko Widodo, kita mencanangkan penghentian pembangunan PLTU baru, mencoba melakukan pensiun dini untuk PLTU lama, memberikan insentif untuk mobil dan motor listrik, serta membangun pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti dari surya (PLTS), panas bumi dan air (PLTA).

Indonesia-pun di tahun 2023 juga telah meluncurkan bursa karbon untuk memfasilitasi dan mengakselerasi insentif ekonomi pencegahan deforestasi dan proyek reforestasi.

Namun upaya dunia untuk mencapai nol emisi GRK belum optimal. Tahun ini, rata-rata suhu bumi sudah mencapai 1,5 derajat di atas rata-rata suhu sebelum era industrialisasi.

Dampak dari peningkatan suhu ini telah dirasakan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dirasakan oleh kita di Indonesia.

Perubahan iklim telah menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, meningkatkan harga pangan, serta mengancam keselamatan jiwa.

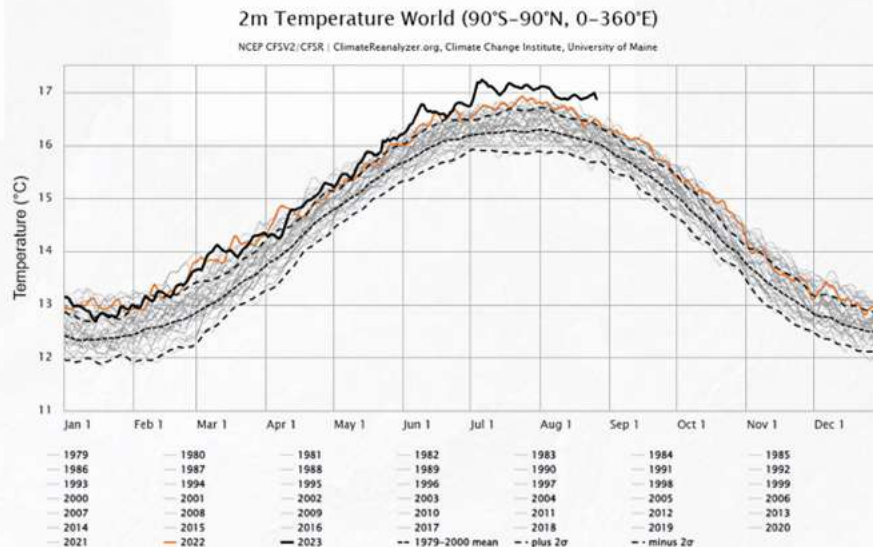
Peningkatan suhu yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut juga mengancam kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di pulau-pulau kecil dan pesisir. Bahkan Sebagian dari kota Jakarta-pun diprediksi akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan jika kita tidak berbuat apa-apa.

Artinya dalam waktu dekat kita harus memiliki kemampuan ekstra untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Misalkan, petani kita harus punya akses ke benih-benih baru yang lebih tahan kering. Rumah nelayan-nelayan kita di pesisir harus lebih kuat menghadapi rob yang semakin tinggi.

Ini bukan tantangan yang mudah karena akan membutuhkan uang yang sangat banyak, dan membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Tantangan Perubahan Iklim

Suhu permukaan laut



Suhu permukaan laut dan darat mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2023.
Rekor tertinggi sebelumnya tercatat pada 2016, ketika El Nino ekstrim terjadi

Apa yang akan terjadi jika suhu dunia naik melebihi batas 1,5°C

~210 juta orang
terkena kekeringan parah

~290 juta rumah
terkena banjir pesisir, merusak
aset >USD 14 Tn

~14%
dari populasi dunia terkena
gelombang panas yang parah
setiap lima tahun sekali

Pengurangan nilai gizi tanaman,
menciptakan risiko kesehatan
potensial untuk
600 juta orang

Konflik Bersenjata di Ukraina dan di Palestina

Di tahun 2020, saat dunia kesulitan menghadapi pandemi COVID 19, tidak ada yang menyangka bisa ada perang baru yang dimulai saat pandemi.

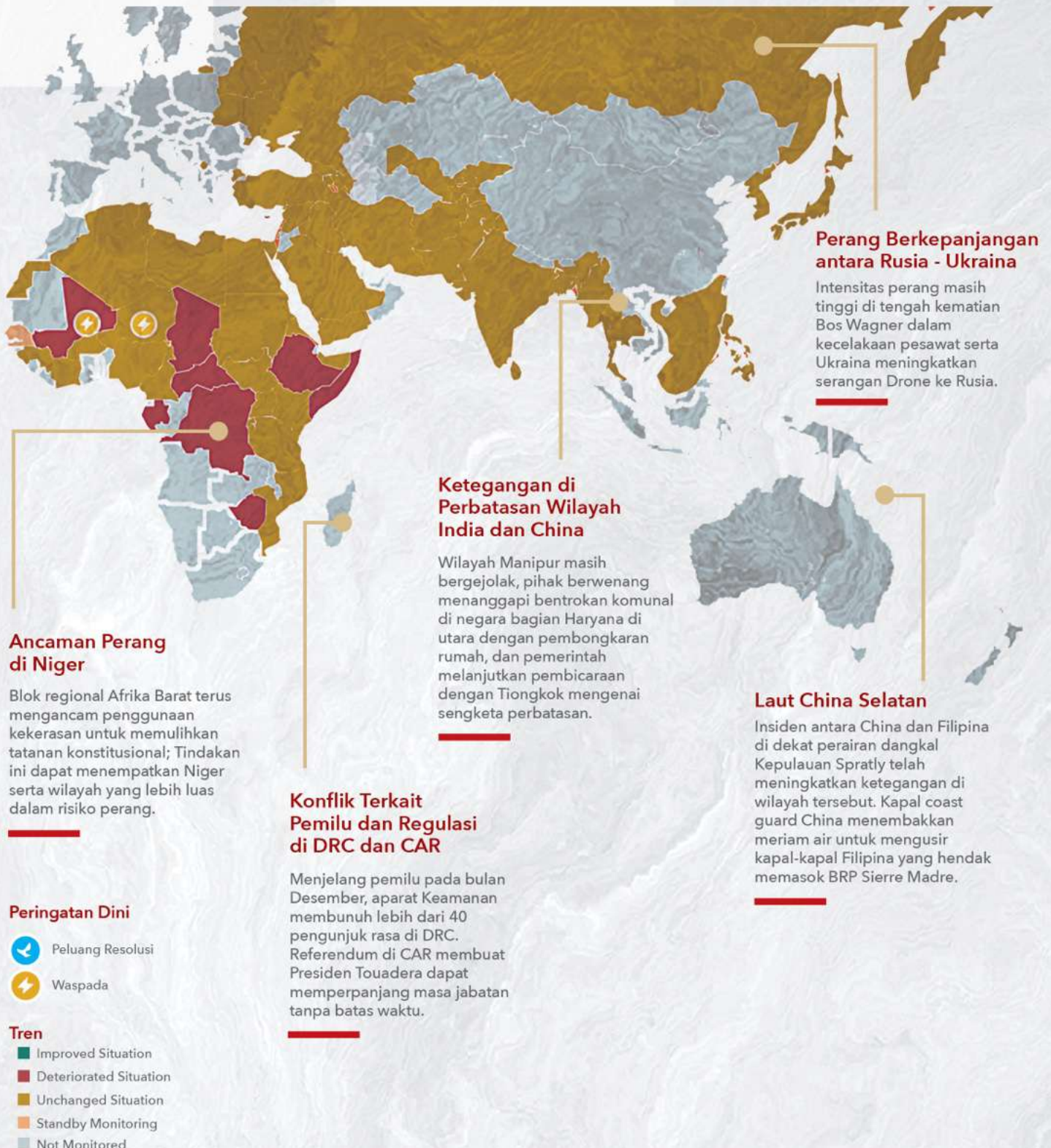
Ternyata sebelum pandemi berakhir, tepatnya 24 Februari 2022, terjadilah konflik bersenjata terbesar di wilayah Eropa antara Russia dan Ukraina. Karena konflik ini kestabilan harga pangan dan energi dunia terganggu karena keduanya adalah penghasil pangan yang sangat signifikan.

27% produksi gandum dunia dihasilkan oleh Russia dan Ukraina. Indonesia yang masih mengimpor 11 juta ton gandum setiap tahun untuk mi instan, roti dan keperluan lain pun juga banyak mengimpor gandum dari Russia dan Ukraina. Karena perang mengganggu produksi dan keselamatan pelayaran, Indonesia dan negara-negara pengimpor gandum lainnya harus mencari gandum dari negara lain.

Selain gandum, Russia juga adalah eksportir utama bahan baku pupuk. Russia memproduksi 19% Kalium, 14% Phosphat dan 16% Nitrogen dunia. Akibat perang Russia dan Ukraina harga pupuk dunia ikut naik.

Belum lagi energi. Russia adalah eksportir minyak dan gas terbesar ketiga di dunia. Konflik berkepanjangan di Ukraina, yang sekarang ditambah konflik bersenjata di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan harga energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global.

Tantangan Ketidakstabilan Geopolitik



Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara

45% dari seluruh perdagangan dunia melewati laut Indonesia. Bahkan, sebagian alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) seperti Selat Malaka dinilai sebagai salah satu alur laut paling strategis di dunia.

Jika ada konflik bersenjata yang terjadi di ALKI maka akan sangat berdampak tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh negara-negara dunia. Jika meletus, konflik ini bisa mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan dunia terutama Asia Timur.

Karena itu, saya sangat memperhatikan perkembangan tensi geopolitik yang terjadi antara dua negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok atas Taiwan. Beberapa ahli militer Amerika percaya bahwa konflik bersenjata untuk mempertahankan status quo Taiwan adalah “hal yang tidak terelakkan” dan “dapat terjadi dalam waktu dekat.”

Dalam semua skenario konflik Taiwan yang disimulasikan oleh ahli-ahli geostrategi dan perang, penguasaan atas ALKI menjadi sangat penting terutama jika perang berlangsung dengan durasi panjang sehingga membutuhkan pengapalan logistik dari Timur Tengah.

Indonesia sebagai penguasa ALKI juga dalam posisi yang sulit karena apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan bisa dinilai menguntungkan bagi salah satu pihak dalam konflik ini.

Ancaman Pandemi Baru

Selain menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrim, perubahan iklim juga mencairkan lapisan es bumi yang telah beku selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun.

Karena itu, banyak ahli menyampaikan meningkatnya suhu bumi juga akan membuka kemungkinan aktifnya kembali virus-virus dari masa lalu, yang dapat menyebabkan merebaknya pandemi baru untuk manusia, hewan, atau tumbuhan.

Sebagai bangsa yang baru saja pulih dari pandemi COVID 19, masih segar di ingatan kita bagaimana sulitnya masa-masa pandemi. Indonesia perlu melakukan investasi besar-besaran di infrastruktur kesehatan untuk siap menghadapi pandemi berikutnya.

Perlambatan Ekonomi Global

Di awal buku ini saya sampaikan, untuk keluar dari perangkap negara menengah kita perlu tumbuh di atas 6% setiap tahun. Target pertumbuhan ini tentu akan mudah jika negara-negara lain juga tumbuh seperti kita.

Namun yang saat ini terjadi adalah pelemahan ekonomi dan kemungkinan resesi negara-negara maju. Ini menyulitkan kita karena menekan laju permintaan produk ekspor Indonesia dan meningkatkan suku bunga acuan, sehingga memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Meningkatnya Populasi

Dengan hampir 280 juta penduduk, Indonesia saat ini adalah negara nomor 4 dengan penduduk terbanyak di dunia.

Namun dengan pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun, dalam waktu dekat posisi Indonesia akan tergantikan oleh Nigeria yang jumlah penduduknya akan lebih banyak dari kita.

Diperkirakan di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 324 juta jiwa. Ini artinya dalam 20 tahun akan ada tambahan 44 juta jiwa - hampir sama dengan ketambahan satu provinsi Jawa Barat baru.

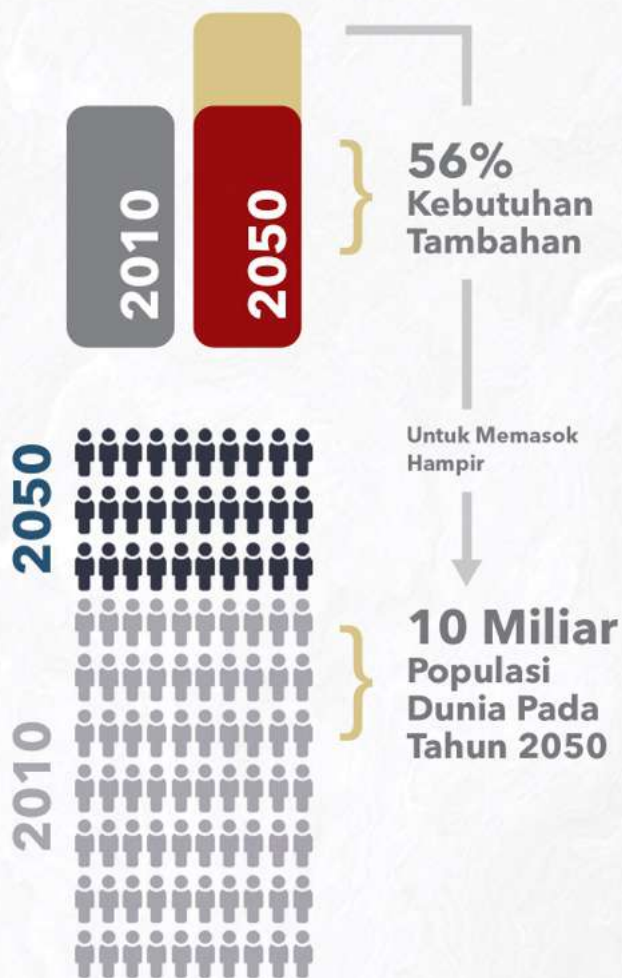
Dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia dan Indonesia, dibutuhkan tambahan 56% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar populasi dunia di 2050. Untuk memenuhi tambahan kebutuhan ini, dibutuhkan luas lahan pertanian tambahan setara 2x dari luas negara India. Pemenuhan pangan untuk semua akan sangat menantang.

Dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim, negara-negara akan semakin memprioritaskan produksi pangan untuk kebutuhan sendiri. Artinya kebutuhan Indonesia untuk swasembada pangan semakin urgen.

Tidak hanya itu, kita juga harus menyediakan lapangan kerja, sekolah, rumah sakit, sanitasi, rumah, dan segala infrastruktur pendukung lainnya agar seluruh penduduk Indonesia dapat hidup dengan layak. Ini bukan hal yang mudah.

Tantangan Meningkatnya Populasi

**10 Miliar Penduduk
Membutuhkan Pasokan
Pangan**



Kebutuhan Lahan Pertanian Global Setara Dengan 2x Luas India

Produktivitas Perlu ditingkatkan Karena Kebutuhan Lahan yang Sangat Besar



Kita telah menggunakan
Hampir 50%
Vegetasi Lahan untuk Pertanian



Terdapat Kebutuhan Lahan Hampir Sebanyak
2x Luas India

Disrupsi Kecerdasan Buatan (AI)

Saya masih ingat ketika saya sekolah dulu belum ada komputer. Semua serba manual. Apa-apa harus dikerjakan sendiri, dan mencari informasi hanya bisa dilakukan di perpustakaan dengan buku-buku.

Sekarang semuanya dapat dimudahkan oleh komputer, Internet dan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Kemajuan teknologi ini memang sangat membantu keseharian kita, namun juga bisa sangat menantang jika kita tidak bisa mempersiapkan SDM Indonesia untuk memanfaatkan dan hidup berdampingan dengan AI.

Cepatnya kemajuan kecerdasan buatan telah mengubah kebutuhan talenta di hampir semua industri dan memaksa peningkatan kemampuan tenaga kerja secara cepat.

Jika kita tidak mampu beradaptasi, maka potensi peningkatan pengangguran karena AI cukup besar. Kita tentu tidak ingin ini terjadi di Indonesia.

Tantangan Kecerdasan Buatan



Artificial Intelligence (AI)

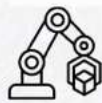


AI Generatif



Memiliki kemampuan untuk membuat konten baru yang dapat disampaikan dalam berbagai modalitas, termasuk teks (seperti artikel atau jawaban atas pertanyaan), gambar yang terlihat seperti foto atau lukisan, video, dan representasi 3-D (seperti pemandangan dan lanskap untuk video game).

RISIKO



14% pekerjaan di OECD sangat dapat diotomatisasi dan 32% lainnya dapat menghadapi perubahan besar



Masih membutuhkan penilaian dan keputusan akhir dari manusia



Potensi pembocoran data dan akses tidak sah ke informasi pribadi



Secara tidak sengaja menyandikan bias dalam model berpotensi merugikan kelas tertentu



Dikembangkan jenis serangan siber baru yang kompleks serta bahaya yang menghindari langkah-langkah perlindungan konvensional



Negara-negara memiliki berbagai standar dan undang-undang terkait privasi, keadilan, dan risiko lain yang dibawa oleh AI

Sumber: Analisa Kemenkomarves, 2023



Tantangan Strategis Nasional

Selain tantangan-tantangan strategis global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik dan semakin merebaknya kecerdasan buatan, ada beberapa tantangan besar spesifik yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Diantaranya, kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa bonus demografi yang kita miliki akan segera berakhir. Kekayaan Indonesia juga masih terus mengalir ke luar negeri atau terjadi *net outflow of national wealth*. Ekonomi kita belum adil dan belum sepenuhnya merata. Demokrasi kita juga tidak sedang baik-baik saja karena kuasa uang di demokrasi masih terlalu besar.

Apakah kita bisa jadi negara maju dan sejahtera tergantung dari kemampuan kita menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan strategis global dan tantangan-tantangan strategis nasional.

Terbatasnya Waktu Bonus Demografi

Jumlah penduduk kita adalah kekuatan kita. Apalagi usia median dari penduduk Indonesia saat ini adalah 29 tahun. Artinya mayoritas penduduk Indonesia ada di usia produktif - usia yang bisa belajar dan bekerja dengan baik.

Namun tidak selamanya usia median penduduk Indonesia usia muda dan produktif. Dengan perlambatan penambahan penduduk, jumlah penduduk muda Indonesia akan terus berkurang. Menurut Bappenas, dalam 13 tahun dari sekarang, kira-kira di tahun 2035, usia median penduduk Indonesia tidak lagi muda.

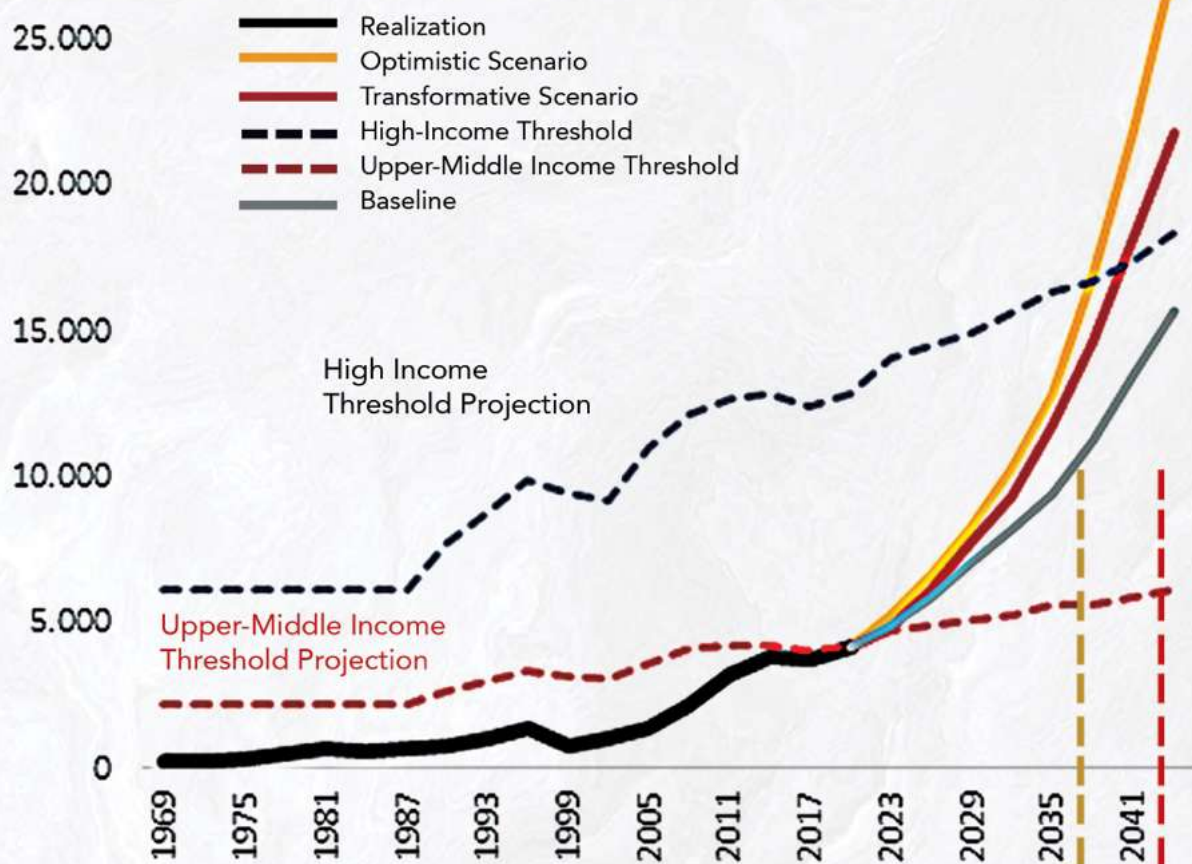
Sejarah ekonomi bangsa-bangsa mengatakan sangat sulit bagi suatu negara untuk jadi negara kaya dan makmur jika usia median populasinya sudah tua dan tidak produktif. Saat ini kita masuk dalam kategori negara dengan pendapatan menengah. Kita ingin jadi negara dengan pendapatan tinggi.

Dengan angka tahun ini, untuk jadi negara dengan kesejahteraan tinggi PDB per kapita kita harus naik ke \$ 14.000 atau sekitar Rp. 210 juta per tahun. Pendapatan per bulan penduduk kita harus naik ke Rp. 17,5 juta per bulan.

Kita hanya punya 13 tahun untuk keluar dari perangkap negara menengah (*middle income trap*) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya. Ini yang telah dialami oleh Thailand. Tahun ini Thailand resmi jadi tua sebelum kaya. Kita tidak boleh jadi tua sebelum kaya. Kita harus tumbuh dengan cepat agar bisa jadi kaya sebelum tua.

Tantangan Terbatasnya Waktu Bonus Demografi Untuk Keluar dari Middle Income Trap

Proyeksi GNI Per Capita Indonesia (USD)



Skenario

Transformatif
Sangat Optimis

Rata-Rata Pertumbuhan

6%
7%

Tahun Keluar Middle Income Trap jadi Negara Maju

2041
2038

Net Outflow of National Wealth

Penyakit paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir keluarnya kekayaan nasional dari wilayah Indonesia. Terlalu besar hasil dari ekonomi Indonesia yang disimpan dan dimanfaatkan di luar negeri.

Uang bagi suatu negara, kekayaan bagi suatu bangsa, adalah sama dengan darah. Saat ini tubuh bangsa Indonesia berdarah, dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Jika kita hitung sejak zaman penjajahan, maka sudah ratusan tahun ekonomi kita berdarah.

Saudara yang mengikuti pemikiran saya sejak lama tentu mengetahui bahwa sudah bertahun-tahun saya sampaikan, kekayaan Indonesia tiap tahun mengalir ke luar Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia.

Ini artinya, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, saat ini sedang kerja rodi. Kita sedang kerja bakti untuk orang lain. Kita bekerja keras, di Indonesia, untuk memperkaya bangsa lain. Kita seperti indekos di rumah sendiri.

Dulu saat VOC menguasai ekonomi Indonesia, mengalirnya kekayaan kita ke luar begitu nyata terlihat dan oleh karenanya dipersoalkan oleh Generasi '45 yang mendahului kita. VOC menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi dalam sejarah ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia pada waktu itu luar biasa tinggi, PDB wilayah Indonesia mungkin salah satu tertinggi di dunia, tapi keseluruhan hasilnya disimpan di bank-bank Belanda.

Kondisi yang sekarang memang lebih sulit terlihat, padahal hampir serupa. Karena itu banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Bagi sedikit yang mengetahui, mereka diam atau menyerah pada keadaan. Sebagian lagi menjadi agen penyalur kekayaan kita yang mengalir ke luar.

Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat bagaimana kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

Yang pertama, adalah neraca perdagangan negara kita, terutama kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor.

Yang kedua, adalah data simpanan di bank-bank luar negeri yang merupakan milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mengambil untung di Indonesia dan menempatkan keuntungannya di luar negeri.

Saya mulai menyimak tabel neraca ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997. Pada saat itu saya sedang berada di Yordania, dan saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya situasi ekonomi kita. Ternyata, sekarang, kalau kita lihat neraca ekspor-impor Indonesia³ dari tahun 1997 ke tahun 2014, selama 17 tahun, total nilai ekspor kita mencapai angka USD 1,9 triliun dan mengalami *surplus* atau keuntungan perdagangan. Kurang lebih Rp. 26.600 triliun jika menggunakan kurs Rp. 14.000. Ini jumlah yang cukup besar.

Namun perlu kita ingat, ini adalah angka yang tercatat dalam dokumen ekspor. Belum tentu sama nilai ekspor yang

³ Badan Pusat Statistik, 2017

sebenarnya. Berdasarkan pengalaman banyak pelaku ekspor yang berdiskusi dengan saya, dan hasil penelitian lembaga riset kredibel⁴, angka ini bisa keliru 20%, bisa 30%, bahkan bisa 40%.

Lembaga riset Global Financial Integrity menaksir kebocoran ekspor akibat trade *misinvoicing*, atau “kesalahan” dalam pembukuan nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar di 2016, setara Rp. 540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan.

Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “kesalahan” ini mencapai USD 167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD 1 = Rp. 14.000, sama dengan Rp. 2.300 triliun.

Selain itu, setelah saya selidiki, banyak uang hasil keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Karena itu, saya tidak begitu kaget ketika Menteri Keuangan pada Agustus 2016 mengatakan bahwa ada Rp. 11.400 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang parkir di luar negeri⁵. Jumlah Rp. 11.400 triliun ini 5x lebih besar dari APBN kita saat ini, dan kurang lebih sama dengan pendapatan domestik bruto (PDB) kita.

Selain adanya ekspor yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan oleh pengusaha kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia masuk ke perusahaan-perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Ini terjadi karena sebagian

⁴ Global Financial Integrity, 2015

⁵ Kementerian Keuangan, 2016

besar dari nilai ekspor kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki perusahaan di Indonesia⁶.

Perusahaan-perusahaan ini menjual hasil alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan keringat orang Indonesia. Tetapi ketika mereka mendapatkan untung, mereka tidak menyimpan keuntungan mereka di Indonesia. Selain itu, ada juga pengusaha-pengusaha Indonesia yang melakukan usaha ekspor, dan melakukan usaha di Indonesia, yang setelah untung, malah ikutan menyimpan dan memindahkan sebagian keuntungan mereka ke luar negeri.

Ini masalah besar untuk bangsa kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, maka uang ini tidak dapat digunakan untuk membangun Indonesia. Bank-bank di Indonesia tidak punya cukup uang untuk memberikan kredit yang bisa membangkitkan ekonomi kita. Tidak terjadi *multiplier effect* yang bisa membangkitkan gairah ekonomi Indonesia.

Apakah ini masalah yang baru? Jika kita lihat mundur ke belakang, ternyata mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri telah terjadi selama ratusan tahun. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita ketahui dan hadapi.

Kalau kita mundur ke belakang, tahun 1950, kecuali di tengah pergolakan-pergolakan, ekspor-impor Indonesia tetap untung. Tapi untungnya untuk siapa?

Kalau kita buka pidato Bung Karno, "Indonesia Menggugat", dan kita pelajari, beliau bicara persis sama. Hanya kalau saya pakai angka dolar AS dan Rupiah, beliau pakai angka Gulden.

⁶ Indonesia for Global Justice, 2013

Intinya adalah mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri.
Beliau menulis:

Bahwasanya, Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga, suatu surga yang di seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingan kenikmatannya.

Kira-kira tahun 1870, dibukalah pintu gerbang itu! Sebagai angin yang makin lama makin keras bertiup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruh tentara menang yang masuk ke dalam kota yang kalah, maka sesudah Undang-undang Agraris dan Undang-undang Tanaman Tebu de Waal di dalam tahun 1870 diterima baik oleh *Staten-Generaal* di negeri Belanda, masuklah, modal partikelir itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula di mana-mana, kebun-kebun teh, *onderneming-onderneming* tembakau dan sebagainya ditambah lagi modal partikelir yang membuka macam-macam perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta-api, trem, kapal, atau pabrik-pabrik yang lain.

Bagi rakyat Indonesia perubahan sejak tahun 1870 itu hanya perubahan cara pengedukan rezeki; bagi rakyat Indonesia, imperialisme-tua dan imperialisme-modern kedua-duanya tinggal imperialisme belaka, kedua-duanya tinggal pengangkutan rezeki Indonesia keluar, kedua-duanya tinggal *drainage*!

Kemarin saya baca sebuah penelitian yang membuka catatan resmi Pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor Indonesia, tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia. Penelitian ini menemukan keuntungan Belanda selama 63

tahun adalah 54 miliar Gulden. Jumlah ini, pada waktu itu sama dengan USD 22 miliar. USD 22 miliar waktu itu, jika disetarakan dengan uang sekarang, kira-kirasama dengan USD 398 miliar, atau sampai USD 5.123 miliar. USD 5.123 miliar itu artinya Rp. 66.599 triliun⁷.

Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri atau capital outflow inilah yang dipermasalahkan oleh Bung Karno. Saya, Prabowo Subianto, yang bukan sarjana ekonomi, menyebut fenomena ini "*net outflow of national wealth*". Mengalir ke luarnya kekayaan nasional dalam jumlah yang keterlaluan.

Saya pernah ditanya, bagaimana dengan mata uang Republik Indonesia yang lemah? Bagaimana harga-harga bahan pokok yang tidak menentu? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, tapi mungkin banyak elite Indonesia dan banyak pakar ekonomi Indonesia tidak mau sampaikan kepada rakyat.

Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Inilah masalah utama kita.

Kita mengizinkan kekayaan kita mengalir ke luar negara kita. Kalau begini, bagaimana bisa ekonomi kita kuat? Bagaimana bisa harga-harga cukup memadai untuk rakyat kita, kalau kekayaan kita mengalir ke luar?

Maaf kalau Prabowo Subianto bicara agak seperti ini. Ada yang bilang pada Prabowo, "Pak Prabowo, mbok bicara yang baik-baik saja." Ada yang mengatakan, "Pak Prabowo, jangan bicara terlalu keras. Bicara yang halus-halus saja."

⁷ Chulalongkorn University, 2012

Selama 15 tahun terakhir, setiap saya ada kesempatan untuk memaparkan data-data, saya tanyakan kepada mereka yang menyimak. “Kalian mau saya bicara baik-baik, atau saya bicara apa adanya? Kalian mau saya bicara halus, baik-baik, tapi kenyataannya tidak baik, atau saya bicara apa adanya, saudara-saudara sekalian?”

Mereka menjawab, “bicara apa adanya saja, pak Prabowo”.

Menurut saya, sudah terlalu lama elite Indonesia tidak menyampaikan apa yang terjadi. Tidak terbuka kepada rakyat, tidak terbuka kepada bangsa.

Kenapa orang kecil semakin terjepit? Kenapa di Indonesia, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Kenapa petani tidak senyum kalau panen? Bagaimana bisa di negara yang sudah lebih dari 75 tahun merdeka, masih ada guru honorer yang hanya terima Rp. 200.000 sebulan⁸? Walaupun sekarang sudah ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan sebagian Pemerintah Daerah, kesejahteraan guru masih jauh dari layak.

Bagaimana bisa?

Bagaimana bisa, sebagian besar hasil keuntungan kita sebagai bangsa mengalir ke luar negeri, tetapi elit diam saja? Belasan ribu triliun Rupiah uang yang seharusnya ada di Indonesia, parkir di luar negeri, dan elit Indonesia tidak berjuang keras untuk mengembalikannya ke dalam negeri?

⁸ Kementerian Pendidikan, 2020

Pahit memang, apa yang saya katakan. Tetapi kalau setiap tahun terus ada *net outflow* kekayaan nasional kita ke luar, saya kira kita sebagai negara tidak perlu punya rencana pembangunan jangka panjang. Kita tidak perlu rencana pembangunan karena rakyat kita tidak akan menikmati.

Uang ini adalah sangat-sangat vital bagi pembangunan masa depan bangsa kita. Bangsa kita tidak bisa lagi kehilangan kekayaan yang seharusnya bisa berputar di dalam negeri tiap tahun.

Jika kita biarkan kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri, artinya kita menerima bahwa kita sebagai bangsa dipelihara sebagai pasar dan sebagai buruh oleh sistem kapitalisme global.

Bumi kita dipakai, air kita dipakai, rakyat kita dipakai sebagai buruh demi memperkaya bangsa lain. Kita diatur menjadi pasar, menjadi konsumen dari produk dan jasa yang dibuat oleh bangsa lain.

Kita penuh retorika. Rakyat kita, pemimpin kita bernyanyi “Indonesia Raya”, “Maju Tak Gentar”, tapi kesejahteraan kita jalan di tempat. Kita terus miskin. Kita terjerumus dalam *middle income trap*, perangkap negara menengah.

Kita hidup di tengah kekayaan sumber alam, tetapi kita miskin. Negara dengan tiga perempat laut tetapi mengimpor ikan, mengimpor garam, mengimpor singkong, dan mengimpor daging.

Yang saya heran, kenapa kalau kita bicara “mengimpor daging, mengimpor singkong”, banyak orang yang tertawa? Saya tidak mengerti. Seharusnya kita menangis.

Tapi, kata orang, ambang penderitaan bangsa Indonesia tinggi sekali. Jadi, kalau kaki kita diinjak, orang Indonesia tidak teriak-teriak karena sifat bangsa Indonesia memang baik, nrimo. “Monggo, silakan injak kaki saya. Silakan perdaya saya dan ambil kekayaan saya.”

Karena inilah, menurut saya negara kita saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat-sangat penting.

Darah kita sudah diambil puluhan tahun. Tubuh bangsa Indonesia ini sudah selayaknya masuk IGD.

‘Bocornya’ uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, dari: kebocoran tabungan nasional dari keuntungan perdagangan kita, kebocoran pendapatan pajak nasional dari *tax ratio* kita yang begitu rendah, dan kebocoran dari korupsi penerimaan dan belanja anggaran belanja nasional yang jika dijumlah bisa mencapai angka Rp. 2.800 triliun setiap tahun menurut kajian Litbang KPK, dan banyak hitungan kredibel lainnya, harus segera kita hentikan.

Saat ini, kita juga kehilangan uang ke luar negeri dari membeli barang-barang produksi luar negeri, yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri oleh putera puteri Indonesia. Bahkan, ada yang mengatakan kita sudah kecanduan barang impor.

Hal ini bisa kita lihat dari apa yang kita gunakan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi.

Dari mana kah bahan baku mi instan yang kita konsumsi? Hampir 100% bahan baku mi instan kita dari gandum yang diproduksi negara-negara barat, yang kita impor dengan jumlah 10 juta ton setiap tahun.

Dari mana kah nasi yang kita santap? Mobil yang kita kendarai? Handphone yang kita bawa? Baja yang digunakan untuk membangun rumah kita?

Produksi asing atau Indonesia? Jika produksinya di Indonesia, perusahaannya milik asing atau milik nasional?

Coba renungkan.

Sebagai contoh, pada tahun 2019 lalu, kita sebagai bangsa membeli kurang lebih 6,4 juta motor⁹. Kemudian, pada tahun yang sama kita membeli kurang lebih 1 juta mobil¹⁰. Dari semua mobil yang dibeli oleh bangsa Indonesia, tidak ada satupun milik perusahaan nasional Indonesia. Ini artinya, kita “mengirim” uang ke negara lain setiap kali kita membeli mobil atau motor.

⁹ Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), 2020

¹⁰ Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 2020

Benar, sebagian dari merek mobil dan motor yang kita beli di Indonesia memiliki pabrik di Indonesia. Benar, ongkos produksinya mungkin masih dinikmati oleh orang Indonesia yang menjadi buruh pabrik, tetapi keuntungannya tidak tinggal di Indonesia. Setelah membayar buruh pabrik kita, sales dan teknisi di ribuan toko yang juga orang kita, listrik kita, dan membayar pajak, sebagian besar keuntungan bersih penjualannya tetap mengalir ke luar negeri.

Situasi ini tercermin dari neraca pendapatan primer kita. Neraca pendapatan primer merekam besarnya aliran uang ke luar negeri hasil investasi asing, berupa pendapatan ekuitas, pendapatan bunga, dan pendapatan investasi lain.

Saat ini neraca pendapatan primer kita defisit, dan sudah defisit lebih dari 10 tahun. Defisitnya cukup besar – pada tahun 2019 lalu mencapai USD 73 miliar atau sekitar Rp. 1.022 triliun¹¹. Rata-rata 2012-2019 berkisar antara defisit USD 11 miliar hingga USD 142 miliar.

Pada tahun 2020, neraca pendapatan primer kita mendapat tekanan begitu berat karena pandemi COVID 19. Melonjak tajam ke angka minus USD 640 miliar dolar – setara dengan minus Rp. 9.300 triliun.

Malaysia, yang jumlah penduduknya sepersepuluh jumlah penduduk Indonesia, belasan tahun lalu sudah berani membikin mobil nasional. Sekarang kita sudah buka pasar kita. Kita telah menjadi bagian dari ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita harus buka pelabuhan kita untuk kapal-kapal yang membawa produksi

¹¹ Bank Indonesia, 2020

negara tetangga kita. Barang mereka telah dan akan terus masuk.

Saya bukan mengatakan kita harus pada investasi anti asing, tidak.

Tapi kalau semua produksi di Indonesia bergantung pada investasi asing, kita akan celaka. Rupiah kita akan terus lemah. Seorang ekonom Indonesia baru-baru ini menemukan, setiap USD 1 miliar investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun (2010 – 2014) mengakibatkan USD 12 miliar dalam keuntungan mengalir ke luar negeri¹².

Saya sering mendengar dan menyaksikan, kita selalu di-*brainwash*, dicuci otak. "Oh, produksi sendiri dengan merek sendiri tidak efisien."

Tapi kok, Korea Selatan yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita, bisa efisien, sedangkan kita tidak bisa efisien? Berarti apa? Saya menyimpulkan, berarti kita didik oleh banyak pemimpin kita untuk menyerah sebelum berjuang.

Kita diprogram, otak kita di-*brainwash*, bahwa kita ini memang kalah dari bangsa lain. Kita semuanya, termasuk anak-anak kita, walaupun kita sering tidak mengakui, kita di bawah sadar merasa rendah diri. *Minderwaardigheids kompleks*. Begitu lihat orang asing, kita hormat dan kagum. Begitu berhadapan dengan merek asing, menyerah.

Ini masalah Indonesia. Ini masalah kita. Menteri-Menteri kita, dan banyak pemimpin kita dari dulu mengatakan, "oh,

¹² Analisa Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, 2015

jangan, Indonesia tidak perlu bikin mobil sendiri.” Padahal, per satu mobil kalau kita hitung, untungnya bisa lebih dari 2.000 dolar per mobil¹³. Katakanlah untung 1.000 dolar per mobil. Berarti kalau satu juta mobil setahun, kita kirim uang ke luar negeri USD 1 miliar setahun.

Kalau motor, keuntungannya bisa 10% dari ongkos produksi per unit¹⁴. Katakanlah, untung 100 dollar per unit. 100 dollar dikalikan 6 juta unit, artinya USD 600 juta. Artinya kita kirim setiap tahun USD 1,6 miliar ke luar negeri. Bisa lebih dari Rp. 20 triliun kita kirim tiap tahun karena seluruhnya mobil dan motor yang kita beli di Indonesia adalah merek asing, dan milik asing.

Sekarang dunia sudah mulai beralih ke mobil, motor dan bus listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup banyak. Nikel dibutuhkan untuk membuat salah satu komponen utama dari mobil, motor dan bus listrik: Baterai. Sebagai negara penghasil nikel, kita harus mengolah nikel kita menjadi barang jadi. Jangan kita ekspor nikel kita secara mentah begitu saja untuk dinikmati negara-negara lain.

Sekali lagi saya tidak mengatakan kita perlu boikot barang asing, tidak.

Tetapi, yang saya harapkan adalah, kalau ada satu juta mobil yang dibeli oleh rakyat Indonesia setiap tahun, masa kita tidak mampu membuat dan merebut 10% saja dari pasar kita sendiri? Seratus ribu mobil. Masa tidak ada sih, pemimpin bangsa Indonesia, jika didukung pemerintah, yang berani

¹³ Analisa keuangan Toyota

¹⁴ Analisa keuangan Yamaha

mengatakan, “kita buat 100.000 mobil listrik nasional milik negara?”

Indikator lain yang menunjukkan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri adalah jumlah simpanan di bank-bank luar negeri yang milik orang Indonesia.

Jumlahnya dalam persentase memang relatif sedikit, hanya sekian persen dari uang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Namun jumlahnya dalam angka riil cukup besar, dan data ini telah kita ketahui karena telah diungkap oleh Pemerintah.

Menurut Kementerian Keuangan, pada akhir 2016 ada Rp. 11.000 triliun kekayaan orang Indonesia yang disimpan di bank-bank di luar negeri.

Mengingat APBN atau anggaran belanja negara kita saat ini hanya Rp. 2.000 triliun, jumlah ini lebih dari 5 kali APBN kita.

Padahal, jumlah yang lebih dari 5 kali lipat anggaran negara kita ada di luar negeri ini, jika ada di dalam negeri, bisa disalurkan oleh bank-bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha Indonesia. Bisa disalurkan untuk membangun infrastruktur, dan menjadikan BUMN-BUMN Indonesia perusahaan-perusahaan kelas dunia.

Indikator lain yang cukup miris bagi saya, adalah besarnya aset bank-bank di negeri tetangga, sebagai contoh di Singapura, dibandingkan dengan bank-bank terbesar Indonesia.

Jumlah penduduk Singapura 50 kali lebih sedikit dari kita. Besar ekonomi Singapura yang USD 372 miliar di tahun 2019 juga 3 kali lebih kecil dari ekonomi kita yang mencapai USD 1.119 miliar di tahun yang sama.

Namun bank terbesar mereka bisa 5 kali lebih besar dari bank terbesar di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun 2020¹⁵, jumlah *asset under management* BRI hanya USD 101 miliar. Sedangkan angka yang sama untuk DBS adalah USD 451 miliar, untuk OCBC USD 365 miliar dan untuk UOB USD 300 miliar.

Total jumlah aset di tiga bank terbesar Singapura mencapai USD 1.116 miliar. Sedangkan total aset tiga bank terbesar Indonesia: BRI, Mandiri dan BCA hanya USD 263 miliar atau hanya 23% dari yang dikuasai oleh tiga bank terbesar Indonesia. Padahal ekonomi kita 3 kali lebih besar dari Singapura.

Siapa sajakah sebenarnya pemilik terbesar dari uang yang disimpan di bank-bank Singapura? Apakah benar, orang Singapura sedemikian jauh lebih kaya dari orang Indonesia? Ternyata, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Reuters, setidaknya USD 200 miliar adalah milik orang Indonesia. Dengan kurs USD 1 = Rp. 14,000, ini artinya ada Rp. 2.800 triliun uang hasil ekonomi Indonesia yang parkir di Singapura.

Indikator ini, ditambah indikator neraca ekspor-impor kita dan cadangan devisa kita, **mengindikasikan kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia.**

¹⁵ Data Forbes Global 2000, data 2020

Banjir Harta Ke Luar Indonesia



Imperialism Tua vs Modern Kapitalisme

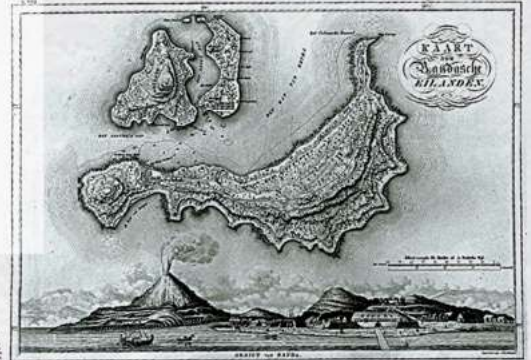
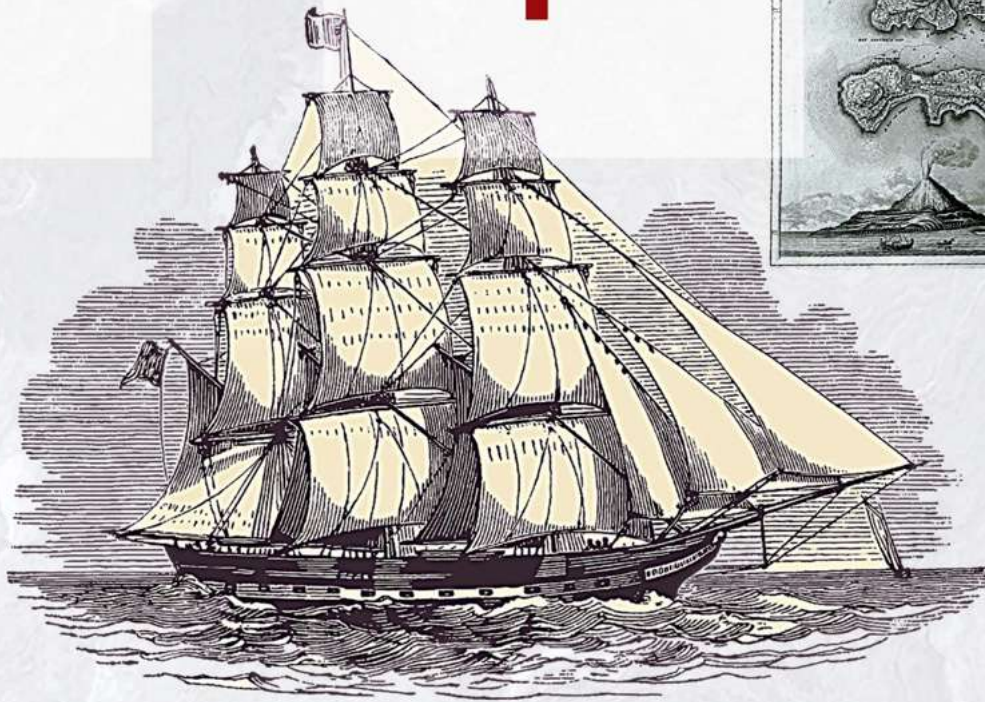
"Tatkala modern-kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal kelebihanannya alias surplus kapitalnya lalu ingin masukkan ke Indonesia - modern-imperialisme lalu menjelma di muka ini, ingin menggantikan imperialism tua yang juga sudah tua bangka.

Cara pengambilan rezeki dengan jalan monopoli dan paksa makin lama makin diganti cara pengambilan rezeki dengan jalan persaingan merdeka dan buruh merdeka.

Cara pengambilan berubah, sistemnya berubah, wataknya berubah, tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Banjir harta yang keluar Indonesia bukan semakin surut, tetapi malahan makin besar, drainage Indonesia malahan makin makan.

"Mencapai Indonesia Merdeka"
Ir. Sukarno, Maret 1933

Kekayaan Kita Untuk Siapa?



Taksiran Keuntungan Belanda Dari Menjajah Indonesia Periode 1878-1941 (63 tahun):

**54 Miliar Gulden, atau Rp. 5.174 triliun
Sampai dengan Rp. 66.599 triliun**

Ketika kita membuka buku sejarah Indonesia, kita sering membaca "kekayaan Indonesia diambil penjajah". Tetapi, jarang kita membaca ulasan berapa banyak kekayaan Indonesia yang diambil oleh bangsa penjajah.

Peneliti dari Chulalongkorn University menaksir, dengan membuka catatan resmi Pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor dari Indonesia, tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia, keuntungan Belanda pada periode 1878-1941 adalah 54 miliar Gulden. Pada waktu itu, jumlah ini setara dengan \$ 22 miliar.

Tergantung cara konversi yang digunakan, \$ 22 miliar pada waktu itu setara dengan \$ 398 miliar atau Rp. 5.174 triliun sampai \$ 5.123 miliar atau Rp. 66.599 triliun uang sekarang. Walau jumlah ini besar, angka sebenarnya pasti lebih tinggi karena banyak perdagangan yang tidak tercatat oleh Pemerintah Belanda. Angka ini juga belum menghitung mengalir keluarnya kekayaan Indonesia di periode penjajahan sebelum tahun 1878.

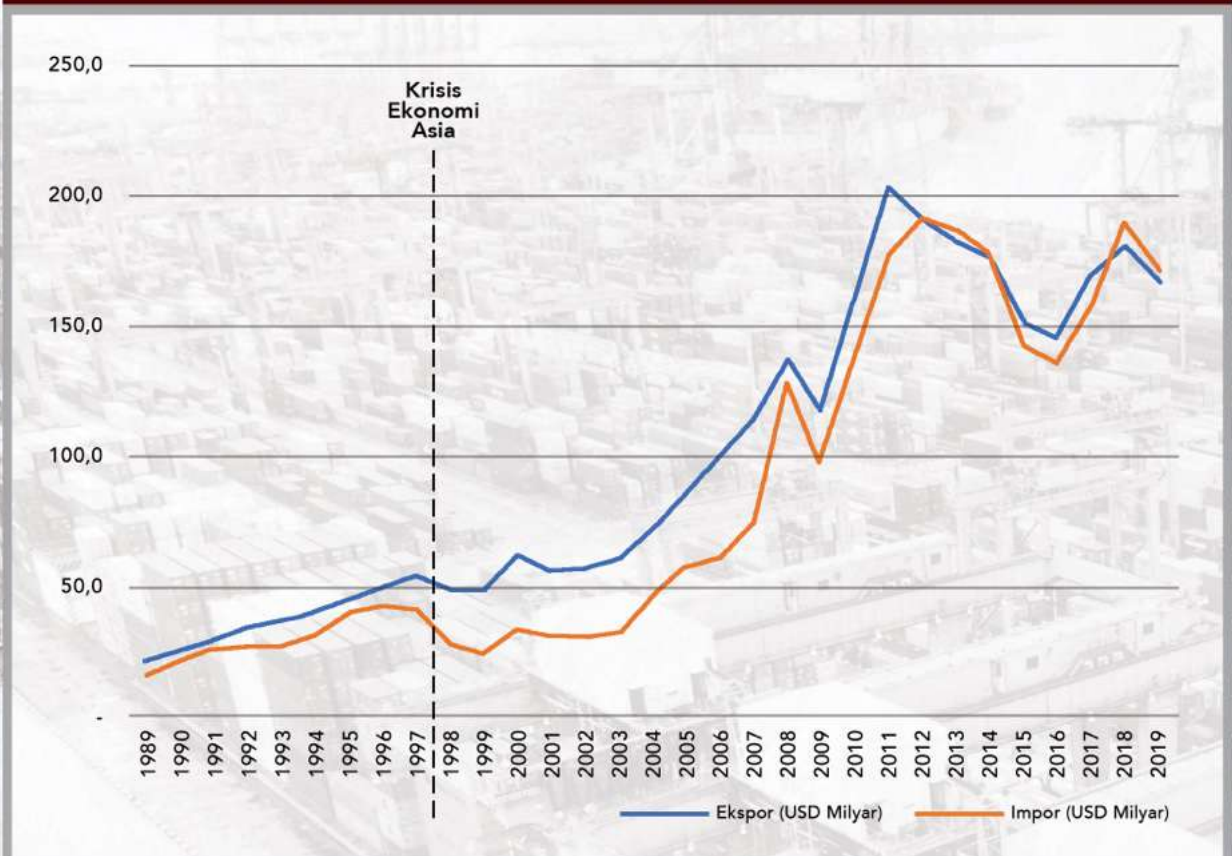


Net Outflow of National Wealth



Cadangan devisa negara diperoleh dari kegiatan perdagangan antar negara atau kegiatan ekspor dan impor. Selama 30 tahun dari 1989 sampai 2019, rata-rata keuntungan Indonesia adalah USD 13,8 milyar per tahun. Namun di akhir tahun 2019, cadangan devisa Indonesia hanya USD 129,2 milyar.

Neraca Ekspor Impor Indonesia (USD Milyar)



	Ekspor (USD milyar)	Impor (USD milyar)	Neraca (USD milyar)	Cadangan devisa (USD milyar)
1989	22,0	16,4	5,7	6,7
1990	25,7	21,8	3,8	8,7
1991	29,1	25,9	3,3	10,4
1992	34,0	27,3	6,7	11,5
1993	36,8	28,3	8,5	12,5
1994	40,1	32,0	8,1	13,3
1995	45,4	40,6	4,8	14,9
1996	49,8	42,9	6,9	19,4
1997	53,4	41,7	11,8	17,5
1998	48,8	27,3	21,5	23,6
1999	48,7	24,0	24,7	27,3
2000	62,1	33,5	28,6	29,4
2001	56,3	31,0	25,4	28,1
2002	57,2	31,3	25,9	32,0
2003	61,1	32,6	28,5	36,3
2004	71,6	46,5	25,1	36,3
2005	85,7	57,7	28,0	34,7
2006	100,8	61,1	39,7	42,6
2007	114,1	74,5	39,6	56,9
2008	137,0	129,2	7,8	51,6
2009	116,5	96,8	19,7	66,1
2010	157,8	135,7	22,1	96,2
2011	203,5	177,4	26,1	110,1
2012	190,0	191,7	(1,7)	112,8
2013	182,6	186,6	(4,1)	99,4
2014	176,0	178,2	(2,1)	111,9
2015	150,4	142,7	7,7	105,9
2016	144,5	135,7	8,8	116,4
2017	168,8	157,4	11,4	130,2
2018	180,2	188,7	(8,5)	120,7
2019	167,7	171,3	(3,6)	129,2

Sumber: Bank Dunia, 2022

Illicit Outflow of National Wealth

Mengalir Keluarnya Kekayaan Negara Secara Gelap

Penggelapan Uang ke Luar Indonesia
2004-2013 Estimasi Sangat Konservatif
dari Global Financial Integrity

Hot Money
Outflows

Rp.
17.000
triliun

Trade
Misinvoicing
Outflows

Rp.
2.100
triliun

Total
Outflows

Rp.
19.100
triliun

Dengan menganalisa kegagalan dari angka-angka perdagangan resmi yang diterbitkan oleh IMF, Bank Dunia, PBB, Kemendag AS, dan Uni Eropa, lembaga riset pergerakan uang dunia Global Financial Integrity (GFI) yang bermarkas di Washington DC menyimpulkan setidaknya US\$ 180,71 miliar atau setara Rp. 2.349 triliun telah mengalir keluar dari Indonesia secara gelap pada kurun waktu 2004-2013.

Aliran uang gelap
keluar Indonesia
tahun 2016:

**USD 38,5 milyar/
Rp. 550 triliun**



Perlu dicatat:

GFI menekankan bahwa jumlah ini hanya sebagian kecil dari total kekayaan Indonesia yang keluar secara gelap karena hitungan di atas tidak mencakup: 1. Uang yang mengalir keluar secara tunai (cash) dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing | 2. Angka-angka perdagangan jasa, lisensi, royalti dan non-barang lainnya yang mencakup ~25% nilai perdagangan dunia | 3. Manipulasi angka ekspor-impor yang dilakukan secara bersama oleh eksportir dan importir.

3 Modus Penggelapan Uang Keluar Indonesia

- 1 Korupsi**
Penggelapan hasil korupsi oleh pejabat
- 2 Kriminal**
Penggelapan hasil jual-beli narkoba, manusia, dan perdagangan terlarang lainnya
- 3 Komersial**
Pemalsuan dokumen ekspor dan impor untuk menghindari pajak

Tantangan Pemerintahan Terbesar Kita

Adalah Mengalirnya
Kekayaan Kita
Ke Luar Negeri

Jumlah uang WNI
di bank-bank luar negeri:

**Rp. 11.000
triliun**

Data Kementerian Keuangan, 2016



Jumlah uang WNI
di bank-bank dalam negeri:

**Rp. 7.000
triliun**

Data Lembaga Penjamin Simpanan, 2020



Jumlah uang yang
dikembalikan (repatriasi)
ke Indonesia karena
tax amnesty 2016:

Rp. 140 triliun

Ketidakadilan Ekonomi

Berhubungan erat dengan tantangan besar utama yang dialami oleh ekonomi kita, yaitu mengalir keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu keadaan yang kita dapat sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin, dan keadaan susah.

Menurut data BPS, gini ratio pendapatan warga Indonesia di tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38% pendapatan di Republik Indonesia. Menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse, di tahun 2021 angka gini ratio kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan.

0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar. Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan.

Gini ratio, atau rasio gini adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka gini ratio kekayaan 0,36 artinya adalah 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia.

Jika populasi Indonesia ada 270 juta jiwa, artinya 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang saja. 64% sisanya dibagi antara 267,3 juta jiwa.

Bahkan, baru-baru ada yang menghitung, harta kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia¹⁶.

Angka gini ratio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan, karena bagi saya kekayaan yang hakiki adalah kepemilikan tanah.

Data yang diungkapkan oleh Menteri ATR/BPN di 2020, gini ratio kepemilikan tanah kita di tahun 2020 mencapai 0,67. Artinya, 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia. Harus diakui angka ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena akhir-akhir ini Pemerintah gencar membagikan sertifikat tanah,

Coba tanyakan ke keluarga dan kerabat saudara. Siapa diantara mereka yang memiliki tanah? Apakah saudara sendiri memiliki tanah? Ataukah saudara menyewa tanah tempat saudara saat ini tinggal? Apakah petani-petani kita masih memiliki tanah sendiri? Kalau iya, berapa rata-rata luas tanah yang mereka miliki? Apakah meningkat, atau menurun dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu?

Data tahun 2020 dari Kementan, ada 35 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani¹⁷.

¹⁶ OXFAM dan INFID, 2017

¹⁷ Pusat data dan sisten informasi pertanian, Kementan 2020

Namun lebih dari 75% petani, atau lebih dari 28 juta petani tidak punya lahan sendiri¹⁸. Yang memiliki lahan sendiri hanya 9 juta petani, itupun luas lahannya kecil-kecil.

Saat ini sudah lebih dari 76% populasi Indonesia memiliki akses ke Internet¹⁹. Karena banyak dari 1% populasi kaya Indonesia yang mengumbar kekayaan di media sosial, ini artinya lebih dari 3/4 populasi kita bisa melihat secara gamblang ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia.

Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat bisa dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidup mewah dan berlebih.

Berbicara tentang ketimpangan, saya ingin mengutip buku tulisan Niall Ferguson, judulnya *The Great Degeneration*.

Dalam buku ini, yang ditulis sebelum pandemic COVID 19, Niall mewawancarai seribu pelaku ekonomi, CEO dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kepada mereka, dia tanyakan, “menurut Anda, apa ancaman terhadap ekonomi dunia, terutama *emerging market* / negara berkembang?”

Mereka, seribu pelaku ekonomi, menjawab:

1. Inflasi
2. Pecahnya investasi aset
3. Korupsi
4. Radikalisasi
5. Bencana alam

¹⁸ Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016

¹⁹ Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), 2021

6. dan pandemi penyakit seperti SARS

Sebagai contoh, kita bisa lihat sekarang, dengan instabilitas politik, pertumbuhan ekonomi Myanmar dan Afghanistan tersendat. Jika ada ketidakjelasan politik, sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik.

Niall Ferguson ini seorang ahli sejarah. Selain menanyakan pandangan para pelaku ekonomi, dia juga menanyakan pandangan para ahli sejarah.

Para ahli sejarah yang ia wawancara mengatakan:

“Kalau semua yang dikatakan tadi ada, ditambah lagi kalau jumlah penduduk sebagian besar suatu negara adalah orang muda antara 18 sampai 30 tahun, dan jika harga pangan naik, ancamannya adalah revolusi, huru-hara, perang saudara.”

Niall mencatat, “ini sedang terjadi di Timur Tengah.” Menurutnya apa yang disebut sebagai *Arab Spring* itu terjadi karena ada hal-hal ini. Instabilitas terjadi di Timur Tengah adalah akibat daripada ada faktor-faktor itu semua.

Menurut saya, kita harus bertanya kepada diri kita: Faktor-faktor ini, elemen-elemen ini ada tidak di Republik Indonesia saat ini?

Sekarang, kalau saja di setiap desa ada 10 anak putus sekolah, yang usianya antara 15 sampai 22 tahun. Kalau ada 10 anak di satu desa, dan kita punya 80.000 desa. Sepuluh kali 80.000, artinya ada 800.000 pemuda yang tidak mengerti dia harus bikin apa. Dia kasihan melihat ibunya, bapaknya. Di beberapa

tempat dia mencari kayu untuk hidup. Dia mungkin juga ngarit rumput untuk bantu ternak ibunya. Tetapi, penghasilannya sangat minim. Pada usia yang sangat produktif, mereka harus punya cita-cita, punya harapan. Kalau mereka hidup tanpa harapan, ini kan sesuatu yang rawan. Mereka bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik.

Inilah sebabnya, mengapa saya katakan kita harus waspada.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa huru hara, revolusi dan perang saudara dapat dipicu oleh 7 hal:

1. Inflasi
2. Harga pangan naik
3. Ledakan penduduk
4. Pengangguran meningkat
5. Disparitas penghasilan
6. Radikalisme ideologi, dan
7. Korupsi.

Hampir semuanya sekarang ada di Republik Indonesia. Karena gini ratio kita sekarang 0,36, jika ada pemantik yang tepat, Indonesia dapat terjerumus dalam huru hara, revolusi dan perang saudara yang berkepanjangan.

Kita harus waspada.

Distribusi Kekayaan Pribadi Rakyat Indonesia

Menurut Credit Suisse, total kekayaan pribadi yang dimiliki warga Indonesia berjumlah sekitar USD 3,1 triliun - sekitar Rp. 44.800 triliun.

Dalam tabel ini kita dapat melihat bagaimana kekayaan tersebut terdistribusikan ke 270 juta penduduk Indonesia, dari kelompok termiskin hingga terkaya.

Terlihat bagaimana 10% warga terkaya Indonesia memiliki 66% dari total kekayaan pribadi, dan 10% warga termiskin tidak memiliki apa apa. 10% warga termiskin malah memiliki utang.

Kelompok Warga	Porsi Kekayaan
Kelompok 1 (10% termiskin)	-0,1%
Kelompok 2	0,3%
Kelompok 3	0,6%
Kelompok 4	1,3%
Kelompok 5	2,2%
Kelompok 6	3,3%
Kelompok 7	5,1%
Kelompok 8	8,3%
Kelompok 9	12,8%
Kelompok 10 (10% terkaya)	66,2%

Sumber: Credit Suisse Global Wealth Report 2021



Ekonomi Milik Siapa?



1% Menguasai 36% Kekayaan

Angka rasio gini Indonesia menurut Credit Suisse adalah 0,366. Artinya 1% orang terkaya (hanya 2,7 juta orang) menguasai 36% kekayaan Indonesia yaitu sekitar Rp. 16.800 triliun dari total kekayaan orang Indonesia Rp. 44.800 triliun.

* Credit Suisse Global Wealth Databook, 2021

27,5 Juta Hidup Miskin

27,5 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah yaitu Rp. 472.000 per orang per bulan atau Rp. 15.700 per orang per hari. Angka ini adalah 10,2% dari seluruh penduduk Indonesia.

* Badan Pusat Statistik, Maret 2021





67% dikuasai 1% (2,6 juta orang)

33% dikuasai 99%

“115 Juta Orang Indonesia Terancam Miskin”

Walau tingkat kemiskinan berkisar di 10%, sebanyak 45% atau 115 juta penduduk Indonesia masuk ke kategori rentan miskin.

* Bank Dunia, 2021

1% Menguasai 67% Tanah Kita

Rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah saat ini: 0,67 artinya 67% tanah dikuasai sekitar 2,6 juta orang saja.

* Sumber: Kementerian ATR / BPN, 2020

Ranking Negara:

Kekayaan Pribadi Warga Negara

Peringkat	Warga Negara	Total Kekayaan Pribadi
1	Amerika Serikat	USD 126 triliun
2	Tiongkok	USD 74 triliun
3	Jepang	USD 26 triliun
4	Jerman	USD 18 triliun
5	Inggris Raya	USD 15 triliun
6	Perancis	USD 14 triliun
7	India	USD 12 triliun
8	Italia	USD 11 triliun
9	Kanada	USD 9 triliun
10	Australia	USD 9 triliun
11	Korea Selatan	USD 8 triliun
12	Spanyol	USD 8 triliun
13	Belanda	USD 5 triliun
14	Taiwan	USD 4 triliun
15	Swiss	USD 4 triliun
16	Meksiko	USD 3 triliun
17	Indonesia	USD 3 triliun

Sumber: Credit Suisse Global Wealth Databook,
2021 – Tabel 4-1



Gizi SDM Indonesia

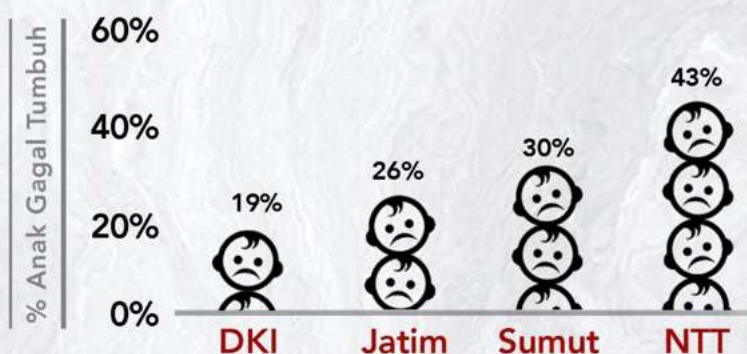


27% Anak Gagal Tumbuh

27% anak Indonesia mengalami gagal tumbuh (stunting) karena gizi buruk. Angka di NTT lebih parah: 43% anak NTT mengalami stunting.

Alhasil, nilai Indonesia di Indeks Kelaparan Global (GHI) adalah 21,9 atau salah satu yang tertinggi di dunia, setara dengan Kamerun dan Namibia yang jauh lebih miskin dari kita.

* Kementerian Kesehatan, 2020; Global Hunger Index, 2020



Konsumsi Buah & Sayuran 43% Standar WHO

Konsumsi buah dan sayuran orang Indonesia baru 180 gram per hari, jauh di bawah standar WHO 400 gram per hari.

* SEAFast Center IPB, 2018



Kualitas Pendidikan Indonesia

Kualitas Pendidikan No.74 dari 79

Kemampuan membaca, matematika dan sains anak Indonesia ranking 74 dari 79 negara di survei PISA* tahun 2018.

Survei PISA adalah indikator kualitas pendidikan di negara maju. Saat ini pelajar Indonesia 'underperform' di kemampuan berbahasa, matematika dan sains.

'Underperform' dalam berbahasa artinya pelajar tidak mampu menemukan gagasan utama dalam teks. Dalam sains, artinya pelajar tidak menguasai teori-teori dasar dan tidak mampu menjelaskan hasil kalkulasinya. Dalam sains, artinya pemahaman ilmu pengetahuan yang dimiliki pelajar terbatas sehingga hanya dapat diaplikasikan di situasi yang familiar atau telah diketahui.

* Programme for International Student Assessment, 2019

1. China
2. Singapura
3. Hongkong

Survei PISA adalah indikator kualitas pendidikan di negara maju. Saat ini pelajar Indonesia 'underperform' di kemampuan berbahasa, matematika dan sains.

72. Georgia

73. Panama

74. Indonesia



Kualitas SDM Indonesia



40% Angkatan Kerja Lulusan SD

50 juta orang atau hampir 40% angkatan kerja Indonesia (di atas 15 tahun) hanya menamatkan SD. 23 juta menamatkan SMP. Hanya 12 juta dari 128 juta angkatan kerja di Indonesia telah menyelesaikan kuliah.

*Badan Pusat Statistik, 2020



Bank Dunia: 55% "Functionally Illiterate"



Pelajar dengan hasil di bawah 2 dalam skor PISA (2015) dapat dikategorikan *functionally illiterate* / buta huruf fungsional - bisa baca tetapi tidak menguasai materi yang dibaca.

- 55% orang Indonesia *functionally illiterate*
- 14% orang Vietnam *functionally illiterate*, walau PDB per kapita mereka lebih rendah dari Indonesia

Perbandingan Jumlah 'functionally illiterate'



Ekonomi Jakarta Sentris

Selain rasio gini, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri.

Besar ekonomi Indonesia atau PDB pada tahun 2020 lalu adalah USD 1.058 miliar, atau sekitar Rp. 15.300 triliun jika menggunakan kurs satu dollar setara Rp. 14.500.

Sekitar 70% dari perputaran ekonomi sebesar Rp. 15.300 triliun berputar di Jakarta²⁰. Sebagian besar sisanya berputar di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya segelintir saja yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia. Itupun banyak terkonsentrasi di pulau Jawa.

Saya juga baru membaca laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait simpanan uang di seluruh bank-bank yang ada di Indonesia. Posisi per September 2023, totalnya ada Rp. 8.205 triliun uang yang tersimpan di seluruh bank di Indonesia.

Ternyata, dari seluruh uang yang tersimpan di seluruh bank di Indonesia, 52% ada di cabang-cabang Jakarta. Walaupun jumlah penduduk Jakarta hanya 3,9% penduduk Indonesia, namun 52% simpanan dimiliki / dikelola penduduk Jakarta.

Rata-rata simpanan per rekening Jakarta juga sangat besar, Rp. 402 juta per rekening, dibandingkan rata-rata nasional Rp. 29 juta per rekening.

²⁰ INDEF, 2020

Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta dan listrik tidak tersedia dengan baik pedesaan dan di luar Jawa.

Bahkan, di kampung halaman saya, di Sulawesi Utara, mati listrik selama 6-12 jam masih menjadi hal yang lumrah di tahun 2019.

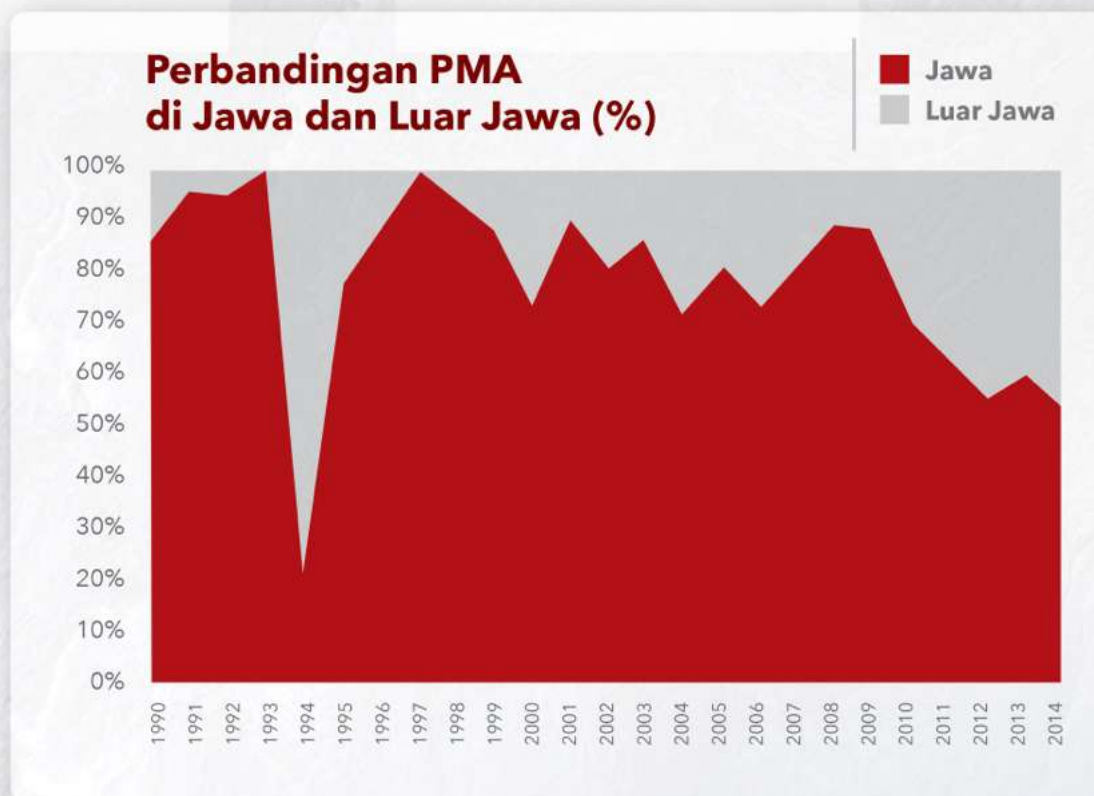
Yang patut menjadi perhatian kita semua, dan harus kita selesaikan dalam tempo cepat adalah soal gizi. Di NTT, dua dari tiga anak mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat malnutrisi²¹. Malnutrisi adalah bahasa halus dari kelaparan.

Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak. Ini adalah fakta yang menyedihkan di tengah banyaknya gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah.

Ini berbahaya, karena artinya 1 dari 3 orang Indonesia tidak memiliki kesempatan bersaing yang sama. Anak yang kurang nutrisi akan sulit berprestasi di sekolah, dan setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi.

²¹ Kementerian Kesehatan, 2020

Dari 1990 ke 2014, konsentrasi investasi di Jawa



Total Realisasi PMA

1990-2014

Jawa

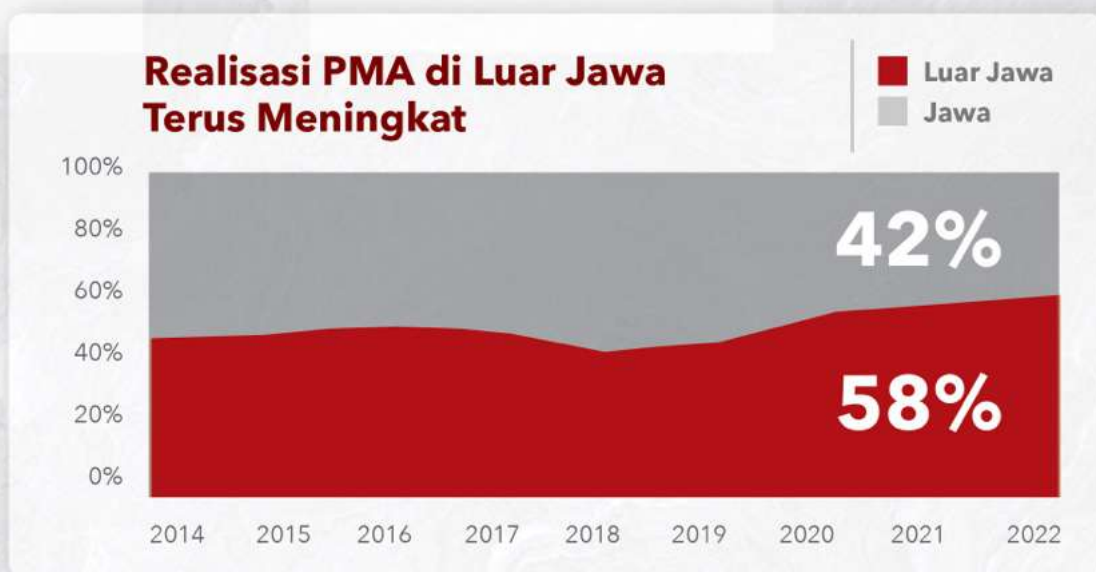
**US\$1,968
Miliar**

Luar Jawa

**US\$532
Miliar**



Sejak 2014, konsentrasi investasi di luar Jawa



Sumber: Kementerian Investasi, 2023

Kebijakan Hilir Mendorong Industrialisasi di Indonesia Timur*

**PDRB
Morowali**
Sulawesi Tengah

73%

Pada 2010: 8%

**PDRB
Halmahera**
Maluku Utara

61%

Pada 2010: 3%

* Catatan: Pangsa PDB atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2022; Sumber: BPS

Demokrasi Kita Bisa Dikuasai Pemodal

Sekarang Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan. Banyak pemimpin kita yang bisa disogok, bisa dibeli. Akhirnya banyak pemimpin terpilih tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi malah menjual negara kepada pemodal besar – bahkan kadang kepada bangsa lain.

Sepanjang hidup saya, saya sudah keliling ke semua kabupaten di Indonesia. Di tahun 2014 dan 2019 saja, saya berkesempatan berkeliling ke ratusan kota dan kabupaten.

Di mana-mana, rakyat mengaku sudah tidak tahan lagi. Terlalu banyak korupsi di Republik Indonesia ini. Banyak proyek dikorupsi, banyak orang disogok. Banyak pemimpin kita mau dibeli dan mau disogok. Akhirnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan politik bagi bangsa Indonesia.

Indonesia, menurut pendapat saya, sekarang ini ada di persimpangan jalan. Apakah cita-cita demokrasi ini akan di-*hijack*, akan disandera oleh para Kurawa?

Inilah pertarungan kita saat ini. Perebutan antara Kurawa dan Pandawa. Mereka, para Kurawa, hidupnya didorong oleh keserakahan. Mereka sudah punya kekuasaan, sudah punya harta banyak, tetapi selalu ingin lebih.

“Persetan itu, jutaan orang yang tidak punya pekerjaan. Persetan itu, para pedagang kecil. Persetan mereka semua. Saya maunya hanya perjuangkan kepentingan saya.

Kelompok saya, keluarga saya, dinasti saya.” Demikian cara berpikir para Kurawa.

Dalam setiap perjuangan, ada Kurawa, ada Pandawa. Pandawa, *the good guys*, orang-orang yang baik, ada di mana-mana di Indonesia. Tetapi, saat ini jumlahnya saat ini belum banyak.

Saya disini menghimbau agar kekuatan rakyatlah yang bicara. Para Pandawa di Republik Indonesia tidak didukung oleh uang modal besar. Para Kurawa tidak suka dengan program para Pandawa. Kurawa tidak suka bahwa Pandawa ingin memberdayakan orang yang lemah, orang yang miskin.

Mereka, para pemodal besar, ada yang dari bangsa kita sendiri dan bangsa asing. Mereka tidak suka pada keinginan mereka-mereka yang hendak mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Mereka suka Indonesia yang lemah. Mereka suka Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Mereka ingin suatu pemerintahan boneka. Mereka ingin mengendalikan bangsa ini. Mereka ingin Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang korup, oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang korup. Pemimpin-pemimpin yang bisa diatur oleh para Kurawa.

Sesungguhnya, taruhan kita sangat besar. Sekarang kita merasakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita sedang mengalami suatu penyakit yang mendalam. Setiap unsur masyarakat kita sudah rusak. Rusak moral, rusak mental.

Ya, setiap unsur di masyarakat kita, setiap tingkatan kepemimpinan sudah sarat dengan sogok-menyogok. Orang

yang punya banyak uang atau dimodali banyak uang bisa membeli suara, membeli loyalitas, membeli ketaatan.

Sekarang banyak pemimpin kita, banyak pejabat kita bukan taat kepada Undang-Undang Dasar, bukan taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat kepada yang memberi uang.

Ini semua karena demokrasi yang kita laksanakan, demokrasi liberal yang kita laksanakan sekarang ini, membutuhkan biaya yang sangat besar.

Setelah 78 tahun lebih kita bernegara, setelah pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani menolak dijajah kembali oleh kekuatan asing, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali.

Tetapi, sekarang mereka menjajahnya lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup 'membeli' dan menyogok sebagian pemimpin-pemimpin kita.

Kita sadar dan mengerti, demokrasi adalah sistem yang terbaik dari sistem-sistem pemerintahan yang ada. Namun, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita bisa disandera. Demokrasi kita bisa diperkosa. Demokrasi kita bisa dirusak dengan politik uang. Saat ini, uang yang mahakuasa.

Ya, dengan uang, bangsa kita bisa dijajah kembali. Pemimpin-pemimpin bisa dibeli. Hakim-hakim, politisi-politisi, anggota-anggota DPR, ketua-ketua partai kita banyak yang lemah dan bisa dibeli. Hampir semua lembaga bisa dirusak uang.

Termasuk pemimpin-pemimpin agama kita, ada yang sudah mulai bisa dirusak uang.

Demokrasi sekarang adalah demokrasi yang punya uang.

Ini membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti, mereka yang punya atau kuasai uang, mereka yang menguasai kedaulatan politik Indonesia.

Sekarang ini, setiap menjelang pilkada, saat pemimpin partai-partai di Indonesia menjaring calon pemimpin, inilah yang ditanyakan kepada para calon yang mendaftar di partai-partai. Termasuk di partai saya, Partai GERINDRA.

Yang ditanyakan bukan “kamu sekolahnya di mana?”, bukan “ijazahmu apa?”, bukan “pengabdianmu kepada negara bagaimana?”.

Tetapi, yang ditanyakan adalah “kamu punya uang, tidak?”

Ada tokoh yang hebat, jujur, bersih, bijak, dan sudah mengabdikan sekian puluh tahun, sebagai guru atau pegawai negeri, atau sebagai tentara atau polisi. Namun dia tidak bisa mengabdikan lebih lanjut, karena pertanyaannya selalu, “kamu punya uang atau tidak?”

Akhirnya, bahayanya bagi bangsa Indonesia adalah nantinya semua akan ditentukan oleh mereka yang punya uang.

Ya, kalau yang punya uang warga negara kita yang setia kepada Pancasila. Tetapi kalau uang itu berasal dari uang

haram, kalau uang itu berasal dari luar negeri, berarti kita dijajah dengan uang.

Karena itu, saya sering mengatakan, kita adalah bangsa yang ramah. Kita ingin bersahabat. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya dari negara lain, *"I want to be your friend. I want to be your partner, but I can not be your peon."*

Saya ingin jadi sahabatmu. Saya ingin jadi mitramu. Tetapi kalau kamu ingin saya jadi kacungmu, saya katakan, tidak!

Prabowo tidak bisa jadi kacung kamu. Indonesia tidak mau jadi kacung kamu. Kita mau jadi sahabatmu. Kita mau jadi kawanmu. Kita mau jadi mitramu, tapi kita tidak mau jadi kacung siapa pun di dunia. Saya tidak mau, ketika ada orang kaya melihat Indonesia di peta dunia, mereka melihat ada *price tag*, ada label harga yang menempel di peta negara kita karena sistem demokrasi liberal yang kita anut.

Saya membaca, ada desa di Jawa Tengah, di desa itu calon kepala desanya keluar Rp. 1 miliar hanya untuk menjamu pemilih di rumahnya²². Tingkat kepala desa, habis Rp. 1 miliar untuk kampanye. Minimal, di daerah yang sama, perlu Rp. 700 juta untuk modal kampanye.

Jika saudara turun ke desa, setelah pemilihan kepala desa, coba saudara tanya, "Bapak pilih siapa?". Sekarang banyak yang menjawab, "saya pilih yang kasih 400 ribu, pak." Namanya pun dia tidak hafal. Pokoknya yang kasih 400 ribu.

²² Riset Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKMRD), 2015

Pemilihan kepala desa sekarang, satu suara bisa 400 ribu. Bahkan saya dengar, di banyak tempat bisa lebih. Apalagi untuk Pilkada tingkat Provinsi, dan Pilkada tingkat Kabupaten/Kota.

Di Pemilu serentak yang lalu, saya ingat, ada beberapa kader saya yang dengan semangatnya, "Pak, saya mau maju bupati. Saya mau maju gubernur."

Saya tanya, "Anda ini punya kekuatan ekonomi, tidak?", dijawab, "Pak, saya mau gadaikan rumah saya."

Untuk politik, saya larang kader saya gadaikan milik mereka. Saya bilang, "Itu rumah urusan sama istri anakmu. Bisa saja kau kalah. Kalau kau kalah, rumah sudah tergadai, tanggung jawabmu kepada anak istrimu bagaimana?".

Saya ingat, waktu itu saya bilang, "Anda mau maju di politik? Anda harus tahu, politik liberal ini membutuhkan biaya."

Basisnya Partai GERINDRA adalah petani, nelayan. Orang-orang di kecamatan, di desa. Karena itu GERINDRA cepat berkembang, karena jaringan HKTI, KTNA dan sebagainya.

Pemimpin-pemimpin GERINDRA banyak adalah pemimpin koperasi, mantan kepala desa. Penghasilannya sebulan dua juta. Dengan penghasilan sebulan dua juta, kalau dia harus bayar ojek sekali keluar desa, bayar ojek saja berapa? Untuk keluar desa dia saja, keliling saja dia mungkin sudah tidak sanggup secara ekonomi.

Negara Indonesia sangat kaya. Kita bukan negara miskin. Kita punya semua sumber alam yang dibutuhkan untuk menjadi negara sejahtera.

Tetapi, masalahnya, sistem kita dirusak oleh suatu elite, suatu oligarki yang serakah. Oligarki yang serakah ini mau menguasai semua sumber ekonomi Indonesia, dan tega membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan tidak layak. Mereka menguasai politik kita, pemerintahan kita, dengan banyak cara.

Sekarang yang banyak terjadi adalah manipulasi dan rekayasa. Hasil dari banyak polling, banyak survei yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat bisa dibeli dan dimanipulasi. Saudara pun bisa pesan survei, "bikin saya nomor satu." Kita tahu itu semua.

Yang cilaka adalah, adalah ketika ada lembaga survei bekerja untuk tiga orang. Ke si A, dia dapat duit, dia kasih nilai bagus. Si B, dikasih nilai bagus. Si C, juga dikasih nilai bagus. Kerja sekali, dapat tiga pemasukan. Sekarang banyak kreativitas. Kita bangsa yang kreatif.

Alhamdulillah, sekarang dengan media sosial, keberpihakan pada "konglomerat survei" kepada calon-calon tertentu dapat terlihat. Di Pemilu 2014 dan kembali lagi di Pemilu 2019 lalu, ada pelaku-pelaku survei yang secara terang-terangan di media sosial berkampanye untuk calon pasangan yang berhadapan dengan saya.

Namun kesadaran masyarakat akan praktek-praktek seperti ini masih rendah. Masih ada 24% masyarakat kita yang tidak

punya akses ke Internet. Adalah tugas kita bersama untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah percaya survei.

Di negara maju pun, survei bisa jadi alat penguasa. Misalkan, hampir semua lembaga survei di Amerika salah memprediksi siapa pemenang pemilu Presiden Amerika 2016. Hampir semua lembaga survei di Inggris Raya salah memprediksi Brexit di 2016. Menurut saya ini bukan kebetulan.

Wujud utama demokrasi kita adalah pemilihan, adalah kotak suara. Mereka yang dapat memberikan suara ke kotak suara adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP. Setiap warga negara Indonesia memiliki satu suara di setiap pemilihan. Satu suara untuk Pemilu Legislatif tingkat Nasional dan tingkat Daerah. Satu suara untuk Pemilu Presiden. Satu suara untuk Pemilu Kepala Daerah.

Namun, di banyak pemilihan, pengalaman Partai GERINDRA yang ikut Pemilu sejak 2009, kita seringkali menemukan daftar pemilih tidak akurat. Kita menemukan banyak 'hantu' dalam daftar pemilih itu. Ada nama-nama yang berkali-kali disebut, di TPS yang berbeda-beda. Mereka bisa saja memilih beberapa kali, apalagi tinta yang digunakan untuk mencegah hal ini kadang bisa dihapus.

Ada juga nama-nama orang meninggal masih dalam DPT. Ini kita tahu semua. Di Pemilukada DKI 2012, jumlahnya belasan ribu. Di Pemilu 2014, jumlahnya jauh lebih besar. Bahkan ada lembaga riset yang mengatakan, potensinya sampai 20%

jumlah pemilih²³. Di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, masalah ini juga masih ada²⁴.

Kita lihat sekarang, banyak sendi-sendi kehidupan bangsa kita, lembaga-lembaga negara kita, institusi-institusi yang penting untuk demokrasi kita, satu per satu tergoyahkan.

Ada hal-hal yang sudah jelas di depan mata tidak benar dan tidak adil, tetapi sebagian elite kita pura-pura tidak tahu. Media kita sekarang banyak dikuasai pemodal besar, sehingga banyak masalah-masalah bangsa yang disebabkan oleh ulah pada pemodal besar yang tidak diliput, atau diliput dengan narasi yang jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

Ini berbahaya karena banyak masyarakat kita berharap kepada media untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan soal demokrasi kita. Masyarakat kita berharap media netral, tidak berpihak selain ke kepentingan bangsa, tidak menjadi propagandis kepentingan tertentu.

Saya angkat topi kepada media-media yang secara eksplisit menyatakan keberpihakan kepada partai politik, atau kandidat tertentu dalam sebuah pemilihan, atau isu politik tertentu. Apalagi jika pernyataan keberpihakannya diulang terus-menerus, sehingga masyarakat dapat mengetahui berita yang diterbitkan berat sebelah.

Jangan seolah tidak berpihak, seolah netral dan tidak bisa dibeli, tetapi menjerumuskan.

²³ Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2014

²⁴ Bawaslu, 2020; Perludem, 2020

Kita harus ingat, *knowledge is power*. Pengetahuan adalah kekuatan. Karena itu, media kerap kali dijadikan senjata.

Sekarang kita sudah bisa buka dan baca, sebagian arsip rahasia negara-negara adidaya dari tahun 60an. Kita bisa baca sendiri, bagaimana mereka, dengan media yang mereka kuasai, pernah mempengaruhi pandangan masyarakat kita terhadap politik dalam negeri kita.

Bukan tidak mungkin, apa yang pernah dilakukan di masa lalu, terus berlanjut hingga sekarang. Amerika Serikat-pun mengalami 'gangguan' serupa di Pemilu mereka tahun 2016 dan 2020 lalu

Elit Indonesia Rawan Divide Et Impera

Demokrasi kita dalam bahaya. Pertama, karena banyak pemimpin kita yang bisa dibeli. Kedua, karena banyak kelompok oligarki yang memiliki cukup banyak uang untuk membeli para pemimpin kita.

Ya, komprador-komprador dan kelompok oligarki yang ingin mengeruk keuntungan di Indonesia inilah yang mau, yang berkepentingan meng-hijack atau membajak proses demokrasi ini.

Jika saudara sudah lama jadi orang Indonesia, saudara tentu tahu ada uang ngarit, ada uang cendol, ada serangan fajar. Dengan kekuasaan dan uang mereka, mereka mau atur segalanya.

Dalam sejarah politik di Indonesia, selalu ada politisi-politisi yang tidak arif. Politisi-politisi yang bisa dibeli, yang manut kepada pemodal, dan mengira politik adalah soal menang-menangan saja.

Namun ada juga, politisi-politisi yang memandang politik bukan sebagai ajang rebut-merebut demi memenangkan kepentingan golongan sendiri. Mereka adalah para pejuang politik yang memandang politik sebagai usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat yang kita cintai.

Akhir akhir ini, kita sebagai bangsa dapat menyaksikan dengan mata kepala kita, ketika ada pejuang-pejuang politik yang seperti ini, kekuatan politik mereka diusrek-usrek. Organisasi mereka diganggu-ganggu, diobok-obok oleh

pemodal besar dan para pionnya yang bermental kolonial, bermental imperialis.

Akhirnya, banyak dari mereka pun tumbang dan tersingkirkan dari gelanggang politik nasional.

Kita harus ingat, jangan kita lupa sejarah kalau dulu tokoh-tokoh bangsa kita sering selalu diadu domba. *Divide et impera*. Kalau dulu sultan lawan sultan, pangeran lawan pangeran, sekarang seringkali ketua umum partai lawan anak buah yang dibesarkan oleh dia sendiri namun dimodali oleh pemodal besar.

Karena itu sekarang saya ingatkan, bagi setiap kader bangsa, di partai manapun yang nasionalis, yang cinta tanah air, agar selalu waspada.

Jangan sampai tersingkir karena cara-cara licik seperti ini. Pastikan AD/ART organisasi aman dari upaya-upaya *hostile takeover*, pengambilalihan secara kasar karena uang.

Peringatan Sukarno

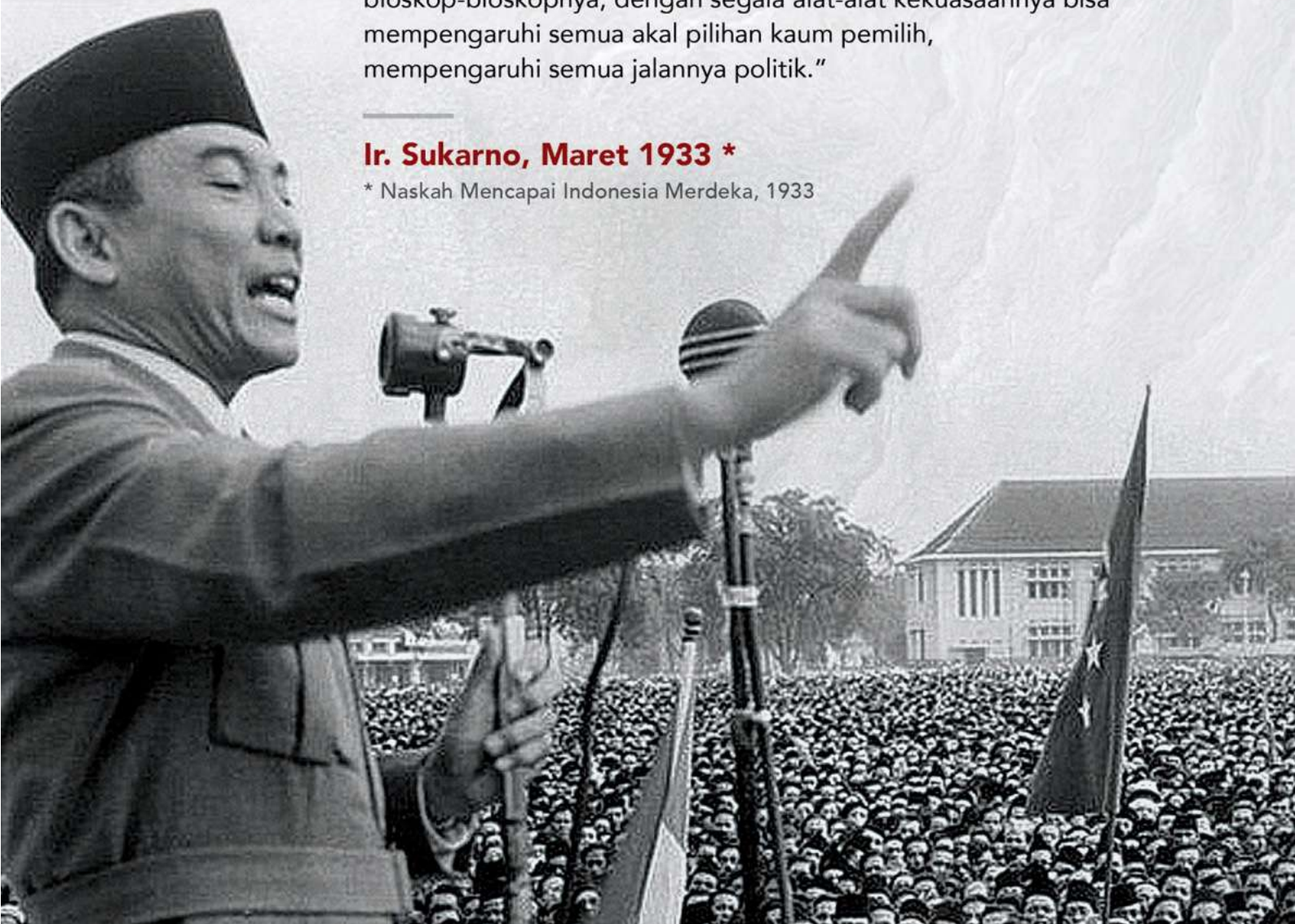
"Semua 'negeri sopan' kini mempunyai parlemen, semua 'negeri sopan' kini bersistem 'demokrasi'. Tetapi, di semua negeri-negeri sopan itu kini rakyat jelata tertindas hidupnya.

Demokrasi mereka bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan suatu demokrasi burjuis belaka – suatu *bürgerlijke democratie* yang untuk kaum burjuis dan menguntungkan kaum burjuis belaka.

Benar rakyat 'boleh ikut memerintah', tetapi kaum burjuis lebih kaya dari rakyat jelata, mereka dengan harta kekayaannya, dengan surat-surat kabarnya, dengan buku-bukunya, dengan bioskop-bioskopnya, dengan segala alat-alat kekuasaannya bisa mempengaruhi semua akal pilihan kaum pemilih, mempengaruhi semua jalannya politik."

Ir. Sukarno, Maret 1933 *

* Naskah Mencapai Indonesia Merdeka, 1933



Ada Suara Ada Harga



**Rp. 11,8 Triliun
untuk Beli Pengaruh
di Seluruh Indonesia?**

Jabatan	Tingkatan	Jumlah Jabatan	Biaya Kampanye
Kades	Desa	81.000	Rp.300 juta
Bupati	Kabupaten/Kota	416	Rp.20 miliar
Walikota	Kabupaten/Kota	98	Rp.20 miliar
Gubernur	Provinsi	34	Rp.200 miliar
Presiden	Nasional	1	Rp.5 triliun

Andaikata ada pengusaha yang ingin beli pengaruh dengan memodali biaya kampanye seluruh gubernur dan presiden, ia cukup mengeluarkan Rp. 11,8 triliun 'saja'.

* Angka di atas adalah taksiran penulis

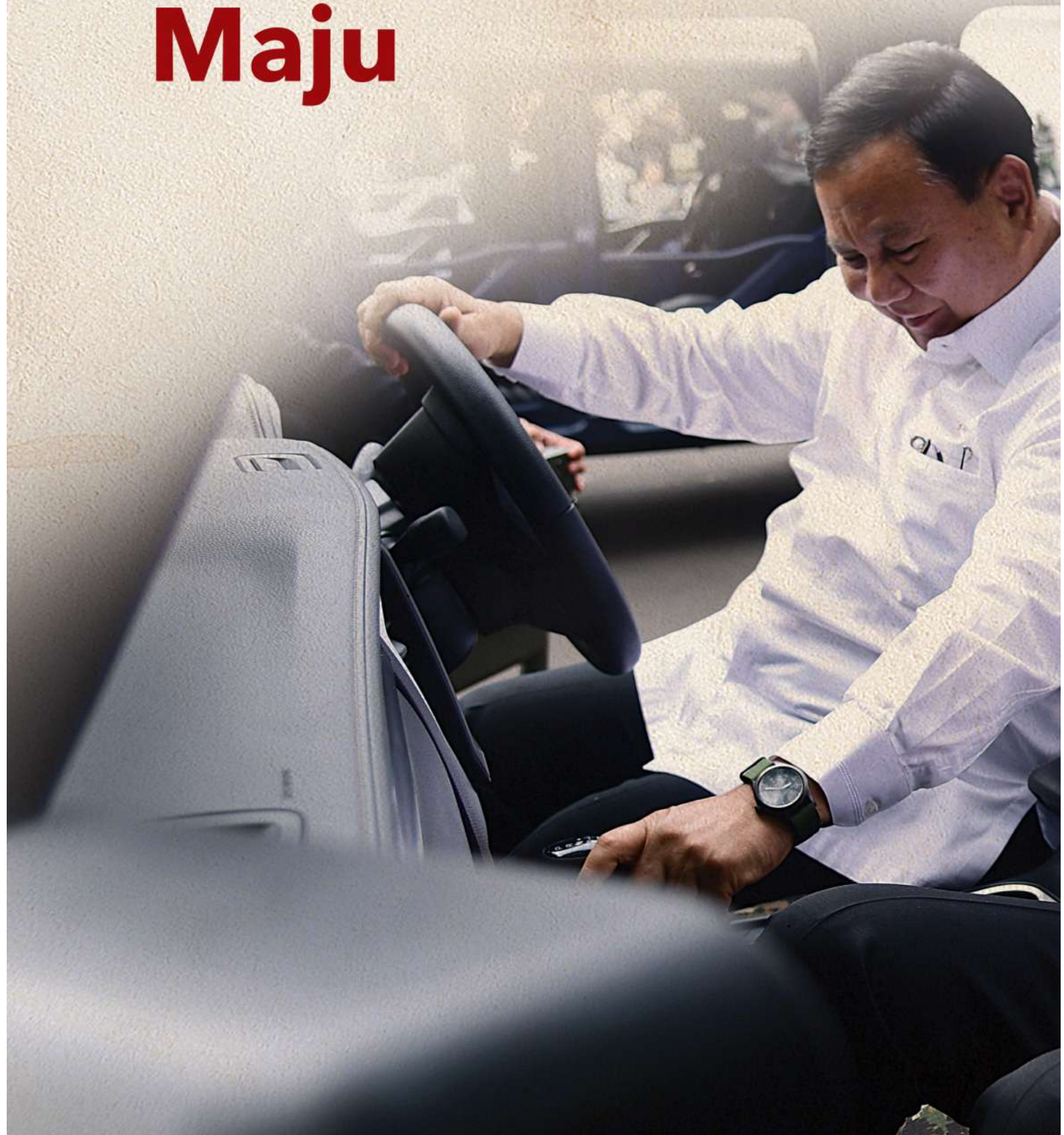
Plesetan NPWP:

Nomor Piro Wani Piro

NPWP, atau 'nomor piro wani piro' marak utamanya karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Karena itu, saat ada kesempatan penulis selalu mengingatkan calon pemilih, 'ambil uangnya, jangan pilih orangnya'.



Fondasi Indonesia Maju





Ekonomi Pancasila

Jika saudara pernah belajar ilmu ekonomi, saudara tentu tahu kalau ada banyak mazhab ekonomi di dunia ini. Ada mazhab ekonomi yang disebut neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal. Ketiga ini sering dikelompokkan sebagai mazhab ekonomi Adam Smith. Kemudian ada mazhab sosialis, atau mazhab ekonomi Karl Marx.

Dalam perjalanan sejarah, ada yang mengatakan, "Indonesia harus memilih A". Ada juga yang bilang, "sebaiknya kita pakai B". Pertentangan ini ada sampai sekarang.

Kalau saya berpendapat, "Lho, kenapa kita harus memilih?". Kita mau ambil yang terbaik dari kapitalisme, dan yang terbaik dari sosialisme.

Gabungan yang terbaik dari keduanya inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh bapak saya Prof. Sumitro, sebagai ekonomi kerakyatan, atau ekonomi Pancasila, yang bentuknya tertulis di Undang-undang Dasar '45, khususnya di pasal 33. Boleh juga kita sebut 'ekonomi Pancasila'.

Relevansi Ekonomi Pancasila

Saya ingin menggugah sekarang, bahwa setelah '98 saya kira kita keliru. Setelah '98, sebagai bangsa, kita melupakan jati diri kita. Kita tinggalkan pasal 33 Undang-undang Dasar '45, kita tinggalkan ekonomi Pancasila.

Di situlah perjuangan saya selama belasan tahun ini. Menggugah, membangkitkan lagi kesadaran, mengingatkan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kaki kita sendiri.

Ini yang saya kira fundamental, dan banyak kita lupakan. Kita percaya globalisasi, kita percaya katanya sekarang sudah tidak ada perbatasan, *borderless world*.

Namun coba Anda mau ke Amerika. Anda tidak bisa masuk tanpa visa. Kadang orang Indonesia tidak dikasih visa. Berarti ada border. Akhir-akhir ini banyak orang mau ke Australia lewat laut kita, namun kapal-kapal perang Australia menahan. Jadi, walau sekarang kita banyak berdagang, *border* tetap ada. Karena itu kita harus punya kekuatan sendiri.

Ingatlah, nasionalisme bukan hal yang jelek. Nasionalisme adalah cinta bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa? Apa kita harus minta dikasihani bangsa lain?

Nasionalisme juga bukan sesuatu yang hina. Semua bangsa membela kepentingan nasional bangsa mereka. Kenapa bangsa Indonesia tidak boleh membela kepentingan kita? Kenapa petani kita tidak boleh dibantu negara?

Contoh, dalam bidang pertanian, petani Amerika dibantu negaranya. Petani Australia dibantu negaranya. Petani Vietnam dibantu negaranya. Petani Thailand dibantu negaranya.

Kalau kita bilang, “kita mau dong, kepentingan nasional kita harus dijaga.” Kadang kita dibilang, “wah, kamu anti asing.” Tidak. Saya katakan, kita tidak boleh anti asing. Dunia sudah semakin sempit, dan tradisi bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Kita bersahabat, tetapi kita harus kuat dan bisa mandiri.

Kemandirian dan kemampuan suatu negara dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri sekarang dapat dinilai dalam sebuah indeks yang dinamakan *index of economic complexity* – indeks kompleksitas ekonomi.

Adalah Professor Ricardo Hausmann dari Harvard University yang juga mantan Menteri Perencanaan Venezuela yang menemukan korelasi sangat kuat antara kesejahteraan sebuah negara dengan kemandirian dan kemampuan suatu negara dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri.

Artinya resep IMF di tahun 1998 yang mematikan banyak industri kita sangat keliru dan harus kita tinggalkan jauh-jauh. Kita harus segera membuat apa-apa yang bisa kita buat di dalam negeri sendiri. Kita harus punya industri kapal, industri mobil, industri pangan, industri sandang, industri senjata, industri segala kebutuhan pokok dan industri-industri pengolahan barang-barang *intermediate*. Dengan ini, kompleksitas ekonomi kita akan meningkat dan Rupiah bisa menguat.

Sosialisme murni, walaupun bagus dalam tulisan, sebenarnya tidak bisa dijalankan. Karena, dalam sosialisme murni, ada asas sama rasa sama rata yang tidak mungkin dijalankan. Jika dijalankan, nanti orang tidak ada yang mau kerja keras.

Ya, dalam sosialisme murni, orang kerja keras dan tidak kerja keras bergaji sama. Orang pintar dan orang tidak pintar bergaji sama. Orang mau belajar dan tidak mau belajar bergaji sama.

Bahkan dalam utopia sosialis, di ujungnya tidak ada uang. Tidak boleh ada uang. Bagaimana? Ini kan utopia. Impian. Susah dilaksanakan, dan terbukti negara-negara yang coba jalankan sistem sosialis murni gagal di mana-mana.

Artinya, bapak-bapak kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir benar. Yang tepat adalah ekonomi campuran.

Bapak saya di meja makan selalu bercerita. Istilah Prof. Sumitro adalah ekonomi campuran, *mixed economy*. Yang terbaik dari kapitalis, dan yang terbaik dari sosialis, ini yang kita pakai.

Kalau kita baca sejarah Indonesia, dulu pernah ada keputusan untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi kita harus berasaskan kekeluargaan. Intinya, yang kuat monggo, tetapi yang lemah harus ditarik. Nanti akan ada suatu *equilibrium*, ada keseimbangan.

Tidak benar, ekonomi yang berasaskan “yang kuat harus selalu menang, yang lemah, ya terserah”. Pahami kapitalisme

murni seperti itu. *Greed is good*, keserakahan bagus. Hasilnya, yang lemah akan mati.

Kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, dan aman, hanya 1% dari penduduk. Bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya.

Ini yang terjadi sekarang di Indonesia, yang juga terjadi di Barat. Di Barat pun sudah banyak yang mempertanyakan. Dulu banyak yang percaya *trickle down effect*. Ekonomi menetes ke bawah. Kenyataannya, yang terjadi adalah *trickle up effect*. Mereka yang kaya, semakin kaya – sementara mereka yang miskin semakin miskin saja.

Kalau kita, yang harus kita jalankan adalah mazhab ekonomi jalan tengah. Mazhab ekonomi campuran, atau kata mantan PM Inggris Tony Blair “ekonomi jalan ketiga”, “*the third way*”. Atau, istilah tahun ‘45, kembali ke Bung Karno, Bung Hatta, mazhab “ekonomi kerakyatan”.

Sekarang kalau kita ke Vietnam, sering terlihat ada mural di pinggir jalan bertuliskan “*economy for the people, not people for the economy*”. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Orientasi kita harus seperti itu.

Kalau sekarang kita ternyata keliru, kita harus berani banting haluan. Kita sekarang harus kembali ke cetak biru yang dibuat

oleh Founding Fathers, Para Pendiri Bangsa kita, yaitu Undang-undang Dasar '45.

Saya katakan demikian, karena di Undang-undang Dasar '45 pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Bahwa ekonomi kita tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan.

Kemudian, ayat 2 dari pasal 33 sangat gamblang lagi. Bahwa semua "cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara". "Menguasai hajat hidup orang" dikuasai oleh negara.

Selanjutnya, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Inilah rancang bangun ekonomi kita. Inilah sistem yang seharusnya kita jalankan – ekonomi Pancasila. Kalau kita konsekuen menjalankan, seperti sekarang Tiongkok konsekuen menjalankan konstitusi mereka, saya kira mengalirnya kekayaan alam kita ke luar, mengalirnya kekayaan nasional kita ke luar yang saat ini terjadi, akan bisa kita hentikan.

Seperti tadi saya sampaikan, ekonomi kita harus ekonomi tengah, ekonomi campuran, ekonomi Pancasila. Jangan full kapitalis, jangan full sosialis.

Kita harus ambil yang terbaik dari kapitalisme. Kapitalisme mendorong inovasi. Kapitalisme mendorong *entrepreneurship* / kewirausahaan, dan mendorong investasi.

Kapitalisme harus diimbangi dengan pengamanan rakyat banyak. Kalau kapitalisme murni, yaitu melepaskan semua hal ke pasar, akibatnya adalah apa yang sekarang kita alami. Di ekonomi bebas, tidak ada perlindungan, tidak ada harapan untuk orang miskin.

Sosialisme menjamin adanya jaring pengamanan untuk orang paling miskin. Pemerintah, pada saat-saat yang kritis memang harus intervensi. Pemerintah negara mana pun yang ingin mengurangi kemiskinan harus menjadi pemerintah yang aktivis, yang berani turun membantu mereka yang di bawah garis kemiskinan, karena mereka tidak berdaya. Jika tidak ada keberpihakan, mereka akan terus tidak punya kemampuan, pendidikan, keterampilan, bahkan gizi saja kurang.

Namun, kita tidak bisa membagi-bagi uang tanpa ada pendidikan, tanpa ada pelatihan, tanpa ada manajemen, tanpa ada pendampingan. Harus ada strategi. Inilah yang dimaksud *nation building*, pembangunan negara. Kalau kita masih di taraf *nation building*, pemerintah harus aktif mengarahkan rakyat.

Kalau pakai paham ekonomi Pancasila, maka soal pembangunan, soal pertanian, soal pembangunan prasarana, soal menciptakan lapangan kerja, dan soal mengurangi kemiskinan, pemerintah harus proaktif. Pemerintah harus jadi pelopor.

Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit.

Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi Pancasila.

Paham neoliberal, paham neoklasikal, mungkin bagus untuk Barat sekarang. Tetapi, kita harus sadar, banyak negara Barat sudah “500 tahun” di depan kita.

Pendapatan per kapita di negara-negara Barat yang maju sudah di atas USD 30.000, USD 40.000, bahkan USD 50.000. Kita baru di kisaran USD 4.000.

Bagi para pengikut paham neoliberal, seperti Milton Friedman, Von Hayek, Thatcher, mereka berpendapat, “*the least government is the best government.*” Semakin sedikit peran pemerintah, semakin bagus. Pemerintah harus di belakang. Pemerintah wasit saja. Pemerintah tidak boleh ikut dalam proses ekonomi.

Kalau kita ikuti paham ini, siapa yang mau bikin waduk? Apakah swasta mau bikin waduk? Siapa mau bikin terminal, siapa mau bikin pelabuhan, terutama di tempat-tempat yang terisolasi?

Swasta tidak akan mau. Jangka waktu balik modal pembangunan infrastruktur terlalu lama untuk swasta. Karena itu sekarang lihat di Indonesia, sebagian besar pembangunan di sekitar Jakarta. Pabrik-pabrik besar adanya di sekitar Jakarta. Siapa swasta yang mau bangun pabrik di Halmahera

atau di Gunung Mas? Karena dari itu, pemerintah harus jadi pelopor ekonomi.

Kita negara besar. Jika ada yang sudah kuat, silakan. Saya kira pemerintah tidak perlu terlibat dalam industri bioskop, umpamanya, atau industri ayam goreng, atau buka kedai kopi. Tapi pemerintah harus mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Untuk mereka, pemerintah harus intervensi dengan berani. Kalau perlu hulu sampai hilir. Anak-anak itu dilatih, diberi keterampilan, dan didampingi sampai mereka bisa produktif.

Ini bukan pekerjaan yang ringan. Untuk petani kita, kalau perlu pemerintah bantu dari benih. "Ini benihnya, ini caranya menanam, ini caranya mengairi, jumlah air segini, jangan terlalu banyak. Ini pupuknya. Nanti panennya begini. Nanti setelah kamu panen, saya beli dari kamu. Saya yang pasarkan, sampai masuk ke supermarket yang paling hebat kualitasnya."

Kalau perlu, Pemerintah yang ambil alih resiko pertanian dari petani, dan jalankan pertanian secara korporasi agar petani dapat sejahtera, dan Pemerintah mendapatkan *economies of scale* dari usaha pertanian skala besar. Skala industri.

Kalau pemerintah tidak bantu, mereka selamanya tidak bisa bersaing karena posisi petani kita saat ini terlalu lemah. Ini argumen saya. Sebetulnya ini bukan argumen yang baru. Banyak negara sudah melaksanakan. Tiongkok, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan India sudah melakukan ini.

Tidak ada cara lain untuk membuat rakyat yang lemah dapat bersaing dan punya harapan. Pemerintah harus membantu.

Apalagi untuk pangan, karena pangan adalah *strategic commodity*. Pangan bukan sekadar *economic commodity*. Pangan adalah *strategic commodity*, komoditas strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sejarah dunia, yang saya pelajari, sejarah antarbangsa, itu kejam. Pimpinan negara asing tidak ada urusan, dia hanya memikirkan kepentingan nasional negara dia.

Tidak ada negara yang akan mengutamakan kepentingan bangsa lain. Ucapannya mungkin beda, mungkin manis, tetapi dia pada akhirnya akan selalu mengutamakan kepentingan dia, kepentingan negaranya.

Karena itu, salah satunya saya selalu katakan bahaya kalau soal makan tergantung impor. Makan tidak boleh tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap bahwa negara-negara asing sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita ke bangsa lain.

“Oh, gampang, kalau kita kurang makan, nanti kita impor dari Vietnam, atau dari Thailand.”

Beberapa tahun yang lalu Thailand sudah bikin kontrak dengan kita, untuk sekian juta ton beras. Namun, Thailand kena musibah banjir. Sawah-sawahnya banjir. terpaksa tidak bisa memenuhi komitmen dia.

Akhir-akhir ini pun, banyak negara menghentikan ekspor pangan karena pandemi COVID 19. Mereka mementingkan pemenuhan pangan di dalam negeri dulu, baru ekspor ke luar.

Semua negara bisa kena bencana alam, bisa perang, bisa pandemi. Thailand pernah banjir, 70% sawahnya banjir, puso. Rusia pernah kebakaran sampai ladang-ladang gandumnya terbakar, tidak bisa ekspor gandum. Harga gandum naik, harga jagung naik, harga beras naik. Dibandingkan dengan angka tahun 2002, indeks harga bahan makanan dunia di bulan November 2020 sudah naik 97%²⁵.

Bayangkan. Ini sudah fenomena, gejala yang sudah kita ingatkan berkali-kali. Perdagangan bebas boleh, tetapi harus dikendalikan Pemerintah, dan harus selalu waspada.

²⁵ Food Price Index, tahun 2002: 53,1. November 2020: 105,0. FAO, 2020

Naskah UUD 1945 Asli

Saya orang yang berpendapat bahwa masalah ekonomi negara tidak terlalu jauh berbeda dengan mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga, dan mengatur perusahaan.

Coba bayangkan kalau kita bekerja, tapi tidak jelas tabungan kita ada di mana? Kan kita jadinya tidak bisa apa-apa? Anda bekerja, umpamanya, tiap bulan. Anda digaji, tapi sebagian dari gaji Anda tidak boleh Anda gunakan, tidak boleh untuk menabung. Maka Anda tidak bisa berbuat banyak.

Pasal 33 Undang-undang Dasar '45 dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk memastikan negara kita punya tabungan yang cukup untuk membangun.

Selama pasal 33 Undang-undang Dasar '45 tidak kita patuhi, selama itu kekayaan kita akan terus mengalir ke luar negeri. Selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain.

Ini yang harus kita ubah. Ini yang harus kita perbaiki. "Bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Itu adalah perintah Undang-undang Dasar '45.

Namun, itu yang banyak elite Indonesia pura-pura tidak baca. Ada juga orang-orang pintar di Indonesia pura-pura tidak tahu tentang Undang-undang Dasar '45. Mereka mengatakan

pasal 33 ini kuno, sudah kedaluwarsa, tidak penting. Sebagian juga mengatakan, “sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi”. Semua serahkan ke pasar. Nanti, yang kaya sedikit, tapi dia akan meneteskan ke bawah kekayaannya. *Trickle down effect*. Netes, netes, netes.

Benar ada yang menetes, tapi mohon maaf, mungkin kita semua sudah mati baru sampai turun ke bawah.

Selain itu, kalau saya bicara UUD 1945 Pasal 33, seringkali saya diledek. Bahkan ada yang mengatakan, “Prabowo bahaya. Prabowo nanti akan nasionalisasi. Semua milik orang kaya akan diambil.”

Anggapan tersebut tidak benar. Yang saya mau adalah, kita besarkan ekonomi kita, dan ekonomi dibagi lebih rata. Jangan 1% yang kuat menguasai semua. Jangan asing menguasai semua. Yang kuat, monggo, maju kamu. Negara angkat yang kurang kuat.

Prinsip saya adalah *live and let live*. Hidup dan jadikan orang lain hidup. Jangan *live for yourself*. Jangan *zero sum game*. Jangan *I win, you lose*.

Prinsip saya, saya menang, kamu juga menang. Kita menang. *Win-win*, itu yang saya mau, dan itu prinsip yang terkandung di UUD 1945 Pasal 33, Ayat 1 hingga Ayat 3.

Pasal 33 sangat jelas. Ayat 1. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Jadi, ini dasar. Kita tidak boleh punya pendapat yang kuat tambah kuat, yang tidak kuat terserah. Pendapat seperti itu bukan Pancasila, bukan cita-cita pendiri bangsa kita.

Sesuai Ayat 1, yang ekonominya kuat harus tarik yang lemah. Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit. Pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan negara. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar '45.

Ayat 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Ini perintah konstitusi Republik Indonesia.

Ayat 3, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-undang Dasar kita.

Saat ini, elite Indonesia banyak meninggalkan nilai-nilai Undang-undang Dasar '45. Meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dipakai di mulut, tetapi tidak dijalankan. Ini dimungkinkan oleh amandemen UUD 1945 yang telah menambahkan Ayat 4 dan Ayat 5 di Pasal 33. Ayat 4, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi", yang sesungguhnya bertabrakan

dengan Ayat 1 hingga Ayat 3 karena menjadikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi bermazhab pasar bebas.

Karena itulah, saya percaya, kalau kita benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, kita harus lihat sumber penyakit kita apa, dan kita harus perbaiki sumber penyakit itu. *Root cause*, atau akar permasalahan ekonomi kita ada di Pasal 33 yang telah diganti dan tidak dijalankan sepenuh hati.

Untuk memperbaikinya, kita harus kembalikan konstitusi kita ke naskah aslinya, versi 18 Agustus 1945. Dengan demikian ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh rakyat Indonesia, dan negara akan punya tabungan untuk membangun.

Dengan demikian, para pimpinan, para tokoh politik yang sekarang hadir di tengah rakyat, bisa berhenti jadi pemimpi. Bisa berhenti jadi 'pejuang akan'. Akan ini, akan itu, tapi tidak bisa berbuat banyak karena uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, akan ada banyak yang mereka bisa perbuat untuk Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33



Teks Awal, 18 Agustus 1945

Ayat 1:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat 3:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tambahan 2 Ayat Saat Amandemen 11 Agustus 2002

Ayat 4:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jokowinomics Adalah Ekonomi Pancasila

Setelah bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo di Oktober 2019, saya mendapat kesempatan untuk menyimak dan bekerja langsung dengan Presiden Jokowi.

Pengalaman saya bekerja dengan Presiden Jokowi selama 4 tahun ini membuat saya berkesimpulan apa-apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebenarnya pelaksanaan dari falsafah Ekonomi Pancasila.

Sebagai contoh, soal jaring pengaman sosial atau *social safety net*. Presiden Jokowi sangat amat memperhatikan dan setiap minggu cek langsung ke lapangan bagaimana organ-organ pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin, masyarakat yang paling rentan.

Saya lihat jadwal Presiden Jokowi, hampir tidak ada satu minggu pun yang beliau tidak turun ke pasar, turun ke masyarakat untuk pastikan harga-harga sembako stabil dan program-program Pemerintah untuk ringankan beban hidup masyarakat benar-benar terasa.

Di masa Presiden Jokowi, pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Sehat yaitu pembayaran iuran BPJS bagi 96 juta masyarakat yang tidak mampu. Total seluruh peserta BPJS sudah mencapai 248 juta orang. Ini mungkin adalah program *universal health coverage* terbesar di dunia.

Dengan Kartu Indonesia Sehat, di tahun 2022 saja fasilitas kesehatan kita baik itu rumah sakit dan puskesmas menangani lebih dari 236 juta kunjungan secara gratis. Sekarang rakyat dengan penghasilan pas-pasan, dan yang tidak memiliki kepastian penghasilan, tidak perlu takut pergi ke dokter saat sakit.

Pemerintah juga sekarang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kedua program ini memperkuat penyediaan pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP yang telah terlaksana di seluruh Indonesia, serta pendidikan gratis di tingkat SMA yang sudah terlaksana di sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Kartu Indonesia Pintar, lebih dari 17 juta siswa dan 2 juta siswa sekolah agama mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Anak orang miskin dan orang mampu bisa pergi ke sekolah dengan seragam yang sama, dengan alat tulis yang sama. Kesenjangan ekonomi orang tua bisa ditekan.

Presiden Jokowi juga punya Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Masyarakat paling rentan terhadap fluktuasi harga-harga dibantu dengan kiriman langsung beras ke rumah. Keluarga yang tidak mampu dibantu dengan bantuan langsung tunai (BLT).

Jika paham ekonomi Presiden Jokowi bukan Ekonomi Pancasila, maka program-program jaring pengaman sosial seperti ini tidak akan ada. Pemerintah akan diam saja. Semua diminta mandiri. Tapi kan tidak begitu. Pemerintah era Presiden Jokowi turun bantu yang harus dibantu.

Selain itu, Presiden Jokowi juga rutin turun langsung pastikan hilirisasi dan industrialisasi berjalan dengan baik. Beliau cek sendiri pembangunan smelter, pembangunan pabrik pengolahan, dan pelarangan impor bahan mentah ke luar negeri.

Presiden Jokowi juga tidak gentar menghadapi tuntutan agar Indonesia tetap mengizinkan ekspor bahan mentah di World Trade Organization (WTO). Beliau bahkan mengatakan, biar saja kita dituntut, kita akan banding, dan terus perjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Kebijakan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor nikel mentah dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit, tembaga dan timah. Bahan-bahan ini dibutuhkan oleh dunia untuk produksi baja, baterai, mobil listrik, dan berbagai elektronik.

Selama ini kita membiarkan sumber daya alam kita diekspor mentah ke luar negeri. Akhirnya yang menikmati nilai tambahnya negara lain. Padahal jika diolah di dalam negeri, kita bisa membuka lapangan kerja berkualitas yang sangat banyak. Pendapatan negara pun meningkat dari pajak, royalti, dan pendapatan bukan pajak.

Keberanian Presiden Jokowi untuk melarang ekspor bahan mentah sejalan dengan Pasal 33, UUD 1945. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya:

Ayat 3, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

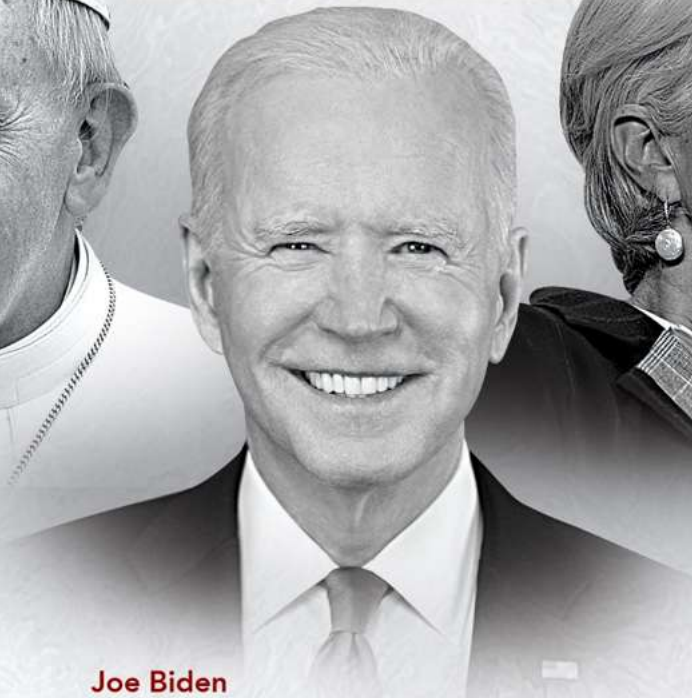
Ini bukan maunya Presiden Jokowi. Ini perintah Undang-undang Dasar kita yang dijalankan secara konsekuen oleh Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang saya sebut sebagai "Jokowinomics" adalah sebenarnya pelaksanaan dari Ekonomi Pancasila. Ini harus kita lanjutkan secara konsekuen untuk Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera.

Mazhab Ekonomi Menetes ke Bawah?



Paus Francis



Joe Biden



Christine Lagarde

"Beberapa orang masih saja membela teori 'menetes ke bawah'. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah "kita tidak boleh membunuh", sekarang kita harus mengatakan "kita tidak boleh menjalankan" kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil."

Paus Francis, 23 November 2013

"Sistem ekonomi 'menetes ke bawah' meningkatkan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah."

Direktur IMF Christine Lagarde, 23 Juni 2015

"Paham ekonomi menetes ke bawah tidak pernah bekerja. Orang kaya semakin kaya. Sekarang waktunya membangun ekonomi dari bawah."

Joe Biden, 29 April 2021

Resep Keliru IMF Tahun 1998



Tidak Boleh Punya Industri

Dukungan pemerintah kepada industri-industri strategis seperti industri agro, dan pengembangan industri penerbangan (IPTN) harus dihentikan.

Serahkan Rupiah ke Pasar

Nilai tukar rupiah harus seluruhnya diserahkan ke pergerakan pasar, BUMN harus dijual dan lajur perdagangan luar negeri harus dibuka lebar.

Sumber: MoU / Kesepakatan Indonesia & IMF, 1998

Fondasi Ekonomi dari Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo dan Pemerintahan yang beliau pimpin sejak 2014 telah melaksanakan berbagai program yang menghasilkan fondasi ekonomi dan sosial yang sangat kuat.

Capaian-capaian beliau melanjutkan dan memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin negara kita mulai dari Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk menyusun program ke depan yang tepat, kita perlu benar-benar paham apa saja yang telah dicapai oleh beliau, agar kita bisa lanjutkan program-program yang sudah baik, dan kembangkan program-program yang perlu dikembangkan.

Capaian Ekonomi

Begitu banyak yang telah dicapai oleh Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Misalkan, dalam hal pencapaian ekonomi, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PDB per kapita bangsa Indonesia naik hampir 4x dari \$ 1.000 ke \$ 3.700.

Di era Presiden SBY, rasio utang terhadap PDB turun dari di atas 50% ke bawah 30%. Rasio utang ini sempat cukup tinggi karena negara kita terpaksa berutang banyak demi menyelesaikan krisis moneter 1998. Di era Presiden SBY juga kita melunasi seluruh utang kita ke IMF.

Walaupun sempat ada bencana tsunami dan krisis ekonomi 2008, di era Presiden SBY ekonomi Indonesia berhasil tumbuh rata-rata 5%. Ekonomi Indonesia-pun berhasil masuk ranking 20 besar dunia, dan masuk jadi anggota G20.

Capaian-capaian ekonomi era Presiden SBY ini dilanjutkan dan diperkuat di era Presiden Jokowi. Di 2022, PDB nominal atau besaran ekonomi kita mencapai angka US\$ 1,4 triliun. Ini setara Rp. 21.000 triliun - angka tertinggi sepanjang sejarah. Ekonomi Indonesia jadi nomor 16 terbesar di dunia.

Angka GNI per kapita juga naik ke angka US\$ 4.580 atau setara Rp. 68,7 juta - tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah penduduk miskin turun ke 9,57% - terendah sepanjang sejarah.

Dalam bab-bab sebelumnya saya jelaskan, perdagangan bagi suatu negara adalah ibarat darah. Jika neraca dagang terus menerus negatif, maka suatu saat darah-nya akan habis. Oleh

karena itu neraca dagang harus positif. Di 2014, saat Presiden Jokowi baru mulai menjabat neraca dagang kita negatif. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat, di tengah masa bakti Presiden Jokowi neraca dagang mulai surplus. Bahkan di 2022, neraca dagang kita berhasil surplus \$ 54,4 miliar, setara Rp. 816 triliun - terbanyak sepanjang sejarah kita.

Karena neraca dagang kita positif, cadangan devisa kita juga semakin kuat. Di 2022, cadangan devisa kita mencapai \$ 137 miliar, setara Rp. 2.055 triliun. Cadangan ini cukup untuk membiayai impor selama 6 bulan. Dengan cadangan devisa yang besar kita juga bisa jaga stabilitas nilai tukar Rupiah kita.

Pertumbuhan ekonomi kita di era Presiden Jokowi juga cukup baik dan stabil di angka 5%. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita kedua tercepat di negara-negara G20 setelah Tiongkok.

Tingkat inflasi kita juga terjaga di angka 3,3%. Inflasi ini penting, karena tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika inflasinya lebih tinggi. Saat ini inflasi kita salah satu yang paling rendah dari negara-negara G20. Dengan manajemen ekonomi yang baik dan kebijakan yang tepat, kita bisa hindari inflasi berlebih seperti yang terjadi di Argentina dan Turki saat ini, inflasi puluhan persen.

Pertumbuhan ekonomi butuh modal kerja dan investasi. Salah satu sumber investasi adalah Pemerintah. Walaupun di era Presiden Jokowi terjadi defisit APBN dan pemerintah harus mencetak utang, rasio utang terhadap PDB kita saat ini di angka 38% adalah salah satu terendah di G20.

Pembangunan Infrastruktur

Salah satu keberhasilan Presiden Jokowi yang paling terlihat adalah pembangunan infrastruktur. Saya sendiri merasakan dan menikmati berbagai pembangunan yang beliau kawal sendiri dari Sabang sampai Merauke.

Dalam 8 tahun Pemerintahan Jokowi, telah terbangun lebih dari 320.000 km jalan desa. Jalan adalah infrastruktur yang sangat mendasar, yang sangat bermanfaat untuk rakyat di desa-desa.

Pembangunan desa secara besar-besaran ini dimungkinkan dengan adanya alokasi Dana Desa yang dikirimkan langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa.

Mungkin foto-foto pembangunan desa tidak ramai diberitakan di media, tapi inilah contoh pembangunan infrastruktur yang tepat dan bermanfaat.

Selain itu kita juga sekarang bisa merasakan tersambungannya pulau Jawa dengan jalan tol yang mengurai kemacetan di jalan-jalan nasional. Kita juga bisa merasakan terbukanya akses-akses baru di Sumatera dengan jalan tol trans-Sumatera. Total sudah lebih dari 2.000 km jalan tol dan lebih dari 1,7 juta meter jembatan terbangun di era Presiden Jokowi.

Selain itu juga telah terbangun 1.502 pelabuhan baru, 50 bandara baru, dan berbagai infrastruktur kunci lainnya yang menyambungkan nusantara.

Pembangunan Indonesia Periode 2014-2022

Tol Beroperasi (Km)

Sumber: Kementerian PUPR



Pembangkit Listrik (GW)

Sumber: BPS



Jalan Umum (Ribu Km)

Sumber: BPS



Kapasitas Bendungan (Miliar M³)

Sumber: Kementerian PUPR



Bandara (Unit)

Sumber: Kementerian PUPR



Pelabuhan (Unit)

Sumber: Kementerian PUPR



Peningkatan Ekonomi

GNI per Kapita (US\$)



710 → **4.580**
(2001) (2022)

Penurunan Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan



17,75 → **9,57**
(2006) (2022)

Pemerataan Pembangunan

Rasio Gini



0,414 → **0,381**
(2014) (2022)

Perkuatan Reformasi Birokrasi

Peringkat EODB



103 → **73**
(2015) (2020)

Perkuatan Program Kesejahteraan Sosial

Prevalensi Stunting (%)



29,0 → **21,6**
(2015) (2022)

Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Nikel)

Ekspor (HS 75) Nikel (US\$)



800 → **6**
Juta → **Miliar**
(2015) (2022)

Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas

Wisatawan Mancanegara
(Juta Kunjungan)



9,44 → **16,11**
(2014) (2019)

Penerapan Kebijakan BBM Satu Harga

Mengurangi perbedaan harga di seluruh Indonesia



Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Mengurangi ketimpangan KBI dan KTI



Contoh Implementasi Ekonomi Pancasila oleh Presiden Joko Widodo

Nama Program

Penjelasan Program

**Kartu Indonesia Sehat,
i.e.. Penerima Bantuan
Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (PBI
JKN / JKN KIS)**

- Total peserta JKN 248 juta orang, aktif 204 juta orang
- Peserta bantuan iuran (JKN KIS) 96,8 juta orang
- Iuran kelas 3 setara Rp. 42.000 per bulan
- Peserta JKN KIS dapat pelayanan kesehatan kelas 3 gratis
- Peserta JKN KIS kunjungi faskes 236 juta kunjungan di 2022

**Kartu Indonesia Pintar,
i.e. Program Indonesia
Pintar (PIP / KIP)**

- Peserta KIP 17,9 juta siswa + 2,2 juta siswa sekolah agama
- Peserta KIP Kuliah 908 ribu mahasiswa reguler + 67,8 ribu mahasiswa agama
- Bantuan tunai 1 kali per tahun dengan besaran:
 - o SD: Rp. 225 ribu - Rp. 450 ribu
 - o SMP: Rp. 375 ribu - Rp. 750 ribu
 - o SMA dan SMK: Rp. 500 ribu - Rp. 1 juta
- Peserta dari KPM Kemensos, atau ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau terkena musibah atau di 3T

**Kartu Sembako, i.e.
Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT)**

- Peserta 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Bantuan 10 kg beras per bulan untuk 6 bulan

**Program Keluarga
Harapan (PKH)**

- Peserta 9,8 - 10 juta KPM
- Nominal bantuan Rp. 200 ribu - Rp. 1 juta per tahun

Jaring Pengaman Sosial

Dalam hal *social safety net* atau jaring pengaman sosial, pencapaian Presiden Jokowi juga luar biasa. Di bab soal Ekonomi Pancasila saya menjelaskan bahwa paham ekonomi Presiden Jokowi adalah Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berkeadilan sosial.

Paham ini diwujudkan dalam berbagai program jaring pengaman sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan berbagai program lainnya. Dengan basis data yang tepat, program-program ini telah membantu kehidupan hampir seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan Pemerintah.

Bahkan, di era Presiden Jokowi, ada BLT dana desa. Dengan program ini, kehidupan keluarga miskin / miskin ekstrim, keluarga dengan anggota yang sakit kronis / menahun, keluarga lanjut usia tinggal sendiri, dan keluarga dengan anggota yang difabel dibantu oleh Pemerintah.

Potensi Negara Kita

Saya mengikuti proses politik, karena hanya melalui politik kita bisa mengubah keadaan dengan signifikan. Politik bagi saya adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat.

Walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, saya melihat Indonesia masih ada harapan. Kekayaan alam kita begitu luar biasa. Kita juga punya modal populasi muda produktif yang mayoritas. Lokasi kita sangat strategis. Pasar dalam negeri kita sangat besar.

Dengan manajemen potensi yang tepat, saya percaya kita bisa wujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita. Indonesia yang kuat, maju, dan makmur.

Cadangan Sumber Daya Alam

Bangsa kita diberi kekayaan luar biasa oleh Allah SWT. Sebagai contoh, kita punya cukup banyak air untuk produksi makanan kita sendiri. Tanpa air yang cukup tidak mungkin kita bisa produksi 30 juta ton lebih beras untuk makan kita sehari-hari. Tanpa air yang cukup kita tidak bisa produksi cabai, gula, daging, sayuran, dan bahan-bahan pokok lainnya.

Walau demikian, jika tidak dikelola dengan baik, air yang cukup ini bisa jadi tidak cukup di beberapa daerah, atau berlebihan di daerah lain. Karena itu pemerintah harus dan telah bangun waduk-waduk, kanal-kanal, saluran-saluran, agar semua yang perlu air bisa mendapatkan air.

Selain untuk minum dan untuk keperluan pertanian, peternakan, perikanan, air juga bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Bahkan saya dapat data dari ahli-ahli di Kemenkomarves, potensi pembangkitan listrik dari air dan sumber energi terbarukan mencapai 437 Giga Watt (GW).

Sebagai perbandingan, saat ini total seluruh pembangkit listrik di Indonesia adalah 81 GW. 437 GW adalah 5x lebih besar. Ini artinya kalau kita mau dan kita bisa mengaturnya, seluruh kebutuhan listrik kita bisa dari sumber energi terbarukan.

Selain itu, menurut para ahli ekonomi dan ahli listrik, setiap pertumbuhan ekonomi 1% butuh tambahan listrik 1,1%. Artinya potensi sumber daya listrik kita dari energi terbarukan sebenarnya cukup untuk mendukung ekonomi kita tumbuh hingga 5x dari angka sekarang.

Selain air, kita juga punya cadangan mineral di dalam bumi Indonesia yang luar biasa. Kita punya timah, bauksit, tembaga, dan berbagai mineral lainnya.

Bahkan sebagian dari cadangan mineral kita adalah yang terbesar di dunia. Cadangan nikel kita terbesar di dunia. Cadangan timah kita terbesar ke-2 dunia. Cadangan bauksit kita terbesar ke-6 dunia. Cadangan tembaga kita terbesar ke-7 dunia.

Jika kita kelola cadangan mineral kita dengan baik, kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang signifikan. Penerimaan itu bisa digunakan untuk program-program kesejahteraan sosial.

Misalkan, sejak 1 Januari 2020, Presiden Jokowi telah larang ekspor nikel mentah atau bahan baku. Kalau diolah di dalam negeri, pendapatan kita dari nikel bisa naik 67x dari menjual nikel mentah.

Di tahun 2014, ekspor nikel dan produk turunan nikel negara kita hanya \$ 2,9 miliar atau sekitar Rp. 43 triliun. Tahun lalu, tahun 2022, ekspor produk turunan nikel kita sudah \$ 34,2 miliar atau setara Rp. 513 triliun. Karena kebijakan tepat Presiden Jokowi, penghasilan negara kita dari nikel sudah naik 11x. Padahal ini belum seberapa. Saya akan paparkan detailnya di bab tentang kebijakan kita ke depan.

Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia

Cadangan Nikel terbesar di dunia



Cadangan Timah terbesar ke-2 dunia



Cadangan Bauksit terbesar ke-6 dunia



Cadangan Tembaga terbesar ke-7 dunia



Potensi EBT 437 GW



Potensi produksi perikanan tangkap lestari 12 juta ton per tahun



Potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun



Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya alam yang melimpah, negara kita juga diberkahi dengan jumlah populasi yang banyak dan saat ini sebagian besar di usia produktif.

Bahkan, usia median rakyat Indonesia per tahun 2022 lalu adalah 29 tahun. Artinya, mayoritas orang Indonesia adalah anak muda yang energik dan produktif.

Kita juga diberkahi dengan budaya kita yang menjunjung tinggi institusi pernikahan dan keluarga. Saat pertumbuhan penduduk negara-negara lain sudah di bawah 1%, pertumbuhan penduduk kita saat ini masih di atas 1% per tahun - tepatnya di 1,08% per tahun.

Artinya kalau di negara kita ada 280 juta orang, setiap tahun kita tambah 1,08% atau tambah 3 juta manusia baru. 3 juta ini setara dengan melahirkan 3 kota Bogor setiap tahun.

Walau demikian, seperti di negara-negara lain, semakin sejahtera suatu bangsa, biasanya semakin turun laju pertumbuhan penduduknya. Menurut Bappenas, laju pertumbuhan penduduk kita akan turun ke 0,43% di 2045.

Ini artinya walaupun kita sekarang punya banyak penduduk, dan sebagian besar penduduk kita anak muda produktif, waktu kita tidak banyak. Kita harus dapat segera memanfaatkan potensi sumber daya manusia kita sebelum kita jadi bangsa yang sebagian besar penduduknya orang tua seperti Jepang pada hari ini.

Kekayaan Sumber Daya Manusia Indonesia

Pada tahun 2045 populasi Indonesia sekitar 324 juta dan menempati posisi 6 dunia



Lokasi Strategis Indonesia

Selain diberkahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk kita jadi negara maju, Indonesia juga diberkahi posisi yang sangat strategis.

Karena posisi kita di antara Asia Timur (Tiongkok, Jepang), Asia Selatan (India) dan Oseania (Australia), sekitar 45% sampai 60% perdagangan barang di dunia yang dikirimkan dengan kapal harus melalui laut Indonesia.

Selat Malaka adalah salah satu selat dengan lalu lintas kapal angkut terpadat di dunia. Selat Jawa, selat Bali dan selat Lombok juga tidak kalah penting karena menghubungkan Asia Timur dan Oseania.

Hampir seluruh komoditas dagang dunia dikirimkan melalui laut. Artinya, seharusnya kalau kita mau jadi negara eksportir yang kuat, lokasi kita sudah sangat mendukung.

Kita juga bisa jadi lokasi penghubung atau hub yang sangat baik untuk kargo laut yang menghubungkan dunia. Inilah yang dilakukan oleh Singapura. Kita juga harus bisa lakukan hal yang sama. Pelabuhan-pelabuhan kita juga bisa hebat, efisien dan bisa diandalkan.

Lokasi Indonesia Sangat Strategis



**45%
Perdagangan
Barang di
Dunia
Dikapalkan
Melalui Laut
Indonesia**

**Terletak di
sepanjang jalur
laut utama yang
menghubungkan
Asia Timur, Asia
Selatan, dan
Oseania**

Penjelasan Gambar : Lajur merah adalah alur logistik energi dari Asia Selatan ke Asia Timur dan Oseania

Produksi Unggulan Bangsa Indonesia

Pangan adalah masalah hidup-mati suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong, dan sebagainya.

Jadi, kita sebagai bangsa harus memandang pangan ini strategis. Siapa pun yang mau memimpin negara ini, harus memandang pangan ini sangat strategis. Dari dulu saya anjurkan ke pemerintah, ke penguasa, ke partai-partai yang sedang berkuasa, untuk fokus kembangkan sektor pertanian. Jangan kita tergantung pada impor pangan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada siapa pun. Kalau kita tergantung impor, begitu mata uang kita melemah, akan sangat mahal beli barang impor dan rakyat bisa tidak makan.

Kita punya lahan cukup banyak, kita punya ekosistem dan iklim yang sangat cocok untuk pertanian. Yang jelas kita ini negara tropis. Indonesia menempati sepertiga dari zona tropis dunia. Kita negara yang zona tropisnya paling luas kedua setelah Brasil. Brasil lebih luas dari kita sedikit.

Di zona tropis, kita bisa tiga kali panen setahun. Kalau negara-negara *temperate*, negara-negara yang non-tropis, hanya bisa satu kali. Karena ada enam bulan musim dingin, jadi hanya bisa satu kali panen. Kita bisa tiga kali. Ini keunggulan kita.

Sebagai contoh, sebuah pohon yang tumbuh di negara *temperate* butuh 25 tahun untuk besar. Baru bisa ditebang setelah 25 tahun. Bahkan ada yang baru bisa ditebang setelah

27, 30 tahun. Di negara kita, 5 tahun bisa ditebang. Jadi, keunggulan kita, 5 kali dari negara di luar zona tropis.

Dari dulu, bangsa-bangsa lain datang ke kita, dan mengambil kekayaan kita. Apa yang diambil? Mereka ambil produk-produk pertanian. Rempah, karet, teh, kopi kita. Kan begitu?

Kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Kita harus memanfaatkan keunggulan ini. Ketahanan dan kekuatan ekonomi kita berada di sektor pertanian dalam arti luas. Pertanian, perikanan, kehutanan. Inilah yang seharusnya kita fokus kelola dengan telaten, dengan teliti, dengan komprehensif. Tidak kita serahkan semua ke pasar.

Selain pertanian, kita juga punya potensi sumber daya mineral. Soal potensi ini saya pernah diskusi dengan Presiden Jokowi, beliau bilang ke saya: "Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin kita jadi negara maju. Tidak mungkin kita jadi negara makmur".

Selain cadangan mineral, kita juga punya potensi produksi pertanian dan perikanan yang besar. Ahli-ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan menghitung kita punya potensi produksi perikanan tangkap lestari 12 juta ton per tahun. Dengan laut Indonesia yang luas, kita juga punya potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun.

Saat ini konsumsi protein rakyat Indonesia 62 gram per kapita per hari. Artinya kalau ada 280 juta penduduk Indonesia, dan dikali 365 hari, bangsa kita butuh protein 6,3 juta ton per tahun. Dari potensi perikanan tangkap saja harusnya sudah bisa terpenuhi.

Situasi Pertanian Indonesia Saat Ini



1 dari 5 di Sektor Agrikultur

1 dari 5 orang Indonesia bekerja di sektor agrikultur. 20% dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor ini.

* Kementan, 2020

Situasi **Sekarang** vs **Seharusnya**

Tahapan	Dikerjakan Oleh	Nilai Tambah Untuk	Dikerjakan Oleh	Nilai Tambah Untuk
Pertanian	Petani	Petani	Petani	Petani dan Rakyat Kecil
Pengolahan	Perusahaan Swasta	Pengusaha Bermodal Besar	Koperasi, BUMDES & BUMN	
Pengepakan			"Gerai Tani"	
Pendistribusian				
Penjualan	Supermarket			

14 Juta Hektar Menganggur

Menurut KLHK, ada 34 juta hektar kawasan hutan tak berhutan. Dari 34 juta hektar, 14 juta hektar adalah lahan tidak produktif (belukar) dan tidak bertuan.

* Kementerian LHK, 2017

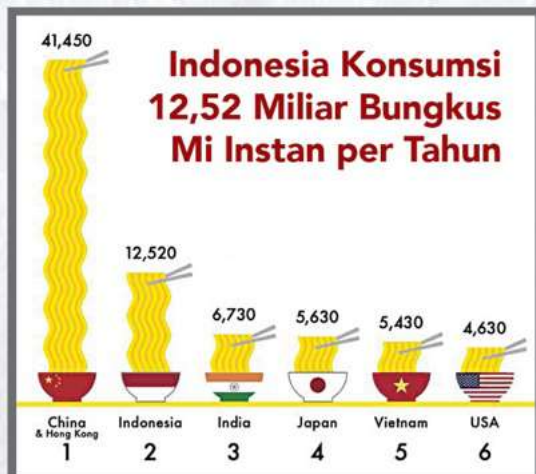


Singkong dan Tepung Singkong

Sudah waktunya Indonesia memiliki produk agro industri unggulan



Namun bahan baku mi kita impor dari luar negeri, rata-rata jumlah impor USD 2,5 miliar atau Rp. 35 triliun per tahun. Indonesia saat ini adalah pemakan mi terbesar kedua di dunia.



Produksi dan Konsumsi Tepung Terigu di Indonesia



Bangsa kita memiliki keunggulan dalam budidaya singkong, dan memiliki paten Modified Cassava Flour (MOCAP) yang dapat menggantikan tepung terigu sebagai bahan baku mi setidaknya hingga 40%.

Pasar Domestik Yang Besar

Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, dan jumlah 'kelas menengah' 20% populasi atau sekitar 50 juta orang ²⁶, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan menarik.

Dengan jumlah yang demikian besar, sebenarnya hampir semua industri bisa berkembang pesat walau hanya menjual produk dan jasanya untuk pasar Indonesia. Misalkan, setiap orang Indonesia butuh pakaian. Jika 50 juta orang membeli satu saja celana setiap tahun, dan jika harga celana Rp. 100.000 saja, ini sudah bisnis Rp. 5 triliun. Jika bisa untung 10%, ada keuntungan Rp. 500 miliar. Ini baru celana saja. Belum bicara pakaian lain.

Saking besarnya pasar domestik Indonesia, kita bisa melihat bagaimana saat ini banyak perusahaan asing berlomba-lomba untuk masuk dan jual produk mereka di pasar kita.

Bahkan, dari PDB Indonesia tahun 2022 yang mencapai USD 1,3 milyar atau sekitar Rp. 19.588 triliun, konsumsi rumah tangga mencapai 52% atau sekitar Rp. 10.100 triliun. Bandingkan dengan konsumsi Pemerintah yang hanya menyumbang 9% PDB Indonesia, dan ekspor yang baru 25% dari PDB Indonesia.

Ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Berita baiknya, peluang untuk peningkatan konsumsi rumah tangga ini sangat besar. Misalkan, saya perhatikan, konsumsi protein per kapita kita

²⁶ Bank Dunia, 2020

masih jauh di bawah negara-negara maju. Konsumsi listrik per kapita kita juga masih rendah dari negara-negara lain.

Jika kita perbaiki gizi, dan perbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan peningkatan protein dan listrik saja, maka sudah secara signifikan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga - dan PDB Indonesia.

Tentu agar kita maksimalkan peluang ini, peningkatan konsumsi protein haruslah dari protein yang kita produksi di dalam negeri. Dari peternak sapi perah Indonesia. Dari peternak telur Indonesia. Dari pembudi daya ikan Indonesia. Dari nelayan Indonesia. Dari petani Indonesia.

Pembangunan pembangkit listrik juga harus sebisa mungkin dari sumber terbarukan dan menggunakan alat-alat, mesin-mesin, dan ahli-ahli Indonesia.

Saya tidak anti asing. Mereka boleh menjual produk dan jasa di Indonesia. Tetapi kita harus bisa bersaing dengan mereka. Jika jual celana, Pemerintah harus pastikan orang Indonesia juga bersaing jual celana. Jangan sampai pasar dimonopoli oleh kekuatan ekonomi besar.

Saya percaya, kualitas produk-produk Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan produk asing. Saat ini kita sudah punya sepeda buatan Indonesia. Kita sudah bisa buat kapal laut buatan Indonesia. Senjata buatan Indonesia. Mobil jeep buatan Indonesia, buatan insinyur Indonesia. Bahkan senjata buatan PINDAD kerap unggul di kompetisi internasional. Ini bukti konkrit kemampuan industri kita yang harus diberi kesempatan berkembang.

Strategi Percepatan Pembangunan





Program Hasil Terbaik Cepat

Alhamdulillah, dalam hidup saya, saya berkesempatan jadi saksi dan belajar langsung kiat-kiat pembangunan bangsa dari Presiden Suharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Dari para Presiden yang telah pimpin pembangunan bangsa, saya menyimpulkan kalau kita perlu program-program yang konkrit, program-program yang langsung menyentuh akar masalah.

Seringkali di Indonesia, masalahnya bukan di konsep atau gagasan, tapi di implementasinya. Karena itu, untuk beberapa program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk bangsa ini bisa *take off* jadi bangsa maju dan makmur, perlu ada pengawalan langsung dari pimpinan tertinggi negara.

Saya saksi bagaimana pengawalan langsung program-program pembangunan utama dilakukan oleh Presiden Suharto dengan memiliki Sesdalobang (Sekretaris Pengendalian Pembangunan), oleh Presiden SBY dengan memiliki UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan oleh Presiden Jokowi dengan KSP (Kantor Staf Presiden) serta instrumen lainnya.

Namun tidak jarang bahkan bisa dikatakan rutin Presiden Suharto, Presiden SBY, Presiden Jokowi langsung turun ke lapangan untuk cek pelaksanaan program-program unggulan pembangunan.

Karena waktu Presiden dan Wakil Presiden terbatas, perlu ada prioritas apa saja program-program unggulan yang harus bisa langsung oleh pimpinan tertinggi negara Indonesia.

Karena fokus utama dalam beberapa tahun ke depan haruslah di pembangunan manusia Indonesia, maka harus ada usaha ekstra untuk memastikan anak-anak Indonesia cukup gizi, sehat dan bisa mendapatkan ilmu dengan baik.

Kita juga harus bisa berantas kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrim harus segera turun ke 0%. Artinya program-program jaring pengaman sosial harus kita perkuat.

Setelah diskusi panjang dengan banyak ahli, berikut adalah delapan program unggulan yang saya percaya harus kita laksanakan dengan baik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Program-program ini saya namai "Program Hasil Terbaik Cepat" karena akan menghasilkan hasil yang dibutuhkan oleh bangsa kita dengan cepat.

Program Hasil Terbaik Cepat 1:

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

Stunting (tengkes) atau gagal tumbuh sesuai kurva pertumbuhan normal adalah masalah mendesak yang harus segera ditangani secara langsung oleh pemerintah. Jika ada anak Indonesia yang *stunted*, maka sulit baginya untuk bisa cemerlang di usia produktif.

Di era Presiden Jokowi, pengawalan program stunting dilakukan secara langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saat ini angka stunting nasional sudah turun dari 37% di 2014 ke 21% di 2022. Penurunan 16% dalam 8 tahun adalah pencapaian yang cukup baik.

Di bawah pengawasan langsung Wakil Presiden, telah terlaksana pemberian bantuan nutrisi langsung ke keluarga rawan stunting (KRS) yang totalnya sekarang 21 juta keluarga. Misalkan di tahun 2023 ini ada pemberian ayam dan telur ke keluarga rawan stunting di provinsi-provinsi dengan jumlah keluarga rawan stunting tertinggi.

Namun angka 21% stunting masih terlalu tinggi. Jika populasi muda Indonesia ada 100 juta orang, artinya 21 juta orang gagal tumbuh. Artinya 21 juta orang sulit mencapai potensi hidup. Sulit mencerna informasi dengan baik. Sulit belajar dan berprestasi di sekolah dan di tempat kerja. Bukan tidak mungkin, tapi sulit.

Kita bisa lihat, di negara-negara maju, angka stunting-nya 3% atau kurang dari 3%. Di Norwegia, Swedia, Belanda, Austria dan Belgia angkanya 2%. Di negara-negara ini masih ada stunting, tapi umumnya bukan karena anak-anak kurang makan atau kurang nutrisi, tapi karena kebetulan lahir di rumah tangga yang tidak kondusif untuk pertumbuhannya.

Belajar dari negara-negara lain, kita perlu memperluas usaha negara mengentaskan stunting dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga perlu diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program seperti ini telah dilakukan di banyak negara. Bahkan di India, program makan siang gratis di sekolah merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi India di tahun 2005 yang harus dilakukan oleh siapapun yang menjabat Perdana Menteri India.

Di negara-negara yang telah melakukan program ini angka stunting turun signifikan. Selain itu, angka kehadiran anak di sekolah juga meningkat. Pencapaian anak-anak di sekolah juga meningkat. Sekolah jadi menyenangkan - waktu makan siang jadi waktu yang sangat ditunggu anak-anak.

Orang tua juga terbantu, karena tidak perlu menyiapkan bekal untuk anak. Orang tua juga tidak khawatir apakah anaknya makan sehat di sekolah. Makan siang disediakan negara.

Program Hasil Terbaik Cepat 2:

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Kita baru saja melewati masa pandemi COVID 19 yang cukup berat. Menurut data yang saya terima, di periode 2020 sampai 2023 pertengahan, 160.000 warga Indonesia meninggal karena COVID 19. Ini jumlah yang tidak sedikit. Artinya dalam 2,5 tahun, meninggal 64.000 orang.

Sekarang, dengan vaksin yang efektif, dengan obat yang efektif, dengan *screening* yang efektif, kita sudah bisa mengatasi virus COVID 19. Terkena virus COVID 19 tidak lagi menakutkan. Di tahun 2023 ini sudah sangat sedikit kematian yang disebabkan oleh virus COVID 19.

Hal yang sama harus terjadi dengan TB atau tuberkolosis. Indonesia adalah negara dengan jumlah kasus TB terbesar kedua di dunia. Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata ditemukan 900.000 kasus TB di Indonesia setiap tahun. Dari 900.000 kasus yang ditemukan, 10% meninggal karena TB. Artinya setiap tahun ada 90.000 orang Indonesia meninggal karena TB.

Ini adalah angka yang sangat tinggi. 90.000 orang ini adalah ayah, ibu, adik, kakak, anak seseorang. Keluarga yang ditinggalkan pasti akan kesulitan. Apalagi mereka yang meninggal karena TB pada umumnya adalah mereka yang

tinggal di kawasan padat penduduk, kawasan dengan pendapatan menengah ke bawah.

Negara harus fokus dan mampu mengatasi TB. Sudah banyak contoh negara-negara yang mampu mengatasi TB. Bahkan di banyak negara maju, kasus TB sudah tidak ada lagi. 0 kasus. Kita masih 900.000 kasus per tahun.

Untuk itu, setelah saya konsultasi dengan ahli-ahli, saya percaya kita bisa kurangi kasus TBC minimal sebanyak 50% pada tahun 2029. Salah satu caranya adalah dengan memberikan "hadiah" pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua peserta BPJS.

Dengan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun, kita tingkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit. Pemeriksaan kesehatan tahunan harus mencakup pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. Dengan ini kita gencarkan upaya preventif untuk jaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Selain soal TB, masalah kesehatan adalah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini adalah salah satu indikator utama pembangunan bangsa. Untuk itu, jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi kita yang masih di bawah standar WHO harus segera dibenahi.

Karenanya pembangunan RS harus jadi salah satu prioritas utama. RS berkualitas harus didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.

Program Hasil Terbaik Cepat 3:

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kita harus produksi lebih banyak makanan. Ini adalah keniscayaan. Jika negara tidak mampu produksi dan tidak mampu memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan maka akan terjadi kekacauan.

Sejarah baru-baru ini telah membuktikan kepada kita, bagaimana setiap negara itu pada hakekatnya berkepentingan untuk menyediakan pangan untuk rakyat-nya sendiri.

Saat ada bencana pandemi COVID 19, dan baru-baru ini dengan kekeringan El Nino yang melanda negara-negara produsen dan eksportir pangan, mereka yang biasanya ekspor menutup keran ekspornya. Misalkan, saat ini India adalah eksportir beras terbesar di dunia. Kemarin saat kekeringan melanda India karena El Nino, India pun menutup keran ekspor beras.

Agar Indonesia jadi negara yang kuat, dan agar kemajuan yang kita capai selama ini bisa kita pertahankan, mau tidak mau kita harus swasembada pangan. Kita harus produksi beras di tanah Indonesia. Kita harus produksi pengganti gandum di tanah Indonesia. Kita harus produksi cukup protein di tanah, air dan laut Indonesia.

Guna mencapai swasembada pangan, terutama untuk komoditas tanaman pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi lahan.

Kita bisa tingkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada dengan bibit unggul, dengan pupuk yang tepat, dengan cara tanam yang baik, dan juga menurut saya sangat penting adalah dengan memastikan lahan-lahan pertanian kita teririgasi dengan baik.

Saat ini hanya sekitar 30% lahan pertanian Indonesia teririgasi. Artinya 70% bergantung dengan cuaca. Jika tidak cukup hujan, maka hasil tidak maksimal. Jumlah lahan teririgasi harus kita tingkatkan. Kita harus bisa seperti Tiongkok, di mana 52% lahan pertanian di sana teririgasi sepanjang tahun. Artinya petani beras bisa panen tiga kali setahun.

Negara harus hadir bantu petani cari sumber-sumber air. Saya sudah buktikan di Universitas Pertahanan (UNHAN), anak-anak kita sekarang bisa dengan efektif mencari sumber-sumber air baru. Di daerah yang air tanahnya melimpah, kalau perlu kita pompa air dari tanah. Kita juga bisa gunakan pompa-pompa bertenaga surya agar biayanya tidak mahal.

Selain intensifikasi, kita juga perlu ekstensifikasi lahan. Setiap tahun kita kehilangan puluhan, bahkan ratusan ribu hektar lahan sawah untuk properti dan kegunaan lainnya. Kita harus ganti lahan-lahan ini dengan lahan pertanian baru.

Kedua program ini perlu kita lakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ini perlu kita lakukan untuk padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Minimal kita perlu tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Tentunya saya paham upaya kita untuk mencetak lahan pertanian baru pasti akan menemui kritik dan cibiran. Membuka lahan baru tidak mudah. Butuh sekian kali panen sebelum kita bisa mencapai hasil yang optimal.

Bahkan di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah dengan kualitas tanah marginal, mungkin butuh beberapa tahun sampai kita bisa mencapai hasil yang baik atau layak secara komersial. Usaha ini bukan usaha yang besok mulai, lusa selesai.

Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kalau kita tidak berdarah-darah sekarang, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mungkin kita akan menghadapi krisis pangan yang goncang stabilitas negara kita. Walaupun susah, walaupun banyak yang mencibir, kita harus terus upaya untuk produksi semua kebutuhan kita di dalam negeri.

Karena kalau tidak, keberlangsungan bangsa kita, keberlangsungan negara kita taruhannya.

Program Hasil Terbaik Cepat 4:

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Saat saya sekolah SMA dulu di Inggris, saya perhatikan bagaimana hampir semua elit bangsa Inggris lulus dari sekolah unggul yang sama. Nama sekolahnya Eton College. Begitu banyak pemimpin politik, penulis, ilmuwan, musisi, dan orang ternama Inggris yang lulus dari sekolah ini.

Saya pelajari, ternyata sekolah ini punya standar penerimaan yang tinggi. Sekolah ini juga punya disiplin yang tinggi. Sekolah ini juga punya fasilitas yang bagus. Guru-guru yang mengajar terpilih - seringkali merupakan lulusan terbaik di bidang studinya.

Saat saya jadi prajurit TNI, saat saya di Korps Baret Merah, saya berkesempatan untuk membuat konsep sekolah unggul. Waktu itu, karena saya punya hubungan emosional dengan Magelang, saya ingin bangun sekolah unggul di Magelang. Saya sampaikan konsep ini ke Menhankam saat itu Jenderal LB Moerdani.

Mulai dibangunlah SMA Taruna Nusantara di Magelang tahun 1985. Diresmikan tahun 1990. Dari awal berdiri sampai sekarang, SMA ini ada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Saat saya dilantik jadi Menteri Pertahanan di 2019 lalu, saya langsung agendakan kunjungan ke SMA Taruna Nusantara.

Saya mendapat laporan, sudah begitu banyak lulusan SMA TN yang sekarang berada di posisi-posisi penting negeri ini. Banyak lulusan SMA TN jadi ilmuwan-ilmuwan hebat, jadi politisi-politisi handal, dan tentunya jadi prajurit-prajurit hebat. Salah satunya mas AHY, putera Presiden SBY, yang sekarang jadi Ketua Umum Partai Demokrat, adalah lulusan SMA TN angkatan 5.

Di banyak negara, peran sekolah unggul sangat penting. Sekolah unggul perlu ada di setiap kabupaten untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, untuk meningkatkan kualitas lulusan, infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya.

Sekolah unggul yang perlu dibangun bisa mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (*non-boarding school*) dan asrama (seperti Eton dan SMA TN), serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.

Di samping itu, saat ini juga masih terlalu banyak sekolah yang rusak. Bahkan data BPS tahun 2021, 54% SMA dalam kondisi rusak. 26% SMP dalam kondisi rusak. 39% SD dalam kondisi rusak. Yang kondisinya rusak ringan juga sangat banyak.

Fisik sekolah yang rusak tidak boleh dibiarkan, karena di gedung-gedung inilah kita mendidik generasi penerus bangsa. Pemerintah perlu melaksanakan perbaikan secara intens untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi rusak dan rusak ringan. Kita harus sediakan ruang-ruang kelas yang baik untuk anak dan cucu kita.

Program Hasil Terbaik Cepat 5: Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Untuk pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit, atau di bawah 10% populasi Indonesia.

Keberhasilan Presiden Jokowi dalam menekan angka kemiskinan adalah keberhasilan program-program kartu kesejahteraan sosial yang beliau perkenalkan. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan berbagai program lainnya yang diberikan ke rakyat miskin dengan tepat sangat membantu kehidupan puluhan juta saudara kita.

Namun usaha kita menghilangkan kemiskinan dari Indonesia masih belum selesai. Apakah mungkin? Tentu saja mungkin.

Kita bisa lihat Tiongkok, negara dengan populasi 1,4 miliar orang, di tahun 2021 lalu berhasil menghapus kemiskinan. Capaian itu diraih dengan program-program pengentasan kemiskinan yang terukur dan efektif.

Masih adanya kemiskinan di Indonesia menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib terus memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.

Oleh karena itu, program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan harus dilanjutkan.

Selain itu, kita perlu perkuat program-program yang sudah ada terutama untuk pengentasan stunting. Kita perlu tambahkan Kartu Anak Sehat untuk bantu pastikan kesehatan anak-anak Indonesia terjamin. Bantu pastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup di sekolah dan di luar sekolah. Anak-anak mendapatkan imunisasi dan vaksin yang tepat.

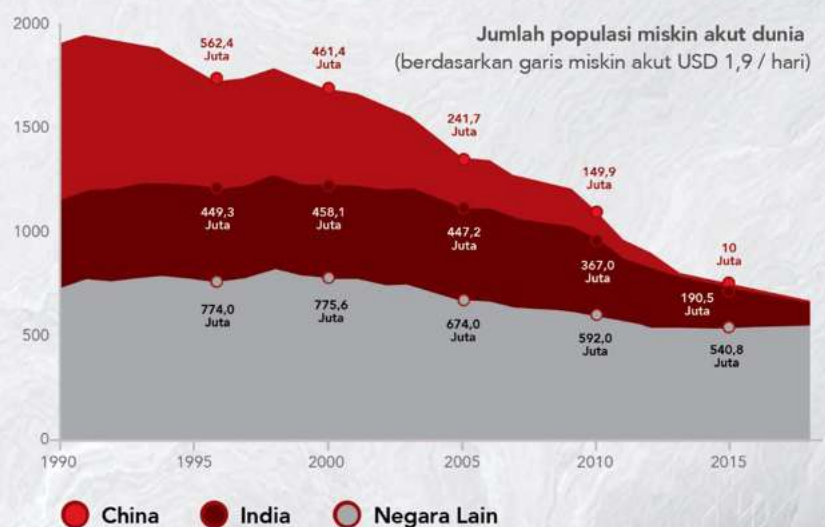
Selain memberikan bantuan untuk yang tidak mampu, kita juga harus berikan bantuan untuk mereka yang ingin bangkit dan mandiri. Kita perlu gelontorkan Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Pangan, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit UKM, Kredit Usaha Start Up dan Kredit Millenial.

Program-program ini harus bisa menjadi garda terdepan dalam peningkatan jumlah wirausaha, memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelum tahun 2029, angka kemiskinan harus bisa turun di bawah 7% dan kita harus mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

Belajar dari Negeri Tiongkok

Tahun 2021, bertepatan dengan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok, mereka merayakan pengentasan kemiskinan akut atau *extreme poverty* di Tiongkok.

Keberhasilan ini dicapai dengan fokus negara menghadirkan pendidikan, infrastruktur dan intervensi ekonomi berkualitas untuk setiap warga miskin akut, miskin dan terancam miskin di Tiongkok. Termasuk juga mewajibkan lapis kepemimpinan tertinggi Tiongkok untuk tinggal dan bekerja di daerah-daerah termiskin negara tersebut sampai kemiskinan teratasi.



Sumber: CSIS China Project 2021, Angka dari Bank Dunia



Program Hasil Terbaik Cepat 6:

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Sudah menjadi rahasia umum kalau penghasilan guru, dosen, aparatur sipil negara (ASN), tentara nasional Indonesia (TNI), hingga kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak dalam kondisi sejahtera.

Saya berpendapat, pendapatan para pejabat negara perlu ditingkatkan secara layak. Saya percaya hanya dengan pendapatan yang layak, maka kita bisa menuntut para pejabat negara kita untuk bekerja dengan profesional, dan sama sekali tidak korupsi.

Selain itu, hanya dengan pendapatan yang layak, pendapatan yang bersaing dengan swasta, kita bisa dapatkan putra putri terbaik bangsa kita untuk mendaftar jadi guru, dosen, ASN, TNI dan POLRI.

Sebagai Menteri Pertahanan, saya bertanggung jawab untuk anggaran gaji prajurit TNI. Jujur saya merasa tidak enak, saya sulit tidur nyenyak, mengetahui bedanya kesejahteraan prajurit di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, apalagi dengan Amerika. Bahkan gaji seorang Kopral di Amerika lebih tinggi dari Jenderal di Indonesia.

Lalu apakah negara kita punya uang untuk tingkatan gaji guru, dosen, ASN, TNI dan POLRI? Saya jawab, negara harus punya. Tambahan pendapatan negara harus diusahakan.

Program Hasil Terbaik Cepat 7:

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di bulan Oktober tahun 2013 lalu, saya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menerima perwakilan beberapa organisasi desa di kantor DPP Gerindra. Hadir dari APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), AKD (Asosiasi Kepala Desa), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), INKUD (Induk Koperasi Unit Desa).

Waktu itu saya sampaikan, Indonesia mempunyai kapasitas untuk mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan dengan menyalurkan secara langsung dana APBN ke desa dan organisasi-organisasi yang menggerakkan ekonomi rakyat seperti Koperasi Unit Desa, koperasi tani dan nelayan, dan koperasi pasar.

Dana pembangunan desa harus diserahkan langsung ke desa. Penggunaan dana itu diserahkan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Pemikiran ini saya sampaikan didasari pemahaman kalau struktur ekonomi Indonesia tidak seimbang dan tidak adil. Sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, tetapi 60% dari uang yang beredar di seluruh Indonesia beredar di ibu kota Jakarta.

Kita harus berani mengubah struktur ekonomi ini. Sumber daya ekonomi bangsa Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, tidak hanya dinikmati segelintir orang saja di ibukota dan kota-kota besar.

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Alhamdulillah, walaupun waktu itu setelah Pemilu 2014 saya tidak bergabung dengan Pemerintahan Presiden Jokowi, beliau punya pemahaman yang sama dengan saya soal ini. Mulai 2015, dimulai pembangunan desa secara besar-besaran dengan adanya Dana Desa. Sekarang sudah begitu banyak infrastruktur desa yang terbangun. Bahkan, catatan terakhir, sudah terbangun lebih dari 320.000 km jalan desa, ribuan embung, ribuan balai desa, dan berbagai infrastruktur desa lainnya.

Saya berpendapat, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Selain membangun infrastruktur desa, kita juga perlu membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Saat ini masih terlalu banyak orang Indonesia yang tinggal di rumah yang tidak layak tinggal, dan rumah tanpa sanitasi yang baik. Karena ada hal-hal juga yang perlu dilakukan lintas desa, kita juga perlu sediakan Dana Kelurahan untuk bangun hal-hal yang diperlukan.

Program Hasil Terbaik Cepat 8: Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%.

Penerimaan negara kita terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak (PNBP). Dari penerimaan negara inilah kita membiayai berbagai program pemerintah - termasuk gagasan saya untuk 7 "Program Hasil Terbaik Cepat" lainnya.

Saat ini pendapatan pajak dan bukan pajak kita masih jauh dari optimal. Di 2021 lalu, pendapatan pajak terhadap PDB kita atau rasio pajak hanya 9,1%. Pendapatan pajak terhadap PDB kita atau rasio pendapatan hanya 11,8%.

Angka ini rendah dibandingkan dengan capaian negara tetangga kita. Di tahun yang sama, Kamboja, misalkan, bisa capai rasio pajak 16,4% dan rasio pendapatan 18,1%. Malaysia bisa capai rasio pajak 11,2% dan rasio pendapatan 15,1%. Thailand juga bisa lebih bagus dari kita. Thailand bisa capai rasio pajak 14,3% dan rasio pendapatan 18,5%.

Di tahun 2024, PDB kita ditaksir akan mencapai Rp. 22.786 triliun. Artinya, kalau rasio pendapatan kita hanya 11,8%, pendapatan negara hanya Rp. 2.700 triliun. Tapi kalau rasio pendapatan kita naik 1% saja, ada penambahan Rp. 228 triliun. Kalau rasio pendapatan kita bisa sama dengan Kamboja di 18,1%, maka pendapatan kita di 2024 mencapai Rp. 4.142 triliun. Artinya, kalau kita bisa seperti Kamboja, maka pendapatan negara kita naik dari Rp. 2.700 triliun ke Rp. 4.142 triliun - naik Rp. 1.442 triliun.

Pendapatan yang naik Rp. 1.400 triliun bisa kita gunakan untuk biayai semua Program Hasil Terbaik Cepat. Bisa kita gunakan untuk bangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten. Rumah sakit kualitas dunia di setiap kabupaten. Sediakan makan siang gratis untuk semua anak sekolah, dan lain sebagainya.

Agar tidak salah paham, saya tidak mau tingkatan persentase pajak yang diambil oleh pemerintah dari ekonomi. Yang harus dilakukan adalah memastikan pendapatan yang harusnya didapatkan, didapatkan.

Litbang KPK pernah mengkaji di 2019, kebocoran penerimaan negara sebenarnya lebih besar dari kebocoran anggaran negara. Kebocoran penerimaan itu artinya yang harusnya diterima negara berapa, tapi yang diterima berapa.

Tidaklah heran jika di 2023 ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ratusan triliun transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Inilah yang harus kita cegah.

Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Kita perlu pisahkan badan yang mengelola uang negara, dengan badan yang mengurus pendapatan negara.

Seperti di banyak negara lain, kita perlu mendirikan Badan Penerimaan Negara. Dengan badan ini, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) harus bisa naik hingga 23% sesuai potensinya.

KPK: Potensi Kebocoran APBN Sampai Rp. 2.800 Triliun Per Tahun



Program Prioritas Pemerintah

Selain 8 Program hasil Terbaik Cepat, untuk menuju Indonesia Emas di 2045 maka pemerintahan mendatang perlu fokus pada 17 sasaran capaian dengan program prioritas.

17 sasaran capaian ini sangat penting karena merupakan 17 *foundational stepping stones* atau 17 prasyarat mutlak untuk kita bisa jadi negara maju dan sejahtera.

17 sasaran capaian ini juga membuktikan bahwa kita bangsa yang belajar dari sejarah. Kita bangsa yang tahu tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (*near & far future*).

Kita juga bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kita, dan membekali diri kita dengan kemampuan menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

4 Alasan Kenapa Sebuah Negara Dapat Gagal



1

Tidak memiliki
rekam sejarah



Tidak tahu apa
tantangan yang
harus dihadapi

2

Belajar dari
sejarah



Tahu tantangan
yang harus
dihadapi



Tapi
memilih untuk
mengabaikan

3

Belajar dari
sejarah



Tahu tantangan
yang harus
dihadapi



Tapi tantangan
yang dihadapi
ternyata berbeda
/ lebih besar

4

Belajar dari
sejarah



Tahu tantangan
yang harus
dihadapi



Tapi tidak punya
kemampuan
menghadapi
tantangan

Sasaran Prioritas 1:

Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama.

Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen sebesar itu, bila asumsinya semua merupakan luas panen padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton gabah (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).

Dalam hal energi, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio-diesel dan bio-avtur dari kelapa sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari air, angin, gelombang laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan terlaksana. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) perlu didorong untuk menjadi solusi penyediaan energi listrik di daerah pedalaman.

Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

Sasaran Prioritas 2:

Penyempurnaan sistem penerimaan negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara melalui reformasi kebijakan dan sistem perpajakan dalam rangka memperluas basis penerimaan negara.

Untuk itu, negara akan mengambil langkah langkah terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23%

Fokus reformasi kebijakan perpajakan diarahkan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Pemberian insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.

Sasaran Prioritas 3:

Pemberantasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5% di akhir 2029.

Sasaran Prioritas 4:

Pencegahan dan pemberantasan narkoba

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.

Sementara itu, pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba.

Sasaran Prioritas 5:

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.

Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.

Sasaran Prioritas 6:

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi.

Kemajuan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan melalui pengembangan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan dan penyediaan pendidikan, termasuk menyediakan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren (untuk mencetak santri berkualitas unggul), dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.

Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa.

Sasaran Prioritas 7:

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan.

Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional.

Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Sasaran Prioritas 8:

Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk menjaga tumbuh-kembangnya anak, termasuk kecukupan gizi.

Sasaran Prioritas 9:

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat.

Sasaran Prioritas 10:

Menjamin pelestarian lingkungan hidup

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.

Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi gas rumah kaca (GRK) akan dilaksanakan: diantaranya dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, serta meningkatkan pengelolaan tanah, air, dan hutan secara lestari. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.



Vegetius Renatus

“**Si Vis Pacem Para Bellum**”

“Jika kau menghendaki perdamaian
bersiaplah untuk perang”

Publius Flavius Vegetius Renatus

Filsuf Militer Yunani

Sasaran Prioritas 11:

Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan juga akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida.

Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di pihak lain, petani didorong untuk membangun kelembagaan agar mendapatkan sarana produksi pertanian yang lebih kompetitif dan harga panen yang lebih menjamin kemakmuran.

Sasaran Prioritas 12:

Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Pemerintah harus hadir menjamin ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak

bagi masyarakat yang membutuhkan. Target menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Sasaran Prioritas 13:

Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Peningkatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Penguatan program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial dan gen Z terutama pada bidang bisnis inovasi dan teknologi akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru.

Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan 10 kota-kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.

Sasaran Prioritas 14:

Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis.

Sasaran Prioritas 15:

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan menjaga lingkungan. Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia.

Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

Kekayaan alam Indonesia harus diolah di Indonesia. Karena kita bisa tambah pendapatan negara dari mengolah kekayaan alam kita yang sekarang banyak kita jual mentah. Karena mentah, karena belum diolah, kita jual murah. Kita kehilangan

kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan alam kita.

Bahkan, saya mendapat laporan, jika dihitung selama 30 tahun, kehilangan nilai tambah karena ekspor konsentrat tembaga bisa mencapai USD 108 miliar. Untuk gas alam, karena jual mentah selama 30 tahun, kita kehilangan kesempatan nilai tambah USD 225 miliar. Dua komoditas ini saja, sudah USD 333 miliar atau Rp. 4.329 triliun yang tidak kita olah²⁷.

Sebagai contoh, konsentrat tembaga. Pada tahun 2015 lalu kita ekspor konsentrat sekitar 3 juta ton dengan harga USD 1.499 per ton²⁸.

Dari ekspor ini kita dapat USD 4,5 miliar. Padahal jika kita olah di dalam negeri jadi tembaga, emas, perak, asal sulfat dan slag, kita bisa dapat USD 8,1 miliar²⁹. Kita hilang kesempatan dapat nilai tambah USD 3,6 miliar, sekitar Rp. 46,8 triliun setiap tahun.

Contoh, lain gas alam. Pada tahun 2015 lalu, kita ekspor gas alam sejumlah 3.100 MMSCD atau 20 juta ton. Kita jual USD 7 per MMBtu³⁰. Total kita dapat USD 7,2 miliar. Padahal kalau kita olah terlebih dahulu jadi methanol, olefin dan ammonia, kita bisa dapat USD 14,7 miliar. Lebih dari dua ratus persen pendapatan kita naik, jika kita lakukan pengolahan.

²⁷ Dewan Pakar Partai Gerindra – Rauf Purnama, 2017

²⁸ Kementerian Perdagangan, 2016

²⁹ Dewan Pakar Partai Gerindra – Rauf Purnama, 2016

³⁰ MMBtu = *one million British Thermal Units*, satuan yang umum digunakan untuk menghitung kuantitas gas alam.

Ini masalah besar, tapi juga kesempatan besar. Sudah kita biarkan keuntungan ekspor kita hilang, kita juga tidak mau olah sumber daya alam kita. Kalau kita olah di dalam negeri, kita bisa menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin keenam terkaya di dunia.

Saat ini Presiden Joko Widodo sudah menerapkan larangan ekspor untuk nikel – salah satu komoditas unggulan kita. Walaupun digugat oleh World Trade Organization, Presiden bersikukuh bahwa larangan ekspor nikel adalah kebijakan yang benar. Ini adalah kegigihan yang harus kita pertahankan. Lebih baik kita ekspor baterai mobil listrik, atau mobil listrik, jangan ekspor nikel mentah untuk diolah negara lain.

Kita harus punya keberanian untuk membela bangsa kita di forum internasional. Kita harus berani karena kita benar. Mereka juga membela kepentingan negara mereka masing-masing. Kita harus berani dan mampu bela kepentingan bangsa kita.

Selain nikel, Presiden Joko Widodo juga mendorong hilirisasi untuk bauksit, tembaga, bauksit, timah, gas bumi, minyak bumi, dan berbagai produk unggulan Indonesia lainnya.

Kekayaan alam Indonesia memang harus diolah di Indonesia. Dalam beberapa infografi di buku ini saya paparkan nilai tambahnya bisa begitu besar jika kita konsekuen melakukan hilirisasi.

Kebutuhan Investasi Hilirisasi Hingga 2040

8 Sektor Prioritas

Mineral



USD 431,8 Miliar

Batubara



Minyak



Gas Bumi



USD 68,1 Miliar

Perkebunan



Kelautan



Perikanan



Kehutanan



USD 45,4 Miliar

21 Komoditas Prioritas Hilirisasi



Batubara



Nikel



Timah



Tembaga



Bauksit



Besi Baja



Emas Perak



Aspal Buton



Minyak Bumi



Gas Bumi



Sawit



Kelapa



Karet



Biofuel



Kayu Log



Getah Pinus



Udang



Perikanan



Rajungan



Rumput Laut



Garam

Dampak Hilirisasi Terhadap Nilai Tambah Produk Nikel

Ekspor Produk Turunan Nikel

2017

USD
3,3
Miliar

Larangan Ekspor Nikel

2020



Ekspor Produk Turunan Nikel ↑

2022

USD
33,8
Miliar

Nilai Tambah Produk Turunan Nikel



Nickel Ore (Limonit)

x11



Nickel Sulfat

x19



Prekursor

x38



Katoda

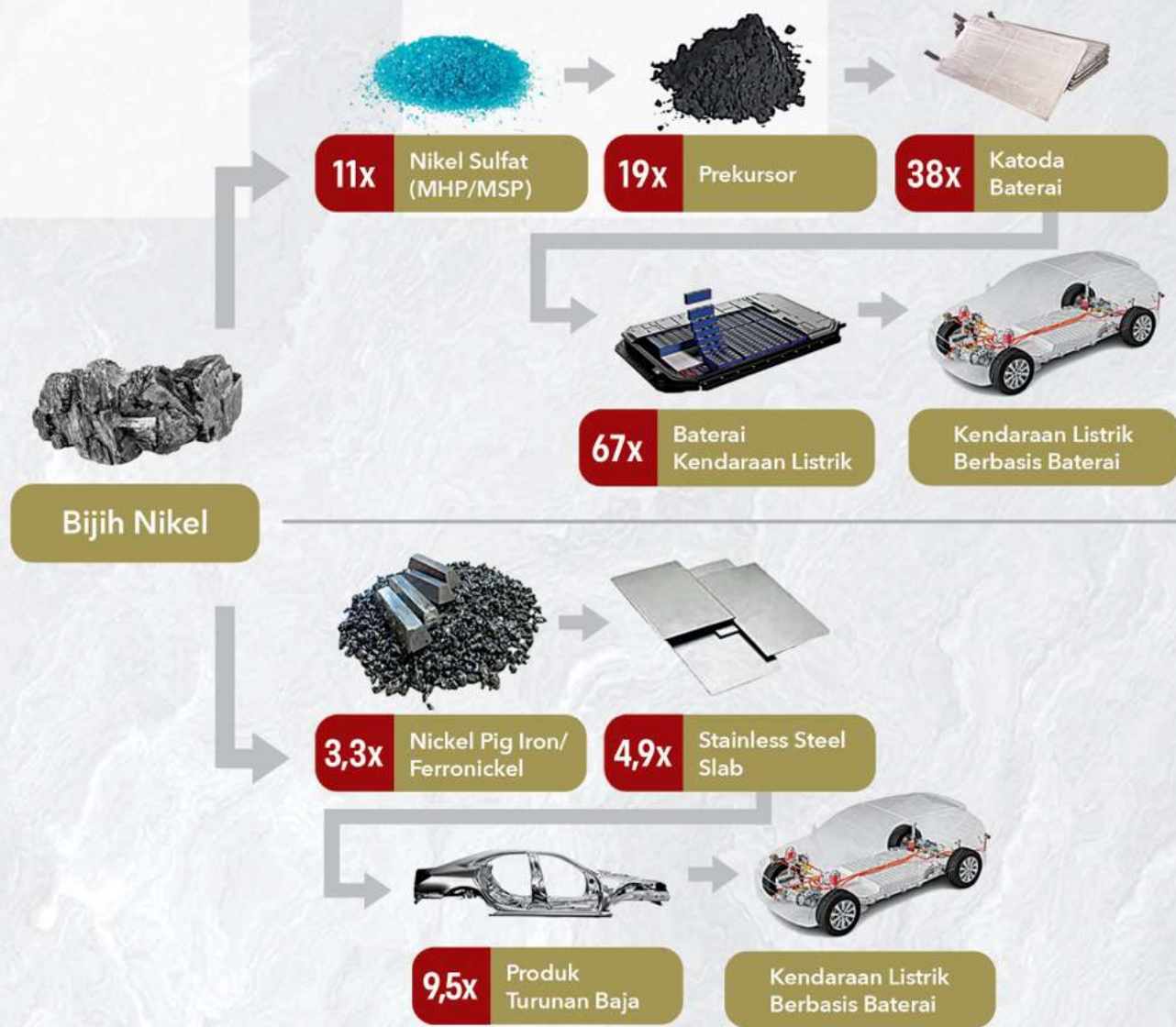
x67



Sel Baterai



Nilai Tambah Hilirisasi Nikel



Dampak Ekonomi Hilirisasi Nikel



Investasi

US\$128 Miliar

*Nilai akumulasi hingga 2040



Lapangan Kerja

357.000 Orang



Kontribusi PDB

US\$43,2 Miliar

**Nilai per tahun pada tahun 2040



Peningkatan Ekspor

US\$81 Miliar

Nilai Tambah Hilirisasi Tembaga



Dampak Ekonomi Hilirisasi Tembaga



Investasi

US\$38 Miliar

*Nilai akumulasi hingga 2040



Lapangan Kerja

253.583 Orang



Kontribusi PDB

US\$34,9 Miliar

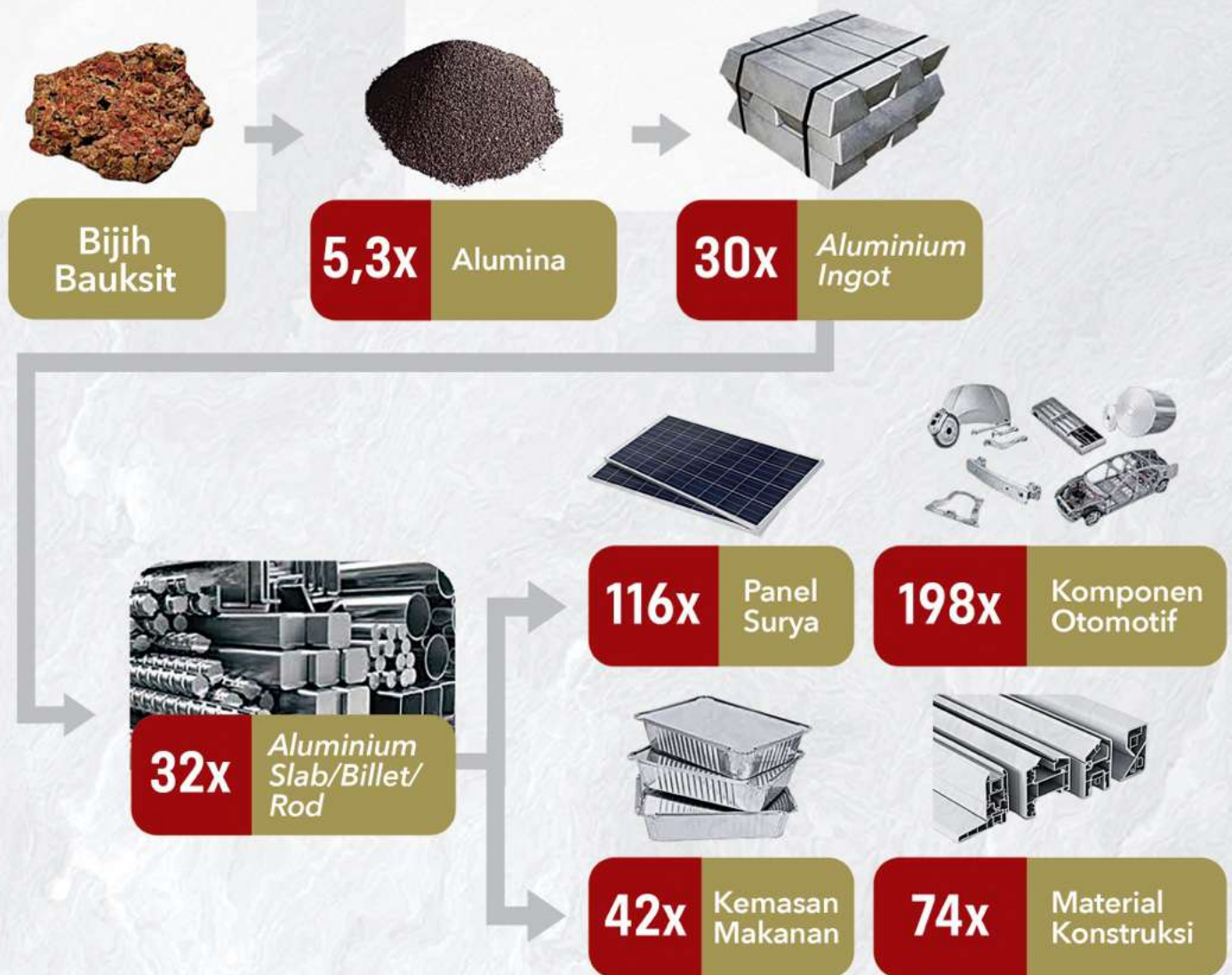
**Nilai per tahun pada tahun 2040



Peningkatan Ekspor

US\$282 Miliar

Nilai Tambah Hilirisasi Bauksit



Dampak Ekonomi Hilirisasi Bauksit



Investasi

US\$49 Miliar

*Nilai akumulasi hingga 2040



Lapangan Kerja

662.445 Orang



Kontribusi PDB

US\$37 Miliar

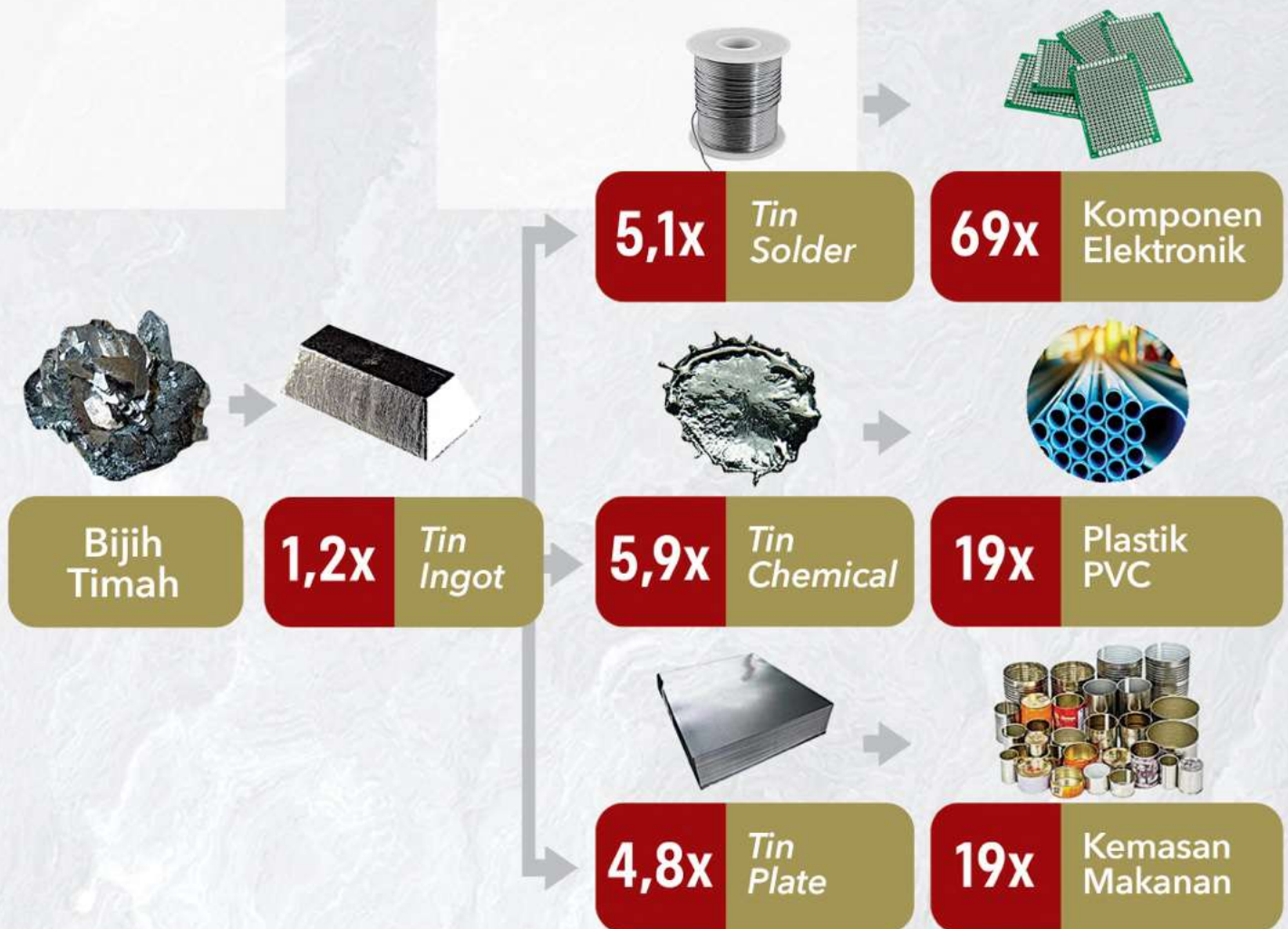
**Nilai per tahun pada tahun 2040



Peningkatan Ekspor

US\$47,4 Miliar

Nilai Tambah Hilirisasi Timah



Dampak Ekonomi Hilirisasi Timah



Investasi

US\$40 Miliar

*Nilai akumulasi hingga 2040



Lapangan Kerja

57.299 Orang



Kontribusi PDB

US\$23,5 Miliar

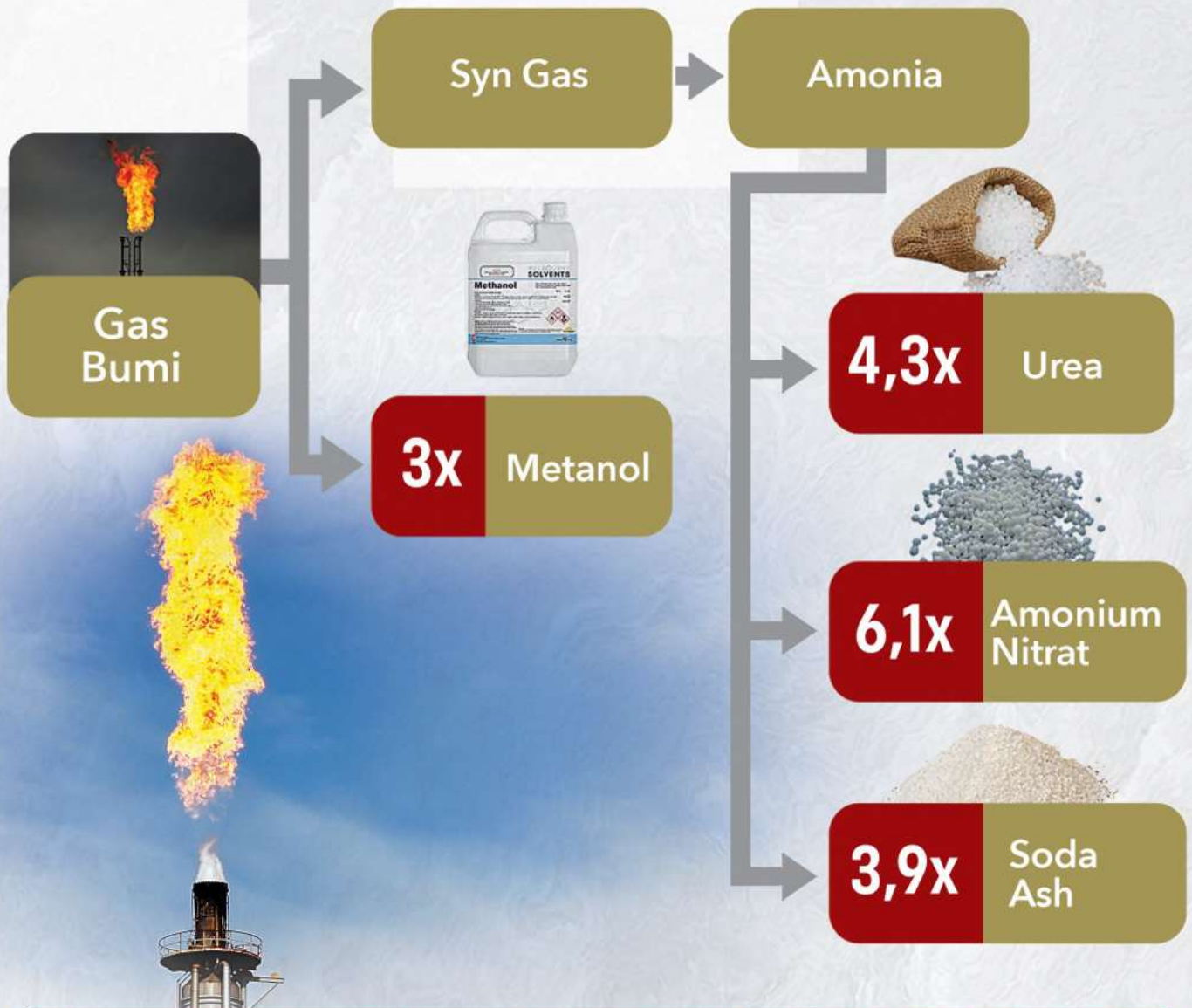
**Nilai per tahun pada tahun 2040



Peningkatan Ekspor

US\$47 Miliar

Nilai Tambah Hilirisasi Gas Bumi



Dampak Ekonomi Hilirisasi Gas Bumi



Investasi

US\$48 Miliar

*Nilai akumulasi hingga 2040



Lapangan Kerja

46.149 Orang



Kontribusi PDB

US\$8,2 Miliar

**Nilai per tahun pada tahun 2040



Peningkatan Ekspor

US\$43 Miliar

Nilai Tambah Hilirisasi Minyak Bumi



Dampak Ekonomi Hilirisasi Minyak Bumi



Investasi

**US\$20
Miliar**

*Nilai akumulasi hingga 2040



Lapangan Kerja

**24.055
Orang**



Kontribusi PDB

**US\$6,5
Miliar**

**Nilai per tahun pada tahun 2040



Peningkatan Ekspor

**US\$25,5
Miliar**

Investasi untuk Pertumbuhan 10%

Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebuah negara dibutuhkan investasi utamanya untuk: Meningkatkan kapasitas produksi, dan menyediakan infrastruktur pendukung investasi.



Untuk mencapai pertumbuhan PDB 5,4 - 6% / tahun, butuh investasi Rp. 5.800 s/d Rp. 5.900 triliun / tahun

Menteri Bappenas dan
Menteri Investasi, 2021



Artinya, rata-rata
dibutuhkan investasi:

Target Pertumbuhan	Kebutuhan investasi / tahun
1%	~ Rp. 1.000 triliun
5%	~ Rp. 5.000 triliun
7%	~ Rp. 7.000 triliun
10%	~ Rp. 10.000 triliun

Sumber: Hitungan pendekatan

Sumber Investasi

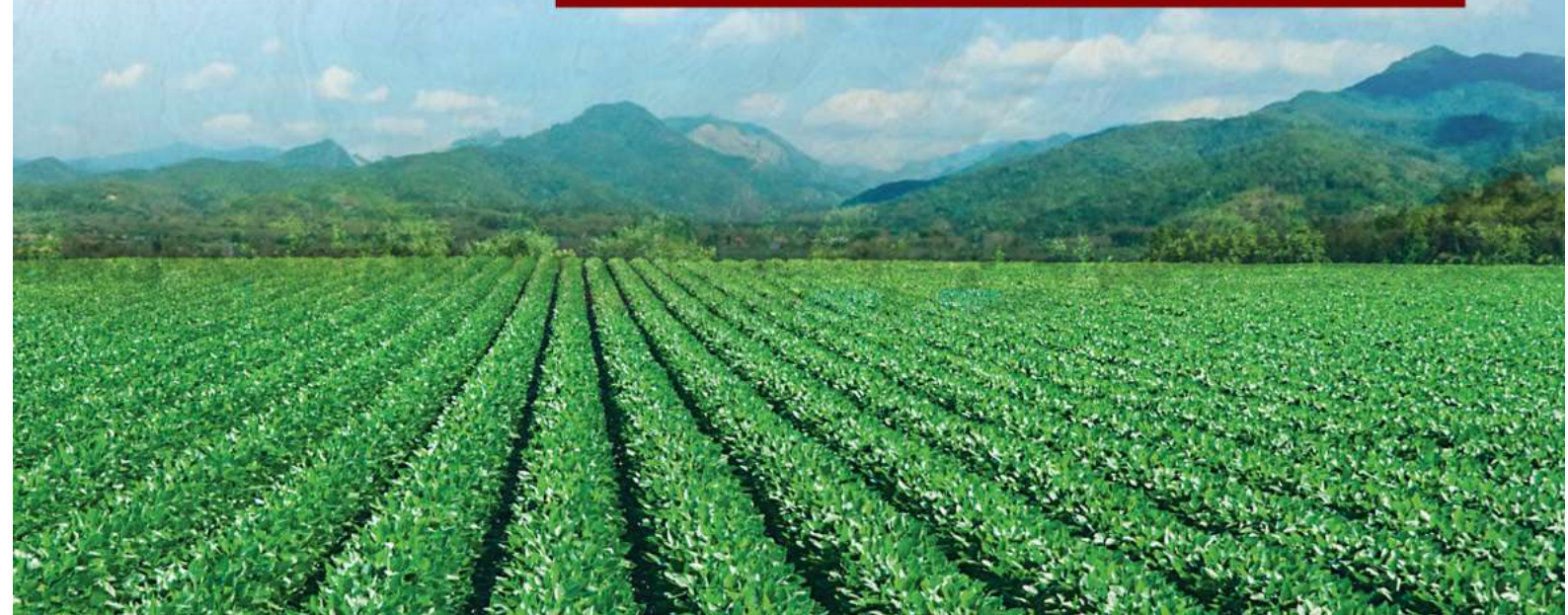
- Pemerintah (APBN)
- BUMN
- BUMD
- Swasta Domestik
- Swasta Asing

Sektor Investasi Pertumbuhan 10%

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan tingkat PDB per kapita yang masih rendah (USD 3.800 per warga per tahun - 1/3 dari Malaysia), kita perlu fokuskan investasi pada bidang-bidang yang dapat menyerap tenaga kerja atau bidang-bidang padat karya.

Sektor ekonomi	Jumlah pekerja saat ini
 ▶ Pertanian, Kehutanan, Perikanan	40 juta orang 30% pekerja Indonesia
 ▶ Perdagangan	25 juta orang 20% pekerja Indonesia
 ▶ Pengolahan	18 juta orang 14% pekerja Indonesia

Sumber: BPS, 2021 – Angka dibulatkan



Sasaran Prioritas 16:

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Berpolitik dengan baik berarti membuka kesempatan untuk masyarakat dalam berperan serta pada setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi, sosial dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan dan pembinaan karir.

Dengan langkah-langkah tersebut, kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik serta meritokrasi dapat direalisasikan dan politik uang dapat diminimalkan.

Kita tidak boleh menyerahkan demokrasi kita kepada preman-preman bayaran. Kita ingin kesejukan, untuk itu kita tidak boleh tinggal diam jika ada yang robek-robek hukum yang kita damba-dambakan.

Kita harus sampaikan kepada mereka-mereka yang merasa di atas hukum: "Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara-saudara sekalian."

Menyikapi ini, saya pernah tanya kader-kader Partai GERINDRA. Kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Kalau ada kawan dalam berdemokrasi yang terancam, seluruh Indonesia terancam. Kalau ada sekutu dalam berdemokrasi yang tersentuh, seluruh Partai GERINDRA tersentuh.

Kita selalu ingin sejuk, kita selalu ingin damai, karena kita butuh keutuhan dan persatuan menghadapi keadaan yang tidak gampang. Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi penakut. Kita tidak boleh menjadi kambing yang bisa disuruh-suruh, apalagi ditipu-tipu dan diperdaya.

Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jangan kita biarkan jika ada orang yang menambahkan hantu di daftar pemilih. Jangan kita tinggal diam saat melihat kotak suara dibuka di luar proses yang telah kita sepakati bersama. Kita harus bersuara saat melihat ketidakadilan.

Apalagi sekarang sudah ada Internet, sudah ada Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Kalau kita lihat ada pejuang yang tidak salah, tapi dikriminalisasi, kita harus bersuara, harus bela, walaupun media tidak meliput karena mungkin sudah dibeli oleh orang tertentu.

Sasaran Prioritas 17:

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu dilakukan secara terstruktur dan tegas, sehingga akan diperoleh manfaat ekonomi berupa tambahan pembiayaan bagi pemerintah dalam rangka percepatan kemajuan negara.

Korupsi di Indonesia sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia. Maksudnya, kalau 5% bocor, "Biasa deh. Cingcay lah." Sepuluh persen bocor, "Sudah deh. Sama kawan 10% boleh." Lima belas persen bocor, "Ya sudah, deh." Dua puluh persen bocor, mungkin kadang masih bisa kita mengerti.

Sekarang ini, saya mencatat semakin banyak kasus yang bocornya 80%. Kalau ada proyek buat jembatan, seringkali tidak ada gempa, roboh sendiri³¹. Kalau buat gedung, ada yang belum diresmikan jatuh sendiri³².

Sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar.

³¹ Kasus robohnya jembatan Kutai Kartanegara, 2011

³² Kasus ambruknya gedung Pemerintah Daerah Kota Depok, 2017

Mohon saudara garisbawahi pernyataan saya ini. Catat apa yang saya tuliskan.

Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Ini ajaran sejarah. Tidak usah kita ragukan lagi.

Dengan korupsi, semua aparat pemerintah akan rapuh. Dengan korupsi, tidak ada uang cukup untuk menyelenggarakan jasa-jasa kepada rakyat. Dengan korupsi, negara ini tidak punya cukup uang untuk membeli dan memproduksi pesawat terbang untuk angkatan udaranya. Tidak cukup anggaran untuk mengadakan kapal patroli untuk angkatan lautnya. Tidak bisa sediakan peluru untuk angkatan daratnya. Tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan polisi-polisinya.

Kalau tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan polisi lemah, kalau jaksa-jaksanya lemah dan maling, kalau hakim-hakimnya tidak kuat, negara ini bisa gagal. Kita sudah rasakan semua. Kita sudah rasakan semua apa yang kita hadapi sekarang.

Sebelum kita terkena pandemi COVID 19, pertumbuhan benar ada. Konsumsi kita, benar naik. Tetapi, semua ini rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, kondisi bangsa kita sekarang sangat rentan.

Karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol, perjuangan kita tidak ringan. Perjuangan kita berat. Semakin

kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi, dan akan diterpa oleh mereka.

Kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan, kita tidak boleh mengizinkan koruptor-koruptor untuk melanglang buana, untuk bergentayangan bebas.

Tidak! Kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ujung dunia.

Untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, kita juga harus memberi contoh. Harus *ing ngarso sung tulodo*, di depan memberi contoh. Bukan *ing ngarso entek-enteke*. Kita harus menyumbang sesuatu yang baik. Kita harus menyumbang politik yang bersih, politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika orang lain belum bisa, kita harus bisa.

Kita harus *sabdo pandito ratu*. Ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam dua tahu, jam empat tempe. Jangan bilang "iya", kalau maksudmu "tidak". Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi, karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi.

Enabler Sasaran Prioritas:

Hentikan Kebocoran dan Produksi Nasional

Nasib bangsa kita harus kita raih sendiri. Kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan kita, kondisi negara kita akan semakin parah. Karena itu, di buku ini saya sampaikan kepada saudara, apa-apa saja yang menjadi tugas kita bersama.

Pertama, kita harus menyelamatkan kekayaan negara. Kita harus hentikan mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri supaya kita punya uang untuk membangun pabrik-pabrik dan mendorong produksi nasional. Kalau kita terus biarkan kekayaan kita mengalir ke luar, suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya.

Kita perlu punya pabrik mobil buatan Indonesia. Karena kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekalian kita buat pabrik mobil listrik. Orang Indonesia beli satu juta mobil tiap tahun. Masa satu pun tidak ada mobil milik Indonesia?

Kita juga perlu punya pabrik motor milik Indonesia. Kita perlu punya pabrik pesawat terbang Indonesia. Kita sudah punya PTDI, dan kita harus perkuat. Kita perlu perkuat pabrik kereta api buatan Indonesia. Kita perlu perkuat pabrik kapal-kapal buatan Indonesia.

Dengan mendorong produksi bangsa, anak-anak Indonesia akan punya pekerjaan yang baik, yang layak, yang terhormat. Kita tidak mau anak-anak kita jadi kuli-kuli seterusnya.

Inilah inti dari strategi ekonomi yang saya sampaikan dalam buku ini: Mendorong produksi bangsa. Mendorong produktivitas bangsa. Produksi bangsa berarti barang untuk keperluan pasar Indonesia dihasilkan oleh rakyat Indonesia, di Indonesia, dengan bahan-bahan Indonesia.

Kalau pasar lain mau beli, Alhamdulillah. Saya juga ingin kita ekspor barang-barang produksi Indonesia ke luar negeri.

Kalau produksi kita kuat, kalau kita tidak banyak impor, kalau kita menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, terutama pangan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan pokok, energi, ini kan *value*? Berarti mata uang kita dengan sendirinya akan menguat. Orang akan mencari, orang akan membeli rupiah.

Mata uang itu cermin dari produktivitas suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan.

Kalau kita lihat periode tahun 2003-2013, nilai tukar mata uang kita cukup stabil, selama sepuluh tahun. Kenapa? Karena ekspor kita kuat. Tapi, ekspor kita pada tahun-tahun itu mengandalkan bahan baku, mengandalkan komoditas.

Namun sayang, sepuluh tahun itu ketika kita ada *profit*, ada keuntungan, tidak dimanfaatkan untuk banting setir memperkuat produksi. *Value add, processing*.

Tetapi, saya masih sangat optimistis. Kita punya kekuatan fundamental, kita punya kekuatan inheren. Hanya manajemennya harus cepat dan cerdas. Bangsa Indonesia sudah terlalu banyak menghambur-hamburkan kesempatan.

Dengan strategi nasional yang tepat, saya yakin Indonesia bisa punya kekuatan industri yang dihormati. Kita akan punya produk-produk industri yang dihormati. Dan pada ujungnya, Rupiah kita bisa kuat.

Enabler Sasaran Prioritas:

Jadikan BUMN Ujung Tombak Ekonomi

Menurut saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus pakai BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai implementer. Banyak negara bisa. Singapura bisa. Tiongkok dengan 150.000 BUMN-nya bisa bisa. Kita juga harus bisa.

Untuk itulah, BUMN-BUMN kita perlu merekrut manajer-manajer, insinyur-insinyur, direksi-direksi yang kapabel.

Tidak mungkin tidak ada orang-orang handal di Indonesia. Apakah kita tidak percaya kepada bangsa kita sendiri? Yang banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan.

Saya kembali, pengalaman saya di tentara. Ada sebuah adagium, sebuah ajaran klasik, di semua tentara di seluruh dunia. Ajarannya adalah *"there are no bad soldiers, only bad commanders"*.

Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang jelek. Kalau dipimpin dengan baik, saya yakin anak-anak muda, profesional-profesional kita bisa. Saya yakin, dan saya sudah buktikan berkali-kali.

Peran BUMN di Tiongkok

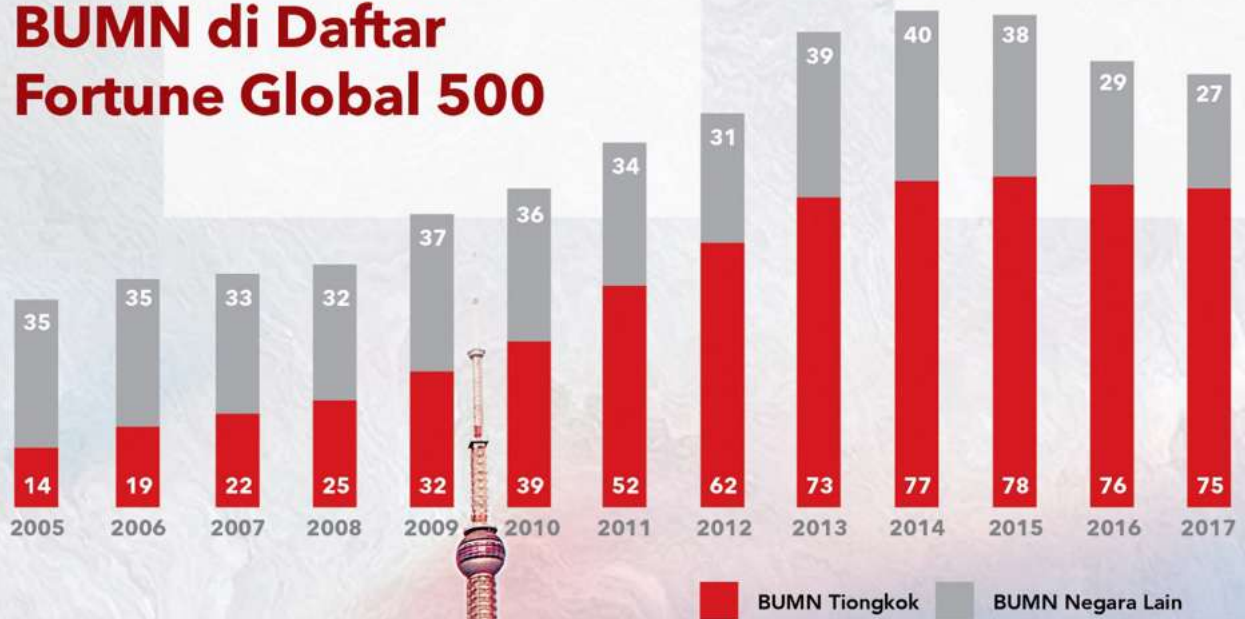
Jumlah Perusahaan Tiongkok di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar di dunia: 143 perusahaan, dari jumlah ini 82 perusahaan adalah BUMN. Total ada 150.000 BUMN di Tiongkok.

Sebagai perbandingan, jumlah perusahaan Indonesia di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar di dunia: 1 Perusahaan, yaitu Pertamina.

10 Perusahaan Terbesar di Tiongkok

BUMN Tiongkok	Ranking di Fortune Global 500	Pendapatan per tahun	Status Perusahaan
State Grid	2	USD 390 milyar	BUMN
China National Petroleum	4	USD 280 milyar	BUMN
Sinopec Group	5	USD 280 milyar	BUMN
China State Construction Engineering	13	USD 230 milyar	BUMN
Ping An Insurance	16	USD 230 milyar	Swasta
Industrial & Commercial Bank of China	20	USD 180 milyar	BUMN
China Construction Bank	25	USD 170 milyar	BUMN
Agricultural Bank of China	29	USD 150 milyar	BUMN
China Life Insurance	32	USD 140 milyar	Swasta
China Railway Engineering Group	35	USD 140 milyar	BUMN

BUMN di Daftar Fortune Global 500



Tugas Kita: Jadikan Koperasi Alat Pemerataan & Motor Swasembada

Koperasi adalah alat pemerataan. Koperasi adalah alat untuk memperkuat yang lemah. Karena itu, peran koperasi dalam ekonomi kita harus kita digalakkan lagi.

Namun, ini tidak berarti koperasi kita besarkan dan swasta kita lemahkan. Tidak. Paham ekonomi konstitusi adalah, swasta silakan. Go, swasta, BUMN, koperasi, berlomba kamu, maju!

Namun, pihak yang lemah dibantu atau diberdayakan melalui koperasi. Inilah sebetulnya mazhab itu. Jadi, bukan saling bertentangan. Malah kita harus bergerak sejajar.

Jadi, swasta, BUMN, koperasi, bisa menarik ekonomi bangsa ke depan. Masing-masing dengan kekuatannya. Sebetulnya itu yang kita lihat dilaksanakan di Korea, dilaksanakan di Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok.

Koperasi di Indonesia kita pernah jadi sorotan kekaguman bagi bangsa-bangsa lain. Mereka belajar ke kita, belajar tentang BIMAS, belajar tentang BULOG, belajar tentang swasembada dari kita.

Kalau dipimpin dengan baik, saya percaya, saya optimistis koperasi di Indonesia bisa benar-benar besar dan bisa menjadi alat pemerataan.

Benar, akan ada tantangan, dan akan ada kegagalan.

Sebagai contoh, saya mau bicara soal produksi dan distribusi pupuk. Pupuk kan dibuat oleh pabrik pupuk milik negara, milik rakyat? Yang bikin pabrik pupuk itu uang rakyat. Modal kerjanya uang rakyat. Tapi, begitu pupuk dihasilkan, dan didistribusi, distributornya perusahaan swasta. Kalau zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, tidak. Yang distribusi pupuk adalah koperasi, koperasi unit desa (KUD).

Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan asas pasar bebas oleh beberapa orang, diganti jadi swasta. Dengan swasta, PT-PT yang dikasih, akhirnya, ya kita tahulah di Indonesia, kan? Nepotisme.

Yang ditunjuk sebagai distributor rata-rata keluarga pejabat. Keluarganya direktur perusahaan, atau keluarganya direktur BUMN, atau keluarganya gubernur, bupati, atau keluarganya pemimpin partai yang berkuasa, atau yang berpengaruh.

Jadi, kita harus kembali ke fundamental, ke asas-asas yang benar. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerja dari APBN, uang rakyat, distribusinya harus juga oleh rakyat. Yaitu, melalui koperasi, dan melalui pemerintah kalau perlu.

Selain jadi alat pemerataan, koperasi juga bisa jadi motor swasembada kita. Namun untuk itu harus ada pengerahan tenaga, pikiran, usaha yang sangat sungguh-sungguh. Kita tidak bisa anggap ini adalah pekerjaan biasa. Ini bukan pekerjaan biasa. Kita harus anggap ini sebagai suatu usaha nasional.

Koperasi Kita Saat Ini

200 Ribu Koperasi Skala Kecil

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200.000 koperasi*, namun hampir seluruhnya skala kecil dan hanya 1 koperasi yang masuk ke daftar 300 koperasi terbaik International Cooperative Alliance.

Koperasi	Aset (Rp.)	Volume Usaha (Rp.)
Kospin Jasa Pekalongan	7,03 triliun	4,60 triliun
Kopdit Lantang Tipo	2,59 triliun	1,79 triliun
Kisel Jakarta	1,09 triliun	5,77 triliun
KSP BMT Sidogiri	2,24 triliun	2,04 triliun
Kopdit Pancur Kasih	2,01 triliun	1,31 triliun
Mandiri Healthcare Jakarta	2,03 triliun	2,10 triliun
KSP Sejahtera Bersama Bogor	2,05 triliun	1,04 triliun
KWSG Semen Gresik	1,20 triliun	2,64 triliun
Kopdit Keling Kumang	1,28 triliun	781 miliar
Kop Astra Internasional Jakarta	974 miliar	636 miliar

* Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Koperasi Terbesar Dunia

Menurut laporan World Cooperative Monitor, 300 koperasi terbesar di dunia memiliki volume usaha sebesar USD 2 triliun, atau sekitar Rp. 30.000 triliun rupiah.

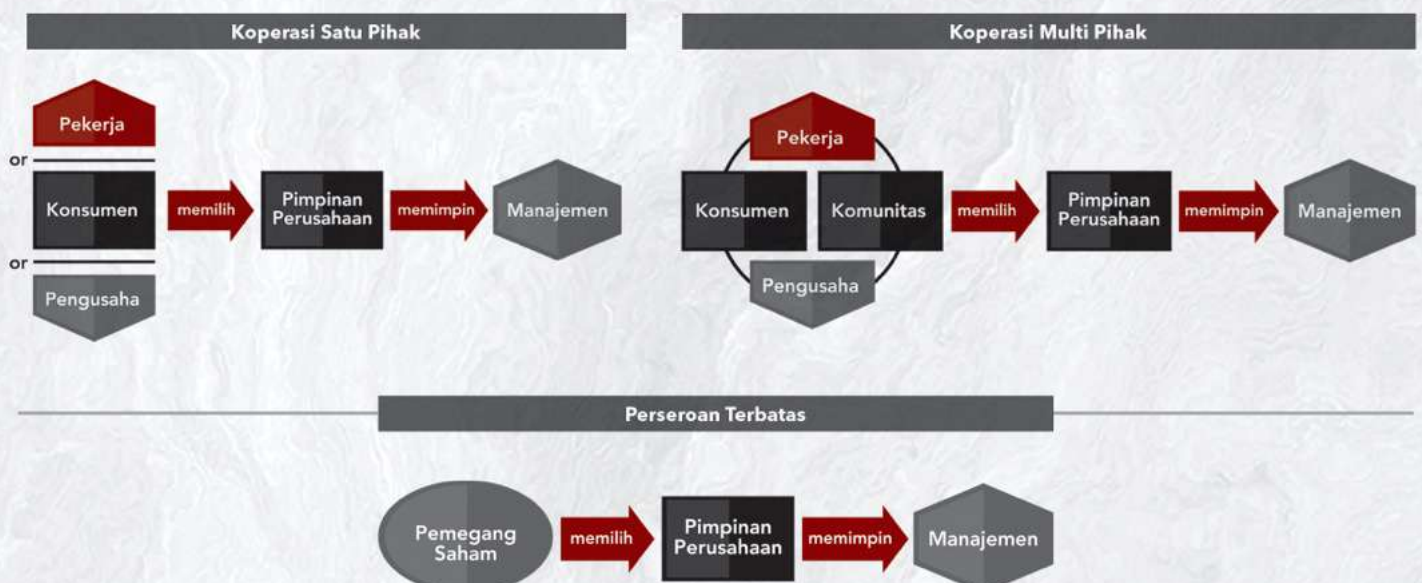
Sektor	Nama Koperasi	Negara	Volume Usaha (USD)
Pertanian	Zen noh	Jepang	41 milyar
	Nonghyup	Korea Selatan	38 milyar
	CHS Inc.	Amerika Serikat	31 milyar
Industri	Corporación Mondragón	Spanyol	13 milyar
	Basin Electric Power Cooperative	Amerika Serikat	2 milyar
	SACMI	Italia	1 milyar
Perdagangan Eceran	REWE Group	Jerman	55 milyar
	ACDLEC-E Leclerc	Perancis	42 milyar
	Edeka Zentrale	Jerman	37 milyar
Asuransi	Zenkyoren	Jepang	51 milyar
	Nippon Life	Jepang	48 milyar
	State Farm	Amerika Serikat	42 milyar
Layanan Keuangan	Groupe Crédit Agricole	Perancis	51 milyar
	BVR	Jerman	29 milyar
	Groupe BPCE	Perancis	25 milyar
Pendidikan dan kesehatan	Health Partners Inc.	Amerika Serikat	6 milyar
	Fundación Espriu	Spanyol	2 milyar
	Unimed	Brazil	1 milyar

Dari Kapitalisme "Pemegang Saham" ke Pemangku Kepentingan

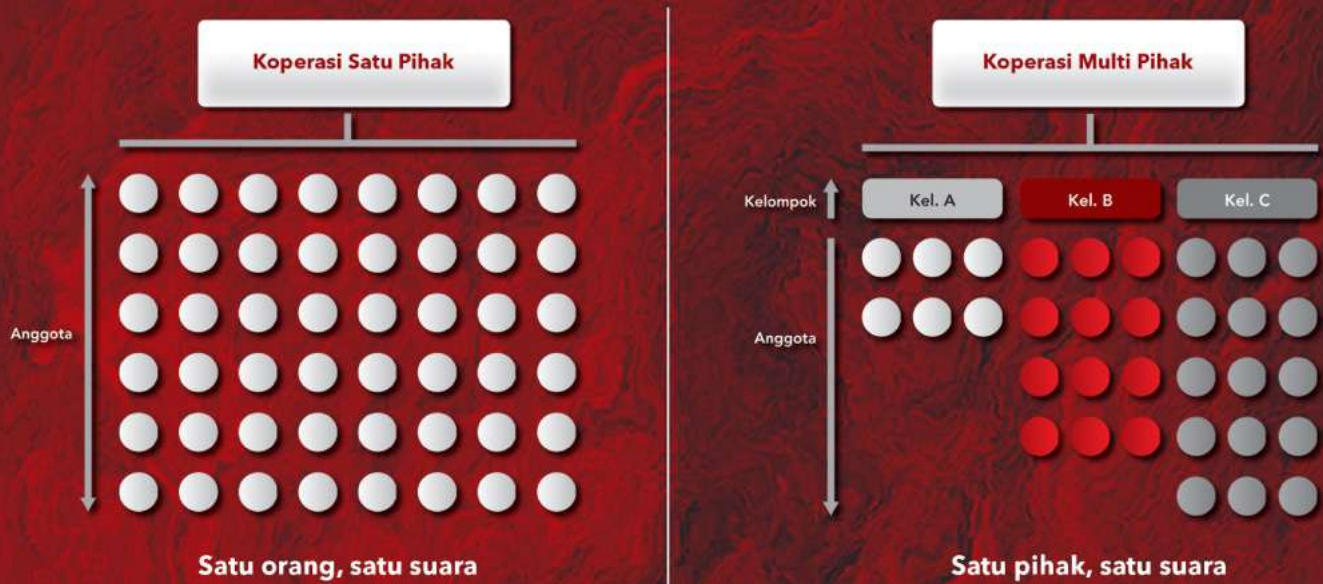
Agar tercapai pemerataan dalam investasi, diperlukan perubahan haluan dari "*shareholder capitalism*" yang menjadi dasar dari kapitalisme murni, ke "*stakeholder economy*" yang memperkuat semua pihak dalam ekonomi tersebut – tidak hanya pemilik modal.

Terbitnya Permenkop 8 / 2021 tentang Koperasi Multi Pihak memungkinkan kita untuk masuk ke babak baru berkoperasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pemilik modal tetapi juga menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Perbandingan Tata Kelola



Tata Kelola Koperasi Multi Pihak



Strategi modernisasi koperasi Indonesia

Koperasi Kemarin

- Jumlahnya banyak
- Berdiri sendiri
- Kurang nilai tambah

Koperasi Modern

- Hulu hilir sektor riil
- Profesional
- Koefisien tumbuh tinggi



Sumber: Kementerian Koperasi, 2021

Asta Cita

Perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur tidak akan mudah jika kita tidak memiliki cita-cita yang kuat.

Untuk bisa berhasil melaksanakan 8 Program Hasil Terbaik Cepat dan 17 Program Prioritas, kita perlu memiliki kesamaan cita-cita. Cita-cita pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas ini saya simpulkan dalam 8 butir 'Asta Cita' berikut.

Cita-cita 1:

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Cita-cita 2:

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Cita-cita 3:

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Cita-cita 4:

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Cita-cita 5:

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Cita-cita 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Cita-cita 7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Cita-cita 8:

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Insya Allah, jika kita memiliki kesamaan cita-cita untuk pembangunan bangsa kita selama 5 tahun ke depan, jika kita sama-sama berdoa dan berupaya untuk wujudkan 8 Asta Cita ini, kita akan dapat berhasil dalam tugas kita.



The infographic is shaped like a classical building with three pillars. The roof is a red triangle containing the vision statement. The pillars are gold and each has a red number and text. The base consists of three stacked red rectangular blocks with gold borders. The background is a light blue and white marbled pattern.

Visi
Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

8
MISI
ASTA
CITA

17
PROGRAM
PRIORITAS

8
PROGRAM
HASIL
TERBAIK
CEPAT

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis
Bangsa Indonesia

Prinsip Prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945

**Kebersamaan & Kerukunan:
Syarat Utama
Tercapainya
Indonesia Emas**





Pilihan dan Perjuangan Kita Sulit

Bagi saya, masuk ke politik ini adalah pengorbanan. Pengorbanan tenaga, waktu, dan perasaan. Tetapi jika tidak masuk ke politik, tidak mungkin saya bisa memperbaiki kehidupan rakyat banyak.

Ya, saya percaya tidak mungkin kita bisa wujudkan perbaikan kehidupan rakyat secara besar-besaran hanya dengan mengomel dan mengkritik. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki bangsa hanya dengan menjadi pengamat. Tidak mungkin hanya dengan menghardik kita bisa melakukan perbaikan.

Sebagian dari saudara yang membaca buku ini mungkin sudah masuk ke politik, atau sekedar paham dan peduli politik nasional. Sebagian juga mungkin belum. Jika belum, saya ingin saudara renungkan hal berikut.

Ada kalanya dalam hidup kita harus memilih pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran, atau merestui ketidakbenaran?

Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi? Atau, kita menyerah kepada uang, kita menjual nilai-nilai kita, kita menjual diri kita, kita menjual kepribadian kita, kita menjual harga diri kita?

Pilihan-pilihan semacam ini sangat sulit.

Pada tahun '45 pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan, atau menunggu diberikan kemerdekaan oleh penjajah?

Mereka yang menghendaki menyatakan kemerdekaan, agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, memang mempertaruhkan nyawanya dalam risiko.

Menjelang 10 November 1945, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya juga dihadapkan pada pilihan yang susah. Menyerah pada ultimatum Inggris untuk angkat tangan dan menyerahkan senjata paling lambat tanggal 9 November, atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada saat itu.

Kita bayangkan, bagaimana harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin di Surabaya dan rakyat di Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin Jawa Timur dan Surabaya, tunduk kepada ultimatum asing, bagaimana harga diri kita sekarang?

Juga dalam krisis-krisis besar bangsa kita tahun '65, apakah pemimpin membela Pancasila, atau menyerah kepada ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa kita, yaitu komunisme?

Demikian juga pada tahun '98. Pada era Reformasi, banyak pemimpin kita juga yang dihadapkan pada pilihan susah. Membela sistem yang kurang demokratis, atau berani membawa reformasi dan demokrasi?

Dalam perjalanan politik saya 20 tahun terakhir, saya membawa pesan yang kurang lebih sama dengan apa yang terkandung di dalam buku ini. Dalam perjalanan saya, banyak lawan saya yang selalu hendak mendiskreditkan saya.

Saya digambarkan sebagai seorang yang haus kekuasaan, yang nafsu untuk berkuasa. Dan, saya digambarkan sebagai seorang yang suka menggunakan kekerasan, yang kejam, dan sebagainya.

Padahal, saya telah membuktikan setelah sekian puluh tahun, bahwa saya selalu mengutamakan jalan damai.

Saya seorang mantan prajurit yang mengerti perang. Saya pernah melihat perang. Saya pernah melihat korban-korban perang. Komandan yang sangat saya hormati gugur di tangan saya karena ditembak musuh. Anak buah-anak buah saya yang terbaik gugur di sekitar saya, di medan perang.

Saya yang harus ke keluarga mereka, ke ibu-ibu mereka, ke istri mereka, ke orang tua mereka, untuk memberi tahu putranya gugur di bawah kepemimpinan saya. Karena itu, saya selalu ingin jalan damai.

Fitnah-fitnah yang mereka lontarkan sungguh sangat keji. Saya dituduh ingin menutup semua gereja di Republik Indonesia, padahal keluarga saya sebagian Kristen. Bahkan di sekitar saya, pengawal-pengawal saya, ajudan-ajudan saya, sekretaris saya, sebagian orang Nasrani.

Saya seorang mantan prajurit TNI. Sumpah saya membela seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya, dan banyak anak buah saya dari berbagai suku dan agama telah gugur di bawah komando saya.

Bagaimana bisa saya melanggar sumpah saya, dan melupakan pengorbanan anak buah saya?

Saya juga telah difitnah, seolah bahwa saya adalah anti etnis Tionghoa. Padahal saya selalu membela semua kelompok minoritas. Fitnah-fitnah itu adalah bagian yang keji dari politik.

Saya selalu minta kepada para sahabat dan pendukung saya untuk sabar dan tenang. Jangan menjadi marah. Kita harus semakin arif, semakin sabar. Dengan diam bukan kita menerima fitnah itu, tetapi kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya.

Jangan kita balas kedengkian dengan kedengkian.
Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan.
Jangan kita balas fitnah dengan fitnah.

Saya minta saudara-saudara terus, walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap napas kita.

Saya minta saudara-saudara yang membaca buku ini, dalam keheningan malam nanti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabanmu.

Saya bertanya, apakah kita akan bersama-sama membela kebenaran, atau kita menyerah kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezaliman?

Dan, dalam hari-hari yang akan datang, setelah saudara merenung, saya mengajak saudara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang.

Saya telah memilih berjuang di atas landasan konstitusional. Saya tidak mau menyerah kepada keadaan yang tidak benar dan tidak adil. Saya menilai yang dialami Indonesia sekarang ini sarat dengan campur tangan asing. Ada negara-negara tertentu yang ingin Indonesia lemah, yang ingin Indonesia hancur, yang ingin Indonesia miskin.

Saya punya bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan mereka. Tetapi kita tetap harus tenang. Kita harus sabar, dan kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri.

Kita Memimpin Dengan Dawuh Fatwa

Di Padepokan Garudayaksa, dan dimanapun saya mendapat kesempatan berbagi, setiap saya bertemu dengan siswa-siswi baru, saya mendapat semangat baru. Saya mendapat harapan baru. Saya menilai harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik terletak di pundak mereka yang berjuang belajar dan berbagi dengan saya.

Harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik juga terletak di pundak saudara yang telah membaca buku ini dengan seksama. Yang telah mempelajari data-data, angka-angka yang disajikan, dan arti dari data-data dan angka-angka

tersebut. Yang memahami pentingnya menyebarkan informasi yang terkandung di buku ini ke sanak saudara, kerabat dan rakyat luas.

Jika dalam membaca buku saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, ingatlah filosofi pendekar. Ilmu yang dimiliki pendekar harus dipakai untuk membela yang lemah, membela yang tidak bisa membela dirinya sendiri.

Saudara harus turun gunung, harus turun dari menara gading. Harus berani memimpin rakyat. Memimpin dengan ilmu. Memimpin dengan dawuh fatwa. Karena, sesungguhnya saudara termasuk *the best and the brightest brains of the country*.

Carilah orang-orang yang hatinya merah putih. Hatinya Pancasila. Hatinya Indonesia terhormat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Bangunkan jawara-jawara baru yang mau membela orang miskin, membela orang lemah.

Kita Tidak Boleh Tinggal Diam

Saudaraku, banyak dari apa yang saya katakan di sini memang pahit. Juga pahit kenyataan kita tidak bisa terlalu banyak berharap pada sebagian elite kita. Banyak elite Indonesia pintar bicara.

Saking pintarnya, banyak juga yang pintar bohong.

Saya masuk politik karena terpaksa. Minta ampun politik ini! Dari 15 orang yang saya temui di politik, 14 orang bicara kebohongan. Karena itu saya semangat mengetahui saudara-saudara yang membaca buku ini untuk mengetahui situasi dan kondisi bangsa kita yang sebenarnya.

Karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah kebersamaan. Bekerja dengan bersatu. Bekerja dengan akal yang baik, akal yang sehat.

Untuk sukseskan demokrasi kita, orang-orang baik, para Pandawa, mereka-mereka yang ingin melakukan, membuat, dan membangun suatu *legacy*, suatu warisan yang baik bagi anak cucunya, harus berkumpul menjadi satu untuk menawarkan kepada rakyat, suatu alternatif pilihan.

Saudara yang membaca buku ini adalah bagian dari kaum intelektual. Kaum intelektual bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan yang menentukan. Kekuatan yang damai, kekuatan yang memberi kesejukan, dan juga kekuatan yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus-menerus berjalan di Republik Indonesia.

Sekarang, kuncinya kembali kepada apa yang Edmund Burke pernah katakan. "*If everybody keeps quiet,*" kalau semua orang diam, yang akan memimpin adalah orang-orang yang tidak baik.

Satyagraha, Landasan Perjuangan Kita

Saya butuh dukungan saudara-saudara. Saya butuh dukungan secara riil, secara konkret.

Mereka, para pemodal besar yang ingin menjajah tanah air, mengatakan: Indonesia gampang, banyak rakyat Indonesia bisa dibeli, banyak pemimpin Indonesia bisa disogok.

Negara kita saat ini ada pada kondisi yang kita tidak boleh seenaknya. Kita harus waspada. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling mendukung. Sebagai bangsa yang besar, kita harus saling menjaga.

Untuk itu marilah kita bersatu. Kita harus bersatu.

Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih punya cita-cita yang luhur, rakyat Indonesia masih punya harga diri, rakyat Indonesia tidak mau dibeli begitu saja. Rakyat Indonesia tidak mau jadi kacung, rakyat Indonesia tidak mau menjadi budak. Rakyat Indonesia ingin menjadi rakyat yang terhormat.

Saudara-saudara sekalian yang membaca buku ini.

Katakanlah yang benar, benar. Dan, katakanlah yang salah, salah. Apakah benar kekayaan kita keluar tiap tahun dan kita harus menerima? Apakah benar rakyat kita ditakdirkan hanya menjadi kacung, rakyat kita hanya menjadi pelayan? Rakyat kita hanya boleh menjadi pasar? Rakyat kita hanya boleh mendapat upah murah?

Kalau saudara-saudara menilai kondisi ini benar, kita mau bilang apa?

Tapi, kalau saudara-saudara menilai ini tidak benar, dan mampu kita ubah, dan mampu kita amankan kekayaan kita, maka tidak ada jalan lain, saudara-saudara harus turun gunung. Harus memimpin rakyat.

Memimpin dengan ilmu, memimpin dengan hati, memimpin dengan anjuran, memimpin dengan pendidikan, memimpin dengan keberpihakan kepada bangsa sendiri.

Mari kita laksanakan perjuangan kita di atas landasan “satyagraha” yang telah diberi contoh di India oleh Mahatma Gandhi, dan di Amerika oleh Martin Luther King, dan di Afrika Selatan oleh Nelson Mandela.

Satyagraha artinya adalah perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan tanpa henti yang berlandaskan pada kebenaran. Perjuangan yang merangkul dan mempersatukan semua.

Percayalah kebenaran akan menang, kebenaran tidak bisa dikalahkan. Yang penting, kita harus berani, kita harus tegar, kita harus mau berkorban.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Pak Dirman, Gubernur Suryo, dan I Gusti Ngurah Rai, dan semua pahlawan pendiri bangsa kita, telah mengajarkan bahwa kalau kita tidak menyerah, kalau kita berani, kalau kita tegar,

kebenaran akan unggul. Kebenaran akan menang pada saatnya.

Kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penderitaan.

Tapi, pilihannya apa? Kita menyerah seperti budak yang disuruh duduk, duduk? Disuruh berdiri, berdiri? Disuruh tunduk, tunduk? Disuruh diam, diam? Disuruh ambil air, ambil air? Atau, kita jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti, membela haknya, membela hak-hak rakyat?

Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kekuatan kita besar. Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta, atau HANKAMRATA. Dengan sistem pertahanan rakyat semesta, kita pernah buktikan, kita berhasil melawan penjajah.

Kekuatan rakyat ini harus kita susun dan selalu kita rawat. Ya, dari orang ke orang, susunlah kekuatan. Lima orang demi lima orang, nanti sepuluh orang demi sepuluh orang. Adakan diskusi. Bahas isi buku ini di rumah masing-masing. Atur, dan pada saatnya saya akan umumkan bagaimana perjuangan kita.

Yang jelas, pilihannya hanya dua. Berdiri menghormati sebagai bangsa kesatria, atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok. Pilihannya ada di hati kita masing-masing.

Saya percaya, kita bisa, kita harus bisa melaksanakan suatu perombakan besar untuk bangsa kita.

Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada yang punya cita-cita. Masih ada yang cinta tanah air. masih ada yang ingin Indonesia berdiri dengan terhormat, dengan pemimpin-pemimpin yang terhormat, yang berdiri diatas kaki kita sendiri. Bermartabat, kuat, adil, makmur. Itu cita-cita kita bersama.

Sadarkan dan kerahkan dukungan dari sekitarmu. Temui dan sadarkan keluargamu, kerabatmu, tetanggamu. Sadarkan dan yakinkan mereka. Jelaskan asas-asas dan fakta-fakta yang terkandung di dalam buku ini. Himbau mereka, gugah mereka untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita.

Beri tahu kepada rakyat bahwa bangsa kita tidak miskin. Beri tahu kepada rakyat, ada jawaban kepada masalah bangsa. Beri tahu kepada mereka, di buku ini ada keyakinan, ada pemahaman bagaimana mengatur ekonomi.

Dalam perjuanganmu, jangan pernah menghardik, jangan mencela orang lain, tapi percaya kepada diri kita sendiri, dan selalu bimbing rakyat. Beri tahu kepada mereka, yang benar itu benar, dan yang benar pada akhirnya akan menang.

Ingatlah, semakin kita berisi, semakin kita kuat, semakin kita tunduk, semakin kita merendahkan hati kita. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Semakin dihina, semakin sopan. Semakin difitnah, semakin kita tegak.

Tidak perlu kita balas kebencian dengan kebencian. Tidak boleh ada waktu untuk kebencian. Biarlah mereka yang jahat kita yakini akan dihukum oleh kekuatan yang lebih besar dari kita semua, kekuatan yang di atas.

Marilah kita percaya, kekuatan yang di bawah, kekuatan rakyat Indonesia, akan selalu akan mendukung yang benar.

Saudara-saudaraku, rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita berpikir dengan hati mereka. Mereka akan senantiasa mendukung kita, asal kita selalu membenahi diri, selalu memperkuat akar kita ke rakyat, selalu menjadi sumber kebenaran, selalu menjadi pembela kebenaran, selalu memberi pemecahan masalah-masalah rakyat, dan jangan sekali-sekali menjadi sumber kerusakan.

Jangan juga kita tinggal diam mana kala kita melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan, kalau kita lihat penindasan terhadap rakyat kecil, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh takut membela kaum yang lemah dan kaum yang tertinggal.

Kita juga tidak boleh berjuang hanya untuk mencari kursi jabatan. Kursi kekuasaan harus direbut dengan baik, dengan terhormat, dengan halal, dengan konstitusional, dengan demokratis, oleh orang-orang yang hatinya merah putih.

Apapun Pilihan Politik-mu, Kita Tetap Bisa Berjuang Bersama

Saudaraku, banyak yang saya sampaikan di buku ini memang pahit. Karena itu, saya membangun Partai GERINDRA, suatu partai politik yang adalah partai massa, tapi dipimpin oleh kader-kader yang punya ideologi.

Ideologi apa? Ideologi GERINDRA adalah 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar '45, dan Pancasila sebagai jaminan kerukunan dan persatuan bangsa.

Partai GERINDRA berdiri untuk memberi harapan kepada rakyat kita. Partai GERINDRA berdiri untuk melarang usaha-usaha untuk membuat bangsa Indonesia terus miskin.

Partai GERINDRA memang didirikan begitu di luar akal, begitu cepat, dalam hanya beberapa minggu saja, tetapi bisa dapat kepercayaan begitu banyak rakyat. Saya percaya ini karena Partai GERINDRA memang ingin memberi suatu pilihan lain pada bangsa kita.

Jangan sampai bangsa dan negara, dan masyarakat yang kita cintai dibuat agar terus menjadi bangsa miskin. Bangsa pelayan, bangsa tukang sapu, bangsa kacung, bangsa pinjam-pinjam, bangsa minta-minta. Bangsa yang tidak punya tabungan, bangsa yang anak mudanya tidak punya harapan.

Partai GERINDRA didirikan untuk jadikan Indonesia kembali milik rakyat Indonesia.

Partai GERINDRA menolak anggapan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang miskin. Bangsa Indonesia bukan bangsa miskin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kekayaannya mengalir terus ke luar negeri.

Saya menulis buku ini, dan saya berbicara di berbagai kesempatan untuk memberi pencerahan bukan untuk memberi janji palsu. Saya berdiri di panggung demokrasi, karena saya percaya kita harus kembali ke Pancasila, kembali ke Undang-undang Dasar '45.

Seperti yang sudah saya jelaskan di buku ini, saya percaya di dalam Undang-undang Dasar '45 itu sebetulnya letak daripada rumus kebangkitan bangsa Indonesia.

Benar yang dikatakan Bung Karno. Bangsa kita harus punya keberanian. Hanya rakyat yang berani mempertahankan hartanya sendiri, kekayaannya sendiri, hanya rakyat itulah yang akan mendapat kemakmuran.

Jika saudara sudah menjadi anggota dari partai lain, atau tidak bisa berpartisipasi dalam politik karena masih aktif sebagai anggota TNI/POLRI, tidak apa. Mari kita bekerja keras saling bahu-membahu, saling isi-mengisi, saling membangun komunikasi. Saya percaya dan selalu katakan, Partai GERINDRA harus bersahabat dengan semua kekuatan merah putih di seluruh Indonesia. Saya percaya di semua partai banyak orang baik, orang baik yang berjiwa patriot dan cinta tanah air.

Kita harus galang komunikasi, bangun persahabatan, dan kita pada saatnya harus wujudkan suatu bukti yang nyata untuk rakyat kita.

Perjuangan kita tidak semata-mata cari kursi pemilihan. Kursi di dewan, kursi di kabupaten, kursi gubernur, kursi wali kota, kursi Menteri, kursi Presiden, itu semua penting, karena dengan kita mendapat kepercayaan di pemerintahan, baru kita bisa wujudkan cita-cita kita. Tapi, jangan fokus dan berpikiran hanya ke situ. Harus lebih dari itu.

Bersama atau tidak bersama Partai GERINDRA, kita semua yang hatinya merah putih harus menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial. Kita harus hadir di kehidupan rakyat. Hadir di sawah-sawah. Hadir di lembah-lembah. Hadir di desa-desa. Hadir di daerah-daerah kumuh.

Kita harus bela orang-orang yang sedang susah. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit dulu. Kalau sedikit pun tidak bisa bantu, bantu satu orang.

Kalau satu orang pun kau tidak bisa bantu, minimal saudara didik rakyat sekitarmu, sadarkan mereka bahwa bangsa Indonesia harus kembali berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan mau kita jadi bangsa pesuruh. Jangan mau terus-menerus kita dipermalukan di mana-mana.

Sekaranglah saatnya saudara menjadi guru di tengah rakyat. Bangkitkanlah kesadaran rakyat bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, manakala kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri.

Saya minta, bagi saudara-saudara yang ingin berjuang bersama saya dalam memperjuangkan dan membela nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai membela Indonesia, nilai-nilai membangun Indonesia yang benar, yang baik, untuk anak dan cucu kita. Bagi saudara-saudara yang ada di golongan ini, marilah terus kita berjuang dalam kekompakan dan kebersamaan. Marilah kita menilai, dari hari ke hari, apa pun yang kita lakukan harus selalu di atas landasan konstitusi kita, tidak boleh menggunakan kekerasan.

Saya tidak tahu, dari semua yang membaca buku ini, berapa dari antara saudara yang mau berjuang bersama saya. Atau, bagi saudara yang hanya mau melihat dari pinggir, saya pun tidak masalah.

Terima kasih, saudara telah meluangkan waktu untuk membaca pikiran-pikiran saya. Jika setelah membaca buku ini saudara memutuskan untuk bergabung dengan perjuangan saya, saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya saudara.

Percayalah, selama saudara memandang saya kawan, saya akan menjadi kawanmu. Saya akan berjuang bersamamu. Saya akan setia kepada saudara, karena saya yakin, saudara setia kepada rakyat Indonesia. Saudara setia kepada bangsa Indonesia dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa merestui perjuangan kita, dan semoga kita selalu kuat, iman kita kuat, keyakinan kita kuat, keberanian kita kuat untuk cinta dan bela tanah air kita sehingga setidaknya cita-cita Para Pendiri Bangsa dapat terwujud di 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045.

Jangan sekali-sekali kita lupa sejarah kita. Bahwa kita berasal dari bangsa yang berani. Bangsa yang tidak takluk dengan siapa pun. Bangsa yang punya kehormatan. Bangsa yang punya cita-cita. Bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain.

Itu adalah perjuangan, impian dan tekad saya. Impian ini hanya bisa jadi kenyataan kalau kita konsekuen melaksanakan Ekonomi Pancasila dan program-program pembangunan yang tepat.

Kita harus berani dan bisa mengamankan dan menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, negara kita tidak mungkin jadi negara sejahtera.

Kita harus berani dan bisa mewujudkan demokrasi yang benar-benar dari dan untuk rakyat, agar siapapun yang terpilih dalam proses demokrasi memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan terbaik untuk Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera. Shalom. Om santi, santi, santi om.

Namo buddhaya.

Merdeka!

Prabowo Subianto

Amanat Jenderal Sudirman

"Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya"

**Panglima Besar
Jenderal Sudirman**



Ada 3 Golongan Manusia, yang Manakah Anda?

The Leaders

Mereka yang membuat hal-hal terjadi

The Followers

Mereka yang melihat hal-hal terjadi

The Apathetic

Mereka yang menanyakan bagaimana hal-hal bisa terjadi

17 Program Prioritas Transformasi Bangsa



Mencapai swasembada pangan, energi, dan air



Penyempurnaan sistem penerimaan negara



Reformasi politik, hukum, dan birokrasi



Pencegahan dan pemberantasan korupsi



Pemberantasan kemiskinan



Pencegahan dan pemberantasan narkoba



Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat



Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi



Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif



Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas



Menjamin pelestarian lingkungan hidup



Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani



Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau sanitas baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan



Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi



Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah



Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

8 Program Hasil Terbaik Cepat Transformasi Bangsa



Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.



Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.



Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.



Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.



Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.



Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.



Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, & masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.



Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena kemajuan dan kemakmuran. Walau telah banyak kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita, bangsa kita belum mencapai cita-cita kemajuan "Indonesia Emas".

Di buku ini, saya menuangkan seluruh pemahaman saya akan kondisi negara kita dan kemajuan yang telah kita capai. Saya juga paparkan Strategi Transformasi yang diperlukan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045, dan bagaimana kita bisa bersama-sama wujudkan strategi tersebut sehingga Indonesia benar-benar bisa jadi negara maju dan makmur.

Waktu kita tidak banyak. Bonus demografi kita hanya akan berlangsung 13 tahun ke depan. Kita juga harus menghadapi ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%.

Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Strategi ini perlu diterjemahkan dalam program-program yang tepat, program-program yang menjawab seluruh tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

ISBN 978-623-99281-6-2

